



**BerAKHLAK** > bangga melayani bangsa



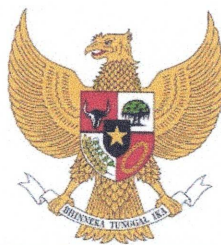
# RANHIR RENSTRA

2025-2029

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Jl. Brigjen Katamso No. 9 Palangka Raya

 @dpmkalteng



**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**  
**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**  
**NOMOR 46 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025-2029**

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kepala Daerah menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah paling lama 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.
- b. bahwa Rencana Strategis Perangkat yang ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029.

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6301);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6870);
11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6987);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan

- Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5888) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5941);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Nasional (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6056);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6909);
  23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
  24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 182);
  25. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 112);
  26. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2020 tentang Reforma Agraria;

27. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 19);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
32. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021 tentang Standar Operasionalisasi Prosedur Konsolidasi Tanah;
33. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat;
34. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 1);
35. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah

- (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 Nomor 4);
36. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 5);
  37. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 3);
  38. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025-2029.

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra adalah dokumen perencanaan strategis untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinas daerah dan badan daerah dalam lingkup Pemerintah Provinsi.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2029, meliputi:
  - 1) Inspektorat Daerah;
  - 2) Dinas Pendidikan;
  - 3) Dinas Kesehatan;
  - 4) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - 5) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
  - 6) Dinas Sosial;
  - 7) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  - 8) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - 9) Dinas Ketahanan Pangan;
  - 10) Dinas Lingkungan Hidup;
  - 11) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
  - 12) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

- 13) Dinas Perhubungan;
- 14) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
- 15) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- 16) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 17) Dinas Pemuda dan Olahraga;
- 18) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- 19) Dinas Perpustakaan dan Arsip;
- 20) Dinas Kelautan dan Perikanan;
- 21) Dinas Perkebunan;
- 22) Dinas Kehutanan;
- 23) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 24) Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- 25) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan;
- 26) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- 27) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- 28) Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- 29) Badan Pendapatan Daerah;
- 30) Badan Kepegawaian Daerah;
- 31) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- 32) Badan Penanggulangan Bencana;
- 33) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 34) Badan Penghubung;
- 35) Sekretariat DPRD; dan
- 36) Sekretariat Daerah;

## **Pasal 2**

- (1) Renstra disusun dengan mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :
  - a. Pendahuluan;
  - b. Gambaran Pelayanan Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
  - c. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan;
  - d. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
  - e. Penutup.
- (3) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2025-2029, berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025-2029.

### **Pasal 3**

- (1) Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan acuan setiap Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi untuk menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD;
- (2) Pemerintah Provinsi dapat melakukan penambahan sub kegiatan baru akibat dari kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, kejadian luar biasa, dan/atau perintah dari peraturan perundang-undangan setelah Renstra Perangkat Daerah ditetapkan;
- (3) Penambahan sub kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Pemerintah Provinsi menggunakan hasil Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi dengan DPRD.

### **Pasal 4**

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan pemetaan program dan kegiatan sesuai dengan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian muatan dalam Peraturan Gubernur ini.

### **Pasal 5**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

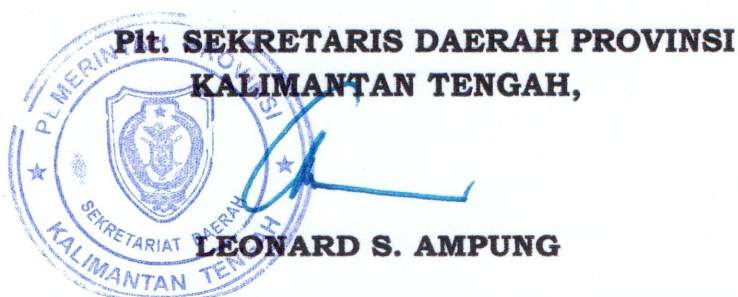
Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 26 September 2025

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**



**AGUSTIAR SABRAN**

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 26 September 2025



**Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN TENGAH,**

**LEONARD S. AMPUNG**

# KATA PENGANTAR

Tabé Salamát Lingu Nalatai, Salam Sujud Karendem Malempang,

Adil Ka'Talino, Bacuramin Ka'Saruga, Basengát Ka'Jubata.

Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya, kami dapat menyelesaikan dokumen Rancangan Akhir Rencana Strategis (Ranhir Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 – 2029.

Rancangan Akhir Rencana Strategis (Ranhir Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 – 2029 merupakan dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk periode lima tahun. Dokumen ini berisikan lima bab pembahasan yang diharapkan dapat memberikan informasi mengenai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah yang telah dilakukan penyesuaian dan penyelarasan seiring dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta kesesuaian untuk mendukung tercapainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana



Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) mendatang yang juga tetap mempertimbangkan rencana pembangunan pada periode sebelumnya.

Dalam upaya penyempurnaan dan komitmen bersama untuk memajukan pembangunan sumber daya lokal baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya, diperlukan masukan saran dan kritik yang membangun guna dokumen ini dapat bermanfaat dan menjadi pedoman Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah dalam mewujudkan visi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 dan Kalteng Tangguh 2045.

Serta terima kasih kami ucapkan kepada berbagai pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah ini.

Palangka Raya, 30 September 2025

Kepala Dinas,



**H. ARYAWAN, S.IP., M.IP.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19700514 200604 1 010



# DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL .....	vi
DAFTAR BAGAN.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 LATAR BELAKANG .....	1
1.2 LANDASAN HUKUM .....	3
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN .....	7
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN .....	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....	11
2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	11
2.1.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.....	11
2.1.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH.....	14
2.1.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....	18
2.1.4 KELOMPOK SASARAN LAYANAN.....	43
2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....	43



2.2.1	PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	44
2.2.2	ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	49
BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	53
3.1	TUJUAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 – 2029.....	61
3.2	SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 – 2029.....	63
3.3	STRATEGI PERANGKAT DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 – 2029. ....	69
3.4	ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 – 2029.....	72
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	74
4.1	URAIAN PROGAM.....	78
4.2	URAIAN KEGIATAN.....	81
4.3	URAIAN SUB KEGIATAN BESERTA KINERJA, INDIKATOR, TARGET DAN PAGU INDIKATIF.....	102
4.4	TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 – 2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERANGKAT DAERAH.....	145



4.5	TARGET KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025 – 2029 MELALUI INDIKATOR KUNCI (IKK).....	148
BAB V	PENUTUP.....	150
5.1	KAIDAH PELAKSANAAN .....	150
5.2	SKEMA MONITORING DAN EVALUASI .....	152
5.3	REVIU APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH (APIP) TERHADAP RANHIR RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 – 2029 .....	158
5.4	KINERJA RENSTRA PD PER URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	159

## LAMPIRAN



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi Sumber Daya Manusia Dinas PMD Prov. Kalteng ...	15
Tabel 2.2	Rekapitulasi Pegawai Dinas PMD Prov. Kalteng.....	15
Tabel 2.3	Inventaris Barang Dinas PMD Prov. Kalteng per Januari 2025	16
Tabel 2.4	Kinerja Capaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah periode 2021 – 2024. ....	32
Tabel 2.5	Kinerja Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah periode 2021 – 2024 .....	34
Tabel 2.6	Rekapitulasi Perkembangan Status Desa Tahun 2018 – 2024.	45
Tabel 2.7	Persentase Perkembangan Status Desa Tahun 2018 – 2024....	45
Tabel 2.8	Rekapitulasi Perkembangan Status Kabupaten Tahun 2018 – 2024.....	46
Tabel 2.9	Persentase Status Desa Per Kabupaten pada Tahun 2023 – 2024 .....	46
Tabel 2.10	Lembaga Desa Aktif per Kabupaten pada Tahun 2023 – 2024.	48
Tabel 2.11	Isu Strategis Perangkat Daerah .....	50
Tabel 3.1	Delapan Prioritas Nasional dalam RPJMN periode 2025 – 2029 .....	55
Tabel 3.2	Lima Misi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2025 - 2029	58
Tabel 3.3	Outcome urusan pemberdayaan masyarakat dan desa .....	62
Tabel 3.4	Rumusan tujuan dan sasaran renstra Dinas PMD .....	68
Tabel 3.5	Pentahapan Renstra Perangkat Daerah.....	69



Tabel 3.6	Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah.....	73
Tabel 4.1	Program Dinas PMD Prov. Kalteng tahun 2025 – 2030 .....	78
Tabel 4.2	Rumusan Program/Kegiatan/Sub kegiatan Dinas PMD Prov. Kalteng.....	82
Tabel 4.3	Rencana program/kegiatan/sub kegiatan dan pendanaan Dinas PMD Prov. Kalteng.....	102
Tabel 4.4	Program perangkat daerah dalam mendukung program prioritas daerah.....	136
Tabel 4.5	Sub kegiatan prioritas perangkat daerah dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah .....	136
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	145
Tabel 4.7	Indikator Kinerja Utama Dinas PMD Prov. Kalteng.....	147
Tabel 4.8	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas PMD Prov. Kalteng.....	148
Tabel 4.9	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Provinsi Kalimantan Tengah terhadap Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	149
Tabel 5.1	Skema pelaksanaan monitoring dan evaluasi Renstra Dinas PMD Prov. Kalteng Tahun 2025 – 2029.....	152
Tabel 5.2	Jenis forum monitoring dan evaluasi Renstra tahun 2025 – 2029 .....	154
Tabel 5.3	Indikator Kinerja Utama pada Dinas PMD Prov. Kalteng Periode 2025 – 2030. ....	160
Tabel 5.4	Indikator Kinerja Utama pada Program/Kegiatan/Subkegiatan Dinas PMD Prov. Kalteng Periode 2025 – 2030 .....	162



# DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1	Alur Tahapan Penyusunan Rencana Strategis .....	2
Bagan 2.1	Struktur Organisasi Dinas PMD Prov. Kalteng .....	12



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan Pembangunan ....	54
Gambar 3.2	Konsep Renstra Perangkat Daerah .....	54
Gambar 3.3	Kerangka keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah.....	55
Gambar 3.4	Keterhubungan antara Misi RPJMN periode 2025 – 2029 dan Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah periode 2025 – 2029 .....	60
Gambar 3.5	Keterhubungan Kinerja Pembangunan Desa .....	66
Gambar 3.6	Cross Cutting Dinas PMD Prov. Kalteng .....	67
Gambar 4.1	Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah.....	74
Gambar 5.1	Alur pendetailan monitoring, pengendalian dan evaluasi...	155



# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 LATAR BELAKANG**

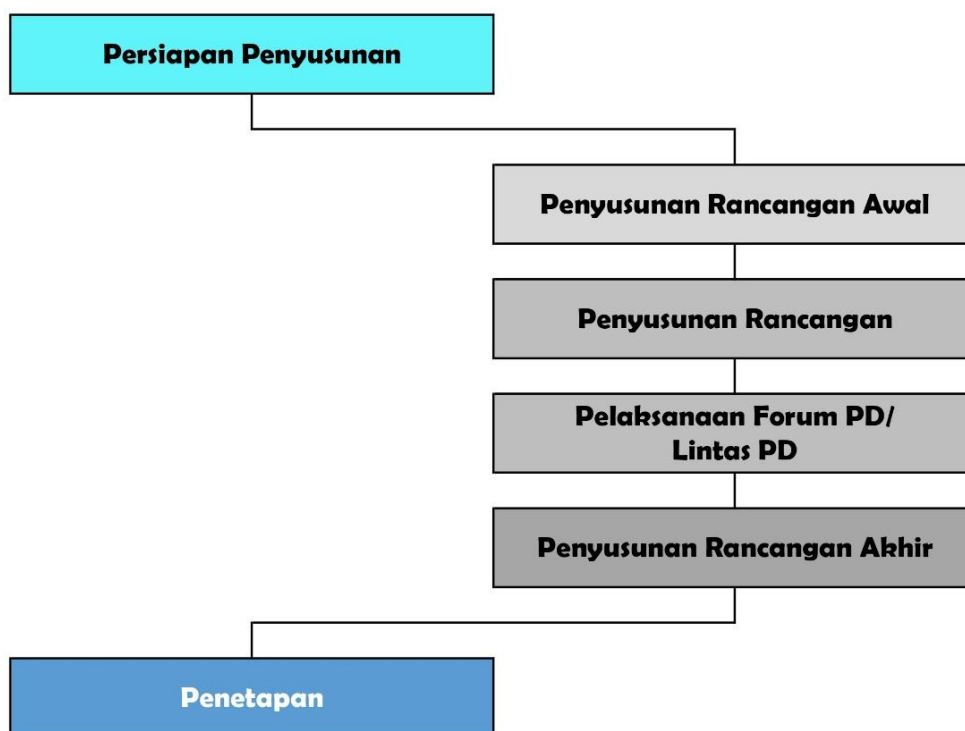
Penyusunan rancangan akhir Rencana Strategis perangkat daerah (Ranhir Renstra PD) merupakan pelaksanaan dari Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pada hakekatnya penyusunan ranhir renstra merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah dengan arah, tujuan, kebijakan, sasaran dan prioritasnya sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan tujuan untuk memberikan gambaran mengenai wujud masa depan yang diinginkan dalam kurun waktu lima tahun. Selain untuk mencapai sasaran pembangunan nasional dan daerah, penyusunan rancangan akhir rencana strategis juga sebagai tolak ukur dan alat



bantu dalam melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah, dalam hal ini adalah tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah, dalam menyelenggarakan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Dalam mencapai tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah maka dirancang rencana strategis dibersamai seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah melalui beberapa tahapan. Adapun tahapan penyusunan Ranhir Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 – 2029 dapat digambarkan dalam bagan alur sebagai berikut :

*Bagan 1.1 Alur Tahapan Penyusunan Rencana Strategis*



## 1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Ranhir Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 – 2029 didasari pada ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

1. Landasan Idiil yaitu Pancasila;
2. Landasan Konstitusional yaitu Undang – Undang Dasar Tahun 1945;
3. Landasan Operasional :
  - a. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - b. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - c. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - d. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - e. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah;
  - f. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43



- Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- g. PERMENDAGRI Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
  - h. PERMENDAGRI Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
  - i. PERMENDAGRI Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
  - j. PERMENDAGRI Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
  - k. PERMENDAGRI Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
  - l. PERMENDAGRI Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
  - m. PERMENDES PDTT Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
  - n. PERMENDAGRI Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;



- o. PERMENDAGRI Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- p. PERMENDES PDTT Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- q. PERMENDAGRI Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
- r. PERMENDAGRI Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
- s. PERMENDAGRI Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
- t. PERMENDAGRI Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
- u. PERMENDAGRI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa;
- v. PERMENDAGRI Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PERMENDAGRI Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan & Pemberhentian Kepala Desa;
- w. PERMENDES PDTT Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa;
- x. PERMENDAGRI Nomor 36 Tahun 2020 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);



- y. PERMENDAGRI Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas PERMENDAGRI Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- z. KEPMENDAGRI Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan ketiga atas Kepmendagri nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemuktahiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
- aa. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- bb. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 – 2029.
- cc. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
- dd. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 60 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.



### 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Ranhir Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 – 2029 dimaksudkan untuk memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang ingin dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah dalam periode lima tahun ke depan, yang disesuaikan dengan dinamika dan tuntutan perubahan yang terjadi di masyarakat serta sinkronisasi perencanaan pembangunan serta menyeluruh dan terintegrasi dalam mendukung kebijakan pembangunan daerah khususnya yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 – 2029. Dan juga memberikan gambaran mengenai kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja beserta target kinerja yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah untuk lima tahun mendatang.

Secara khusus Ranhir Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Mewujudkan adaptasi atas perubahan lingkungan strategis sebagai respon organisasi perangkat daerah untuk menjawab yang diperlukan oleh masyarakat.



2. Mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan tahunan yang efektif, efisien dan akuntabel dengan mempertimbangkan keterkaitan dengan visi, misi dan nilai luhur organisasi.
3. Menyediakan informasi dan gambaran hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah serta indikator kinerja yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan program lima tahun mendatang.

#### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika yang digunakan dalam penyusunan Ranhir Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN;**

Memuat rumusan tentang latar belakang berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra PD dan dilengkapi definisi, amanat regulasi dan nilai strategis Renstra PD; landasan hukum yang relevan dan signifikan sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum; maksud dan tujuan; sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing – masing bab dalam Renstra PD.



## BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;

Dibagi menjadi dua sub bab, yaitu sub bab gambaran pelayanan perangkat daerah yang memuat data – data dan informasi terkait tugas, fungsi, struktur, sumber daya, kinerja dan kelompok sasaran layanan perangkat daerah; dan sub bab permasalahan dan isu strategis perangkat daerah yang memuat permasalahan pelayanan dan isu strategis perangkat daerah.

## BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;

Memuat rumusan tentang tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah serta strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah tahun 2025 – 2029.

## BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;

Memuat rumusan tentang program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, pagu indikatif, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah melalui indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah dan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah melalui indikator kinerja kunci (IKK).



## BAB V PENUTUP.

Memuat rumusan tentang kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.



# **BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

## **2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

### *2.1.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH*

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah memiliki dasar pembentukan yang dimuat dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada BAB XXVI Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 60 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada BAB XXVI Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa. Dimana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Dinas ini memiliki susunan organisasi yang terdiri atas Kepala Dinas; Sekretariat terdiri atas Subbagian Umum Kepegawaian dan Subbagian Keuangan dan Aset; Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Bidang Kelembagaan, Perkembangan Desa dan



Pelayanan Sosial Dasar; Bidang Pemberdayaan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Kawasan Perdesaan dan Ketahanan Masyarakat; Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Investasi Desa; dan Kelompok Jabatan Fungsional, dapat digambarkan pada bagan struktur organisasi di bawah ini :

*Bagan 2.1 Struktur Organisasi Dinas PMD Prov. Kalteng*



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam



melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang – undangan. Serta memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. pembinaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan desa, kelembagaan, perkembangan desa dan pelayanan sosial dasar, pemberdayaan pengelolaan sumber daya alam, kawasan perdesaan dan ketahanan masyarakat, pemberdayaan ekonomi dan investasi desa;
- c. pelaksanaan koordinasi kebijaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan prakarsa dan swadaya gotong royong;
- d. pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- e. penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas.



## 2.1.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh sumber daya manusia dan sarana serta prasarana secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

### 2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari PNS Daerah, Tenaga Kontrak dan Tenaga *Outsourcing* dengan status pendidikan terendah adalah SMA/ sederajat sebesar 32%, status Pendidikan tertinggi adalah S2/magister sebesar 13% dan status Pendidikan terbanyak adalah S1 sebesar 49% dengan rentang usia 20 – 60 tahun dan sebesar 33% di rentang usia 31 – 40 tahun yang tergolong usia produktif serta melebihi 42% keterlibatan wanita dalam birokrasi berdasarkan data kepegawaian per Juni 2025.



Tabel 2.1 Komposisi Sumber Daya Manusia Dinas PMD Prov. Kalteng

		PNS				Tenaga Kontrak				Tenaga Outsourcing				Keseluruhan	
		L	P	Jumlah	Persentase	L	P	Jumlah	Persentase	L	P	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
Golongan	II/c	1	-	1	2%	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2%
	II/d	1	2	3	7%	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5%
	III/a	6	5	11	26%	-	-	-	-	-	-	-	-	11	18%
	III/b	4	2	6	14%	-	-	-	-	-	-	-	-	6	10%
	III/c	-	5	5	12%	-	-	-	-	-	-	-	-	5	8%
	III/d	7	3	10	23%	-	-	-	-	-	-	-	-	10	16%
	IV/a	2	2	4	9%	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6%
	IV/b	2	-	2	5%	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3%
	IV/c	1	-	1	2%	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2%
V	1	3	4	9%											
IX	5	10	15	35%											
Jumlah	30	32	62	100%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	62	100%	
Pendidikan	SMA	4	3	7	11%	5	1	6	55%	13	4	17	85%	30	32%
	DIII	2	2	4	6%	-	-	-	-	-	-	0	-	4	4%
	DIV	1	-	1	2%	-	-	-	-	-	-	0	-	1	1%
	S1	17	21	38	61%	4	1	5	45%	2	1	3	15%	46	49%
	S2	6	6	12	19%	-	-	0	0%	-	-	0	-	12	13%
Jumlah	30	32	62	100%	9	2	11	100%	15	5	20	100%	93	100%	
Usia	20 - 30	6	7	13	21%	1	-	1	9%	12	5	17	85%	31	33%
	31 - 40	8	15	23	37%	4	1	5	45%	2	-	2	10%	30	32%
	41 - 50	10	8	18	29%	3	1	4	36%	1	-	1	5%	23	25%
	51 - 60	6	2	8	13%	1	-	1	9%	-	-	0	-	9	10%
Jumlah	30	32	62	100%	9	2	11	100%	15	5	20	100%	93	100%	
Persentase	48%	52%			82%	18%			75%	25%			Pegawai Wanita	39	42%

Tabel 2.2 Rekapitulasi Pegawai Dinas PMD Prov. Kalteng

Jenis Kepegawaian	Jenis Kelamin		Pendidikan					Rentang Usia			
	L	P	SMA	DIII	DIV	S1	S2	20 - 30	31 - 40	41 - 50	51 - 60
PNS Daerah	30	32	7	4	1	38	12	13	23	18	8
Tenaga Kontrak	9	2	6	0	0	5	0	1	5	4	1
Outsourcing	15	5	17	0	0	3	0	17	2	1	0
<b>Jumlah</b>	<b>54</b>	<b>39</b>	<b>30</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>46</b>	<b>12</b>	<b>31</b>	<b>30</b>	<b>23</b>	<b>9</b>
<b>Persentase</b>	<b>58%</b>	<b>42%</b>	<b>32%</b>	<b>4%</b>	<b>1%</b>	<b>49%</b>	<b>13%</b>	<b>33%</b>	<b>32%</b>	<b>25%</b>	<b>10%</b>



### 2.1.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah dibedakan berdasarkan bidang aset sebagai berikut :

- tanah;
- peralatan dan mesin;
- gedung bangunan;
- jalan, irigasi dan jaringan;
- aset tetap lainnya;
- konstruksi dalam pengerjaan;
- aset lainnya; dan
- aset ekstra komptabel.

Secara rinci termuat dalam tabel berikut :

*Tabel 2.3 Inventaris Barang Dinas PMD Prov. Kalteng per Januari 2025*

No	Uraian	Jumlah
<b>A.</b>	<b>Tanah</b>	<b>2</b>
<b>B.</b>	<b>Peralatan dan Mesin</b>	<b>413</b>
	<b>1. Alat Angkutan</b>	<b>25</b>
	- Kendaraan Bermotor Penumpang	3
	- Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1
	- Motor	21
	<b>2. Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>	<b>285</b>
	<i>a. Alat Kantor</i>	32
	- Mesin Ketik	6
	- Mesin Absensi Hitung/Mesin Jumlah	1
	- Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	19
	- Alat Kantor Lainnya	6



	<i>b. Alat Rumah Tangga</i>	253
	- Meubelair	132
	- Alat Pendingin	40
	- Alat Dapur	8
	- Alat Rumah Tangga Lainnya ( <i>Home Use</i> )	33
	- Alat Pemadam Kebakaran	6
	- Meja Kerja Pejabat	5
	- Meja Rapat Pejabat	4
	- Kursi Kerja Pejabat	17
	- Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	8
	<b>3. Alat Studio Komunikasi dan Pemancar</b>	<b>24</b>
	<i>1. Alat Studio</i>	16
	- Peralatan Studio Audio	12
	- Peralatan Studio Video dan Film	4
	<i>2. Alat Komunikasi</i>	8
	- Alat Komunikasi Radio UHF	6
	- Alat Komunikasi Sosial	1
	- Program Input Equipment	1
	<i>3. Alat Persenjataan</i>	-
	<i>4. Alat Persenjataan Non Persenjataan Api</i>	6
	- Alat Keamanan	6
	<i>5. Komputer</i>	73
	- Personal Komputer	33
	- Peralatan Personal Komputer	40
<b>C.</b>	<b>Gedung Bangunan</b>	<b>7</b>
<b>D.</b>	<b>Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	<b>2</b>
<b>E.</b>	<b>Aset Tetap Lainnya</b>	<b>2</b>
<b>F.</b>	<b>Konstruksi dalam Pengerjaan</b>	-
<b>G.</b>	<b>Aset Lainnya</b>	<b>83</b>
<b>H.</b>	<b>Aset Extra Komptabel</b>	<b>9</b>



### 2.1.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kinerja pelayanan pada masing – masing bidang di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

#### 2.1.3.1 Kinerja Struktural

##### 1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, merencanakan serta menerapkan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi pemberdayaan masyarakat dan desa. Serta menyelenggarakan fungsi yang pelaksanaannya dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa, kelembagaan, perkembangan desa dan pelayanan sosial dasar, pemberdayaan pengelolaan sumber daya alam, kawasan perdesaan dan ketahanan masyarakat, pemberdayaan ekonomi dan investasi desa;



- c. pelaksanaan koordinasi kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan prakarsa dan swadaya gotong royong;
- d. pembinaan penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan tugas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

## 2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif serta keuangan dan aset, kepegawaian, ketatausahaan, protokol, hubungan masyarakat dan rumah tangga, organisasi, tata laksana serta dokumentasi peraturan perundang-undangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Serta menyelenggarakan fungsi yang pelaksanaannya dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional :

- a. penghimpunan bahan/data perencanaan dan penyusunan program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta perencanaan anggaran;



- b. penghimpunan bahan/data penyusunan pelaporan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- c. pelaksanaan perumusan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan dan aset;
- e. pelaksanaan urusan perpustakaan, hubungan masyarakat, organisasi, tata laksana dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan urusan pengelolaan/administrasi keuangan, dan kepegawaian;
- g. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

- *Sub Bagian Umum dan Kepegawaian*

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpul, mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian. Serta menyelenggarakan fungsi :



- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. penyelenggaraan fasilitasi urusan protokol dan hubungan masyarakat pada Dinas;
- d. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan evaluasi kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. penyediaan perlengkapan rumah tangga kantor, pengelolaan surat menyurat, arsip, komunikasi, dokumentasi dan pelayanan umum kantor;
- f. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan formasi ASN meliputi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, usulan formasi, distribusi dan penataan pegawai serta standar kompetensi jabatan;
- g. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- h. pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan ASN (LHKASN) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;



- i. pengelolaan administrasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan budaya kerja pada Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- j. pembagian tugas dan memberi petunjuk kepada para bawahan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian secara lisan dan tertulis agar tercapai efisisensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas;
- k. penilaian prestasi kerja para bawahan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pada Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

- *Sub Bagian Keuangan dan Aset*

Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpul, mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Subbagian Keuangan dan Aset. Serta menyelenggarakan fungsi :



- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan dan Aset;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan pada Subbagian Keuangan dan Aset;
- c. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pengelolaan urusan perbendaharaan;
- e. pelaksanaan penatausahaan keuangan dan aset;
- f. penyelenggaraan penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang perangkat daerah;
- g. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup dinas;
- h. pembagian tugas dan memberi petunjuk kepada para bawahan pada Subbagian Keuangan dan Aset secara lisan dan tertulis agar tercapai efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas;
- i. penilaian prestasi kerja para bawahan pada Subbagian Keuangan dan Aset;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Keuangan dan Aset; dan



- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

### 3. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dalam pengelolaan data dan informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan desa yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional. Serta menyelenggarakan fungsi :

- a. penyalarsan kebijakan nasional dengan kebijakan skala provinsi tentang penataan desa dan administrasi pemerintahan desa, bina keuangan dan aset pemerintahan desa, dan pengembangan kapasitas aparatur dan produk hukum desa;
- b. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penataan desa dan administrasi pemerintahan desa, bina keuangan dan aset pemerintahan desa, dan pengembangan kapasitas aparatur dan produk hukum desa;



- c. pelaksanaan kebijakan di bidang penataan desa dan administrasi pemerintahan desa, bina keuangan dan aset pemerintahan desa, dan pengembangan kapasitas aparatur dan produk hukum desa;
- d. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang penataan desa dan administrasi pemerintahan desa, bina keuangan dan aset pemerintahan desa, dan pengembangan kapasitas aparatur dan produk hukum desa;
- e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penataan desa dan administrasi pemerintahan desa, bina keuangan dan aset pemerintahan desa, dan pengembangan kapasitas aparatur dan produk hukum desa;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penataan desa dan administrasi pemerintahan desa, bina keuangan dan aset pemerintahan desa, dan pengembangan kapasitas aparatur dan produk hukum desa;
- g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penataan desa dan administrasi pemerintahan desa, bina keuangan dan aset pemerintahan desa, dan pengembangan kapasitas aparatur dan produk hukum desa;
- h. pelaksanaan administrasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;



- i. pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

4. Bidang Kelembagaan, Perkembangan Desa dan Pelayanan Sosial Dasar

Bidang Kelembagaan, Perkembangan Desa dan Pelayanan Sosial Dasar mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan, perkembangan desa dan pelayanan sosial dasar yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional. Serta menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelarasan kebijakan nasional dengan kebijakan skala provinsi tentang pemberdayaan kelembagaan, evaluasi perkembangan desa, dan pelayanan sosial dasar;
- b. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan kelembagaan, evaluasi perkembangan desa, dan pelayanan sosial dasar;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan kelembagaan, evaluasi perkembangan desa, dan pelayanan sosial dasar;



- d. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pemberdayaan kelembagaan, evaluasi perkembangan desa, dan pelayanan sosial dasar;
- e. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan kelembagaan, evaluasi perkembangan desa, dan pelayanan sosial dasar;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan kelembagaan, evaluasi perkembangan desa, dan pelayanan sosial dasar;
- g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan kelembagaan, evaluasi perkembangan desa, dan pelayanan sosial dasar;
- h. pelaksanaan administrasi di bidang pemberdayaan kelembagaan, evaluasi perkembangan desa, dan pelayanan sosial dasar;
- i. pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.



5. Bidang Pemberdayaan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Kawasan Perdesaan dan Ketahanan Masyarakat

Bidang Pemberdayaan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Kawasan Perdesaan dan Ketahanan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pengelolaan sumber daya alam, kawasan perdesaan dan ketahanan masyarakat desa yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional. Serta menyelenggarakan fungsi :

- a. penyesuaian kebijakan nasional dengan kebijakan skala provinsi tentang pemberdayaan pengelolaan sumber daya alam, kawasan perdesaan, ketahanan masyarakat desa dan Kerjasama desa;
- b. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan pengelolaan sumber daya alam, kawasan perdesaan, ketahanan masyarakat desa dan Kerjasama desa;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pengelolaan sumber daya alam, kawasan perdesaan, ketahanan masyarakat desa dan Kerjasama desa;
- d. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pemberdayaan pengelolaan sumber daya alam, kawasan perdesaan, ketahanan masyarakat desa dan Kerjasama desa;



- e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan pengelolaan sumber daya alam, kawasan perdesaan, ketahanan masyarakat desa dan Kerjasama desa;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan pengelolaan sumber daya alam, kawasan perdesaan, ketahanan masyarakat desa dan Kerjasama desa;
- g. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan pengelolaan sumber daya alam, kawasan perdesaan, ketahanan masyarakat desa dan Kerjasama desa;
- h. pelaksanaan administrasi di bidang pemberdayaan pengelolaan sumber daya alam, kawasan perdesaan, ketahanan masyarakat desa dan Kerjasama desa;
- i. pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## 6. Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Investasi Desa

Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Investasi Desa mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, pengawasan, evaluasi, dan pembinaan atas pelaksanaan pemberdayaan ekonomi dan



investasi desa yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional. Serta menyelenggarakan fungsi :

- a. penyalarsan kebijakan nasional dengan kebijakan skala provinsi tentang pemberdayaan kelembagaan ekonomi desa, pengembangan produk unggulan dan investasi desa, promosi dan pemasaran produk unggulan desa.
- b. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan kelembagaan ekonomi desa, pengembangan produk unggulan dan investasi desa, promosi dan pemasaran produk unggulan desa;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan kelembagaan ekonomi desa, pengembangan produk unggulan dan investasi desa, promosi dan pemasaran produk unggulan desa;
- d. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pemberdayaan kelembagaan ekonomi desa, pengembangan produk unggulan dan investasi desa, promosi dan pemasaran produk unggulan desa;
- e. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan kelembagaan ekonomi desa, pengembangan produk unggulan dan investasi desa, promosi dan pemasaran produk unggulan desa;



- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan kelembagaan ekonomi desa, pengembangan produk unggulan dan investasi desa, promosi dan pemasaran produk unggulan desa;
- g. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan kelembagaan ekonomi desa, pengembangan produk unggulan dan investasi desa, promosi dan pemasaran produk unggulan desa;
- h. pelaksanaan administrasi di bidang pemberdayaan kelembagaan ekonomi desa, pengembangan produk unggulan dan investasi desa, promosi dan pemasaran produk unggulan desa;
- i. pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.



### 2.1.3.2 Kinerja Capaian

Tabel 2.4 Kinerja Capaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Provinsi Kalimantan Tengah periode 2021 – 2024.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2021		
			Target	Realisasi	Rasio
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa.	Persentase desa yang telah melaksanakan administrasi pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.	persen	75%	39%	52,00%
Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam perkembangan desa.	Persentase lembaga desa yang dibina dalam upaya pembangunan desa.	persen	19,05%	5%	26,25%
	Persentase tingkat perkembangan desa.	persen	71%	15%	21,13%
Meningkatnya pengembangan pelayanan sosial dasar masyarakat desa.	Persentase peningkatan dan pengembangan pelayanan sosial dasar masyarakat desa.	persen	9%	3%	33,33%
Meningkatnya usaha ekonomi produktif dan pendapatan masyarakat dan desa.	Persentase jumlah lembaga ekonomi dan unit usaha masyarakat yang terbentuk.	persen	60%	60%	100,00%
	Persentase jumlah masyarakat miskin yang dibina dalam usaha meningkatkan ekonomi keluarga.	persen	0,06%	0%	0,00%
Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna di desa.	Persentase kelembagaan posyantek yang terbentuk.	persen	40%	7%	17,50%
	Jumlah terbentuknya kawasan perdesaan dalam upaya meningkatkan pemanfaatan SDA.	kawasan	3	0	0,00%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian		Realisasi Capaian		Rasio Capaian	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa.	Jumlah desa mandiri.	desa	87	65	87	194	100,00%	298,46%
	Jumlah desa berkembang.	desa	767	797	766	704	99,87%	88,33%
	Jumlah desa tertinggal.	desa	330	300	229	143	144,10%	209,79%
	Jumlah aparatur desa terlatih.	orang	650	1010	650	1184	100,00%	117,23%
Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan.	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat yang aktif.	lembaga	1730	1740	1728	3686	99,88%	211,84%
Meningkatnya kapasitas lembaga ekonomi desa/kelurahan.	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berkembang	BUMDes	720	730	647	642	89,86%	87,95%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2024		
			Target	Realisasi	Rasio
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa.	Jumlah desa mandiri.	desa	70	248	354,29%
	Jumlah desa berkembang.	desa	817	659	80,66%
	Jumlah desa tertinggal.	desa	270	86	313,95%
	Jumlah aparatur desa terlatih.	orang	1770	1943	109,77%
Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan.	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat yang aktif.	lembaga	1760	3850	218,75%
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	B	B	100,00%

Dalam perjalanannya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah selalu melakukan penyesuaian kebutuhan organisasi perangkat daerah pada penilaian kinerja sebagai wujud adaptasi terhadap perubahan lingkungan strategis



dalam rangka pelayanan prima kepada masyarakat agar pengelolaan keberhasilan organisasi pun dapat dicapai.

#### *2.1.3.3 Kinerja Keuangan*

Dalam kurun waktu tahun 2021 – 2024, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah mengalami peningkatan keuangan yang semula pada tahun 2021 sebesar Rp12.890.030.228,00,- menjadi sebesar 58.164.249.614,00,- pada tahun 2024. Dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 2.5 Kinerja Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah periode 2021 – 2024

Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran pada tahun ke -				Realisasi Anggaran pada tahun ke -				Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada tahun ke -				Rata - rata pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI.</b>															
<b>Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah.</b>	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah.	6.484.198,00	5.750.000,00	15.750.000,00	15.750.000,00	6.360.800,00	5.542.200,00	15.744.300,00	15.729.350,00	98,10%	96,39%	99,96%	99,87%	10.933.549,50	10.844.162,50
	Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD.	-	-	19.326.500,00	19.146.500,00	-	-	19.311.100,00	19.107.000,00	-	-	99,92%	99,79%	19.236.500,00	19.209.050,00
	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD.	19.236.500,00	9.326.500,00	-	-	18.521.500,00	8.243.900,00	-	-	96,28%	88,39%	-	-	14.281.500,00	13.382.700,00
	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD.	-	11.370.340,00	21.370.340,00	37.125.135,00	-	10.861.100,00	21.128.500,00	36.582.250,00	-	95,52%	98,87%	98,54%	23.288.605,00	22.857.283,33
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.	-	3.435.500,00	3.435.500,00	10.284.783,00	-	3.423.500,00	3.404.400,00	10.259.250,00	-	99,65%	99,09%	99,75%	5.718.594,33	5.695.716,67



	Evaluasi kinerja perangkat daerah.	16.956.350,00	220.989.450,00	1.594.566.539,0 0	7.901.450.079,0 0	15.406.000,00	220.097.000,00	1.574.036.538,0 0	7.786.232.716,0 0	90,86%	99,60%	98,71%	98,54%	2.433.490.604,5 0	2.398.943.063,5 0
<b>Administrasi keuangan perangkat daerah.</b>	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN.	6.172.421.762,0 0	6.354.841.358,0 0	6.370.003.930,0 0	7.079.421.638,0 0	5.219.078.924,0 0	5.453.313.139,0 0	5.309.622.600,0 0	6.423.285.392,0 0	84,55%	85,81%	83,35%	90,73%	6.494.172.172,0 0	5.601.325.013,7 5
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD.	-	4.446.000,00	29.446.000,00	34.854.600,00	-	4.408.000,00	29.440.550,00	34.780.308,00	-	99,15%	99,98%	99,79%	22.915.533,33	22.876.286,00
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD.	10.881.400,00	6.348.000,00	11.348.000,00	13.499.985,00	10.853.400,00	6.315.000,00	11.088.400,00	13.369.150,00	99,74%	99,48%	97,71%	99,03%	10.519.346,25	10.406.487,50
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD.	5.714.600,00	3.559.250,00	8.559.250,00	9.999.876,00	5.711.600,00	3.558.200,00	8.438.800,00	9.970.850,00	99,95%	99,97%	98,59%	99,71%	6.958.244,00	6.919.862,50
<b>Administrasi BMD pada perangkat daerah.</b>	Penyusunan perencanaan kebutuhan BMD SKPD.	-	4.574.500,00	9.574.500,00	9.767.099,00	-	4.536.500,00	9.566.700,00	9.715.100,00	-	99,17%	99,92%	99,47%	7.972.033,00	7.939.433,33
	Pengamanan BMD SKPD.	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	40.000.000,00	19.015.500,00	19.940.626,00	19.992.969,00	39.997.659,00	95,08%	99,70%	99,96%	99,99%	25.000.000,00	24.736.688,50
	Penatausahaan BMD pada SKPD.	8.878.500,00	5.955.000,00	5.955.000,00	8.345.148,00	8.874.400,00	5.953.000,00	5.921.150,00	8.255.500,00	99,95%	99,97%	99,43%	98,93%	7.283.412,00	7.251.012,50



<b>Administrasi kepegawaian perangkat daerah.</b>	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian.	-	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	-	7.975.000,00	6.503.900,00	7.933.750,00	-	99,69%	81,30%	99,17%	8.000.000,00	7.470.883,33
	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tusi.	-	30.000.000,00	110.000.000,00	287.691.906,00	-	29.440.000,00	108.091.622,00	283.420.888,00	-	98,13%	98,27%	98,52%	142.563.968,67	140.317.503,33
	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya.	-	-	175.425.000,00	509.167.500,00	-	-	175.425.000,00	507.115.500,00	-	-	100,00%	99,60%	228.197.500,00	227.513.500,00
	Sosialisasi peraturan perundang - undangan.	180.193.180,00	-	-	-	103.913.191,00	-	-	-	-	57,67%	-	-	180.193.180,00	103.913.191,00
	Bimtek implementasi peraturan perundang - undangan.	64.500.000,00	60.000.000,00	104.000.000,00	475.029.000,00	61.900.000,00	60.000.000,00	95.520.000,00	455.595.140,00	95,97%	100,00%	91,85%	95,91%	175.882.250,00	168.253.785,00
<b>Administrasi umum perangkat daerah.</b>	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor.	20.000.000,00	20.000.000,00	110.000.000,00	250.015.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	109.900.000,00	249.350.000,00	100,00%	100,00%	99,91%	99,73%	100.003.750,00	99.812.500,00
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.	145.791.427,00	56.835.000,00	451.835.000,00	712.325.000,00	145.207.000,00	55.705.000,00	450.047.500,00	710.491.800,00	99,60%	98,01%	99,60%	99,74%	341.696.606,75	340.362.825,00
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.	52.497.000,00	36.000.000,00	76.000.000,00	66.000.000,00	52.497.000,00	36.000.000,00	75.956.981,00	65.998.675,00	100,00%	100,00%	99,94%	100,00%	57.624.250,00	57.613.164,00



	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.	33.378.240,00	28.538.607,00	148.538.607,00	500.000,00	32.855.000,00	28.060.000,00	146.180.000,00	500.000,00	98,43%	98,32%	98,41%	100,00%	52.738.863,50	51.898.750,00
	Fasilitasi kunjungan tamu	94.500.000,00	105.000.000,00	203.412.000,00	355.000.000,00	94.500.000,00	104.998.400,00	203.152.000,00	354.994.250,00	100,00%	100,00%	99,87%	100,00%	189.478.000,00	189.411.162,50
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.	485.029.094,00	661.967.096,00	944.915.295,00	794.915.295,00	484.621.589,00	661.292.592,00	944.491.462,00	780.274.820,00	99,92%	99,90%	99,96%	98,16%	721.706.695,00	717.670.115,75
	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD.	-	-	-	1.082.975.078,00	-	-	-	1.027.838.459,00	-	-	-	94,91%	1.082.975.078,00	1.027.838.459,00
<b>Pengadaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah.</b>	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya.	-	248.900.000,00	480.505.000,00	189.173.000,00	-	241.773.050,00	478.471.750,00	185.486.500,00	-	97,14%	99,58%	98,05%	306.192.666,67	301.910.433,33
	Pengadaan gedung kantor/bangunan lainnya.	-	-	250.000.000,00	600.000.000,00	-	-	248.240.230,00	592.142.920,43	-	-	99,30%	98,69%	425.000.000,00	420.191.575,22
	Pengadaan mebel	-	-	571.145.000,00	420.500.000,00	-	-	567.322.000,00	417.629.750,00	-	-	99,33%	99,32%	495.822.500,00	492.475.875,00
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya.	-	-	3.149.500.000,00	687.500.000,00	-	-	3.127.506.500,00	679.512.500,00	-	-	99,30%	98,84%	1.918.500.000,00	1.903.509.500,00



	Pengadaan kendaraan dinas operasional/ lapangan.	529.000.000,00	-	526.588.000,00	2.179.618.393,00	504.510.000,00	-	514.300.000,00	2.068.898.000,00	95,37%	-	97,67%	94,92%	1.078.402.131,00	1.029.236.000,00
<b>Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.</b>	Penyediaan jasa surat menyurat.	8.519.700,00	7.170.000,00	14.170.000,00	29.120.000,00	8.444.000,00	6.090.000,00	14.058.600,00	29.090.000,00	99,11%	84,94%	99,21%	99,90%	14.744.925,00	14.420.650,00
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	232.360.634,00	321.625.887,00	642.983.728,00	634.687.077,00	186.689.196,00	295.827.909,00	515.660.032,00	414.446.473,00	80,34%	91,98%	80,20%	65,30%	457.914.331,50	353.155.902,50
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor.	1.461.112.750,00	1.456.591.144,00	1.127.551.300,00	1.937.295.964,00	1.303.111.600,00	715.546.764,00	1.124.294.200,00	1.898.360.916,00	89,19%	49,12%	99,71%	97,99%	1.495.637.789,50	1.260.328.370,00
<b>Pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah.</b>	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional/ lapangan.	198.160.000,00	252.502.000,00	657.940.000,00	479.136.400,00	186.401.665,00	250.746.506,00	595.070.422,00	392.634.077,00	94,07%	99,30%	90,44%	81,95%	396.934.600,00	356.213.167,50
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.	15.000.000,00	24.000.000,00	85.000.000,00	60.000.000,00	15.000.000,00	23.640.000,00	84.968.500,00	60.000.000,00	100,00%	98,50%	99,96%	100,00%	46.000.000,00	45.902.125,00
	Pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.	28.140.000,00	110.000.000,00	2.813.000.000,00	460.012.094,00	27.966.000,00	109.963.500,00	2.777.168.597,00	460.010.353,13	99,38%	99,97%	98,73%	100,00%	852.788.023,50	843.777.112,53
	Pemeliharaan rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/ bangunan	20.000.000,00	29.000.000,00	110.268.716,00	80.000.000,00	20.000.000,00	25.830.000,00	109.713.000,00	80.000.000,00	100,00%	89,07%	99,50%	100,00%	59.817.179,00	58.885.750,00



	lainnya.														
<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA.</b>															
<b>Fasilitasi kerja sama antar desa yang menjadi kewenangan provinsi.</b>	Fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan.	80.263.500,00	55.034.850,00	233.856.221,00	381.248.000,00	79.095.000,00	54.611.800,00	233.192.607,00	380.743.045,00	98,54%	99,23%	99,72%	99,87%	187.600.642,75	186.910.613,00
	Fasilitasi kerja sama desa dengan pihak ketiga.	-	-	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	64.638.500,00	95.948.081,00	-	-	64,64%	95,95%	100.000.000,00	80.293.290,50
<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA.</b>															
<b>Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa.</b>	Fasilitasi penyusunan perda kabupaten/ kota dan peraturan bupati/walikota yang mengatur desa.	69.411.300,00	100.000.000,00	100.000.000,00	109.200.000,00	58.951.539,00	98.395.500,00	78.012.000,00	102.620.500,00	84,93%	98,40%	78,01%	93,97%	94.652.825,00	84.494.884,75
	Fasilitasi pengelolaan aset desa.	-	-	394.490.400,00	585.000.000,00	-	-	375.592.289,00	569.387.000,00	-	-	95,21%	97,33%	489.745.200,00	472.489.644,50
	Fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.	-	-	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	20.842.000,00	24.956.300,00	-	-	83,37%	99,83%	25.000.000,00	22.899.150,00
	Pembinaan manajemen pemerintahan desa.	-	103.520.210,00	-	873.613.000,00	-	102.284.989,00	-	870.620.444,00	-	98,81%	-	99,66%	488.566.605,00	486.452.716,50
	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa.	229.493.948,00	197.245.200,00	-	480.000.000,00	215.690.200,00	192.832.500,00	-	468.637.000,00	93,99%	97,76%	-	97,63%	302.246.382,67	292.386.566,67



	Fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomdeskel.	114.699.833,00	167.015.922,00	2.869.290.772,0 0	1.893.303.553,0 0	113.970.525,00	166.949.700,00	2.697.392.751,0 0	1.780.048.048,0 0	99,36%	99,96%	94,01%	94,02%	1.261.077.520,0 0	1.189.590.256,0 0
	Fasilitasi pelaksanaan profil desa dan kelurahan.	-	-	200.000.000,00	250.000.000,00	-	-	138.793.250,00	236.442.372,00	-	-	69,40%	94,58%	225.000.000,00	187.617.811,00
	Pembinaan aparatur pemerintah desa.	-	3.595.115.000,0 0	3.214.865.286,0 0	3.754.231.631,0 0	-	2.669.559.300,0 0	2.770.865.702,0 0	1.661.315.683,0 0	-	74,26%	86,19%	44,25%	3.521.403.972,3 3	2.367.246.895,0 0
	Pembinaan peningkatan kapasitas anggota BPD.	-	141.445.000,00	166.445.000,00	73.289.000,00	-	141.425.100,00	164.695.900,00	66.080.445,00	-	99,99%	98,95%	90,16%	127.059.666,67	124.067.148,33
	Pembinaan dan pengawasan penetapan pengaturan BUMDes kabupaten/kota dan lembaga kerjasama antar desa.	-	64.327.500,00	540.460.000,00	1.358.628.929,0 0	-	62.587.000,00	532.080.820,00	1.351.889.256,0 0	-	97,29%	98,45%	99,50%	654.472.143,00	648.852.358,67
	Fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa.	-	170.000.000,00	653.520.210,00	500.000.000,00	-	168.701.500,00	639.943.954,00	455.295.015,00	-	99,24%	97,92%	91,06%	441.173.403,33	421.313.489,67

**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT.**

<b>Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan</b>	Fasilitasi penataan pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan	57.022.100,00	116.943.160,00	3.527.423.600,0 0	13.650.020.000,0 00	56.794.997,00	116.937.000,00	3.507.581.960,0 0	12.629.125.868,0 00	99,60%	99,99%	99,44%	92,52%	4.337.852.215,0 0	4.077.609.956,2 5
---	--	---------------	----------------	----------------------	------------------------	---------------	----------------	----------------------	------------------------	--------	--------	--------	--------	----------------------	----------------------



<b>desa dan lembaga adat tingkat daerah provinsi serta pemberdayaan masyarakatan hukum adat yang masyarakat pelaksana hukum adat yang sama berada di lintas daerah kabupaten/kota.</b>	karang taruna), lembaga adat desa kelurahan dan masyarakat hukum adat.														
	Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan karang taruna), lembaga adat desa kelurahan dan masyarakat hukum adat.	91.551.020,00	74.350.320,00	2.274.350.320,0 0	2.324.350.320,0 0	70.706.000,00	71.923.300,00	1.867.342.893,0 0	2.162.830.582,0 0	77,23%	96,74%	82,10%	93,05%	1.191.150.495,0 0	1.043.200.693,7 5
	Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan PADes.	307.215.992,00	427.844.798,00	1.234.212.298,0 0	320.175.000,00	257.901.800,00	411.508.600,00	1.163.593.632,0 0	316.536.519,00	83,95%	96,18%	94,28%	98,86%	572.362.022,00	537.385.137,75
	Fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan TTG.	76.552.200,00	128.514.250,00	874.000.000,00	545.108.000,00	75.790.900,00	128.429.200,00	851.326.848,00	543.775.500,00	99,01%	99,93%	97,41%	99,76%	406.043.612,50	399.830.612,00
	Fasilitasi BBGRM.	33.075.000,00	-	-	-	32.966.000,00	-	-	-	99,67%	-	-	-	33.075.000,00	32.966.000,00
	Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat desa.	1.990.000,00	55.034.750,00	874.034.750,00	462.775.631,00	1.990.000,00	55.034.600,00	858.706.808,00	461.588.200,00	100,00 %	100,00 %	98,25%	99,74%	348.458.782,75	344.329.902,00
Fasilitasi TP PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan	2.000.000.000,0 0	2.000.000.000,0 0	1.000.000.000,0 0	3.000.000.000,0 0	1.882.657.903,0 0	1.999.793.581,0 0	1.000.000.000,0 0	3.000.000.000,0 0	94,13%	99,99%	100,00 %	100,00 %	2.000.000.000,0 0	1.970.612.871,0 0	



	masyarakat dan kesejahteraan keluarga.														
<b>Total</b>		<b>12.890.030.228,</b> <b>00</b>	<b>17.503.116.592,</b> <b>00</b>	<b>39.152.062.062,</b> <b>00</b>	<b>58.164.249.614,</b> <b>00</b>	<b>11.397.953.229,</b> <b>00</b>	<b>14.860.054.556,</b> <b>00</b>	<b>36.464.340.217,</b> <b>00</b>	<b>53.306.849.154,</b> <b>56</b>	<b>88,42</b> <b>%</b>	<b>84,90</b> <b>%</b>	<b>93,14</b> <b>%</b>	<b>91,65</b> <b>%</b>	<b>31.927.364.624,</b> <b>00</b>	<b>29.007.299.289,</b> <b>14</b>

Sumber : Subbag. Keuangan dan Aset Dinas PMD Prov. Kalteng



#### 2.1.4 KELOMPOK SASARAN LAYANAN

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah yang melaksanakan kewenangan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dalam hal mengatur dan mengurus urusan pemerintahan desa, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat yang dimiliki desa dengan hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar – besarnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa, dengan mengembangkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

## 2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dalam menjalankan tugas dan fungsi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, tentu saja akan menghadapi beberapa permasalahan atau tantangan dan isu – isu strategis yang bisa menjadi hambatan dan atau sekaligus peluang



dalam menunaikan tugas dan fungsi yang diembankan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah.

Adapun permasalahan dan isu strategis yang dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut :

### 2.2.1 *PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH*

Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari 13 kabupaten, 1 kota, 136 kecamatan, 139 kelurahan dan 1432 desa dengan luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 153.430,36 km<sup>2</sup>. Dimana menurut KEPMENDES Nomor 400 tahun 2024 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2024, Provinsi Kalimantan Tengah masih memiliki 86 desa dengan status desa tertinggal. Dikatakan sebagai desa tertinggal adalah desa yang secara umum memiliki kondisi sosial, ekonomi dan infrastruktur yang kurang berkembang serta memiliki keterbatasan dalam akses terhadap pelayanan dasar dan keterampilan masyarakat umumnya rendah. Hal tersebut menjadi salah satu tantangan yang harus segera dikerjakan bersama agar tidak ada lagi terdapat desa tertinggal di Provinsi Kalimantan Tengah.



Tabel 2.6 Rekapitulasi Perkembangan Status Desa Tahun 2018 – 2024

Tahun	Status Desa					Desa Baru	Jumlah
	Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal		
2018	2	44	369	674	306	-	1395
2019	8	84	569	609	162	1	1433
2020	20	152	672	522	67	-	1433
2021	55	262	737	361	18	-	1433
2022	87	348	766	229	3	-	1433
2023	194	391	704	143	0	-	1432
2024	248	439	659	86	0	-	1432

Tabel 2.7 Persentase Perkembangan Status Desa Tahun 2018 – 2024

Tahun	Status Desa					Desa Baru
	Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal	
2018	0,14%	3,15%	26,45%	48,32%	21,94%	-
2019	0,56%	5,86%	39,71%	42,50%	11,30%	1
2020	1,40%	10,61%	46,89%	36,43%	4,68%	-
2021	3,84%	18,28%	51,43%	25,19%	1,26%	-
2022	6,07%	24,28%	53,45%	15,98%	0,21%	-
2023	13,55%	27,30%	49,16%	9,99%	0,00%	-
2024	17,32%	30,66%	46,02%	6,01%	0,00%	-

Perhitungan persentase menggunakan jumlah desa pada status desa dengan jumlah keseluruhan pada tahun perhitungan. Terlihat dalam kurun waktu lima tahun terakhir, jumlah desa mandiri yang semula hanya dua desa menjadi 248 desa yang meningkat dari angka kurang dari satu persen menjadi 17,32%, hal tersebut menunjukkan adanya komitmen untuk peningkatan pembangunan desa dari



berbagai aspek terutama pada bidang pendidikan; bidang kesehatan; bidang pekerjaan umum; bidang perumahan rakyat; bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan bidang sosial.

Tabel 2.8 Rekapitulasi Perkembangan Status Kabupaten Tahun 2018 – 2024

No	Kabupaten	Tahun						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	KOTAWARINGIN BARAT	BERKEMBANG	BERKEMBANG	MAJU	MAJU	MANDIRI	MANDIRI	MANDIRI
2	BARITO TIMUR	BERKEMBANG	BERKEMBANG	BERKEMBANG	BERKEMBANG	BERKEMBANG	BERKEMBANG	MAJU
3	LAMANDAU	BERKEMBANG	BERKEMBANG	BERKEMBANG	BERKEMBANG	MAJU	MAJU	MAJU
4	PULANG PISAU	TERTINGGAL	BERKEMBANG	BERKEMBANG	BERKEMBANG	BERKEMBANG	MAJU	MAJU
5	SUKAMARA	TERTINGGAL	BERKEMBANG	BERKEMBANG	MAJU	MAJU	MAJU	MAJU
6	SERUYAN	TERTINGGAL	TERTINGGAL	BERKEMBANG	BERKEMBANG	BERKEMBANG	BERKEMBANG	MAJU
7	BARITO SELATAN	TERTINGGAL	BERKEMBANG	BERKEMBANG	BERKEMBANG	BERKEMBANG	BERKEMBANG	MAJU
8	KAPUAS	TERTINGGAL	TERTINGGAL	TERTINGGAL	BERKEMBANG	BERKEMBANG	BERKEMBANG	BERKEMBANG
9	KOTAWARINGIN TIMUR	TERTINGGAL	TERTINGGAL	TERTINGGAL	BERKEMBANG	BERKEMBANG	MAJU	MAJU
10	GUNUNG MAS	TERTINGGAL	TERTINGGAL	BERKEMBANG	BERKEMBANG	BERKEMBANG	BERKEMBANG	BERKEMBANG
11	BARITO UTARA	TERTINGGAL	TERTINGGAL	BERKEMBANG	BERKEMBANG	BERKEMBANG	MAJU	MAJU
12	KATINGAN	TERTINGGAL	TERTINGGAL	TERTINGGAL	BERKEMBANG	BERKEMBANG	BERKEMBANG	BERKEMBANG
13	MURUNG RAYA	SANGAT TERTINGGAL	TERTINGGAL	TERTINGGAL	TERTINGGAL	BERKEMBANG	BERKEMBANG	BERKEMBANG

Sumber : Indeks Desa Membangun dari Kemendes PDTT tahun 2018 - 2024.

Tabel 2.9 Persentase Status Desa Per Kabupaten pada Tahun 2023 – 2024

DATA TAHUN 2023

No	Kabupaten	MANDIRI		MAJU		BERKEMBANG		TERTINGGAL		SANGAT TERTINGGAL		TOTAL
		Jumlah Desa	%	Jumlah Desa	%	Jumlah Desa	%	Jumlah Desa	%	Jumlah Desa	%	
1	KOTAWARINGIN BARAT	39	48,15	41	50,62	1	1,23	0	0,00	0	0,00	81
2	BARITO TIMUR	4	4,00	29	29,00	66	66,00	1	1,00	0	0,00	100
3	LAMANDAU	20	23,53	39	45,88	26	30,59	0	0,00	0	0,00	85
4	PULANG PISAU	0	0,00	59	62,11	34	35,79	2	2,11	0	0,00	95
5	SUKAMARA	10	34,48	9	31,03	10	34,48	0	0,00	0	0,00	29
6	SERUYAN	17	17,53	19	19,59	53	54,64	8	8,25	0	0,00	97
7	BARITO SELATAN	3	3,49	26	30,23	56	65,12	1	1,16	0	0,00	86
8	KAPUAS	8	3,74	35	16,36	125	58,41	46	21,50	0	0,00	214
9	KOTAWARINGIN TIMUR	70	41,67	44	26,19	54	32,14	0	0,00	0	0,00	168
10	GUNUNG MAS	1	0,88	25	21,93	63	55,26	25	21,93	0	0,00	114
11	BARITO UTARA	14	15,05	35	37,63	41	44,09	3	3,23	0	0,00	93
12	KATINGAN	7	4,55	23	14,94	92	59,74	32	20,78	0	0,00	154
13	MURUNG RAYA	1	0,86	7	6,03	83	71,55	25	21,55	0	0,00	116
<b>TOTAL</b>		<b>194</b>	<b>13,55</b>	<b>391</b>	<b>27,30</b>	<b>704</b>	<b>49,16</b>	<b>143</b>	<b>9,99</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1432</b>



DATA TAHUN 2024

No	Status Desa Kabupaten	MANDIRI		MAJU		BERKEMBANG		TERTINGGAL		SANGAT TERTINGGAL		TOTAL
		Jumlah Desa	%	Jumlah Desa	%	Jumlah Desa	%	Jumlah Desa	%	Jumlah Desa	%	
1	KOTAWARINGIN BARAT	46	56,79	35	43,21	0	0,00	0	0,00	0	0,00	81
2	BARITO TIMUR	5	5,00	48	48,00	46	46,00	1	1,00	0	0,00	100
3	LAMANDAU	26	30,59	41	48,24	18	21,18	0	0,00	0	0,00	85
4	PULANG PISAU	9	9,47	59	62,11	27	28,42	0	0,00	0	0,00	95
5	SUKAMARA	11	37,93	8	27,59	10	34,48	0	0,00	0	0,00	29
6	SERUYAN	21	21,65	19	19,59	57	58,76	0	0,00	0	0,00	97
7	BARITO SELATAN	8	9,30	30	34,88	48	55,81	0	0,00	0	0,00	86
8	KAPUAS	11	5,14	60	28,04	122	57,01	21	9,81	0	0,00	214
9	KOTAWARINGIN TIMUR	71	42,26	44	26,19	53	31,55	0	0,00	0	0,00	168
10	GUNUNG MAS	4	3,51	27	23,68	62	54,39	21	18,42	0	0,00	114
11	BARITO UTARA	27	29,03	28	30,11	35	37,63	3	3,23	0	0,00	93
12	KATINGAN	8	5,19	28	18,18	93	60,39	25	16,23	0	0,00	154
13	MURUNG RAYA	1	0,86	12	10,34	88	75,86	15	12,93	0	0,00	116
<b>TOTAL</b>		<b>248</b>	<b>17,32</b>	<b>439</b>	<b>30,66</b>	<b>659</b>	<b>46,02</b>	<b>86</b>	<b>6,01</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1432</b>

Sumber : Indeks Desa Membangun dari Kemendes PDTT tahun 2023 - 2024.

Hal tersebut juga terlihat dengan adanya perubahan status kabupaten yang berbanding lurus dengan bertambahnya jumlah desa mandiri pada kabupaten tersebut. Tahun perbandingan yang diperhitungkan adalah tahun 2023 - 2024 dikarenakan memiliki jumlah desa yang sama sedangkan untuk tahun sebelumnya terdapat perbedaan jumlah desa.

Dan juga keaktifan dari lembaga desa yang diampu dalam urusan pemberdayaan masyarakat desa yang cenderung bervariasi, sehingga diharapkan tidak hanya terbentuk saja melainkan aktif dan turut berpartisipasi mendorong kemajuan dan kemandirian desa.



Tabel 2.10 Lembaga Desa Aktif per Kabupaten pada Tahun 2023 – 2024

Kabupaten	Lembaga		Posyandu Aktif		Posyantek Aktif		PKK Aktif		BUMDes Aktif	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
BARITO SELATAN	173	174	-	-	99	99	60	34		
BARITO TIMUR	132	132	-	-	113	113	94	86		
BARITO UTARA	74	137	-	-	112	112	47	53		
GUNUNG MAS	131	131	8	8	139	139	29	59		
KAPUAS	163	186	24	25	249	251	213	169		
KATINGAN	204	204	-	-	175	175	70	60		
KOTAWARINGIN BARAT	48	147	7	7	101	101	77	76		
KOTAWARINGIN TIMUR	295	295	-	-	199	210	151	76		
LAMANDAU	98	98	-	-	103	96	60	66		
MURUNG RAYA	226	226	-	-	136	136	74	76		
PULANG PISAU	168	123	28	28	104	107	46	82		
SERUYAN	181	170	1	1	110	110	54	64		
SUKAMARA	42	52	-	-	37	37	23	17		
KOTA PALANGKA RAYA	154	130	-	-	35	35	-	-		
<b>Jumlah</b>	<b>2089</b>	<b>2205</b>	<b>68</b>	<b>69</b>	<b>1712</b>	<b>1721</b>	<b>998</b>	<b>918</b>		
<b>Persentase</b>	<b>5,26%</b>		<b>1,45%</b>		<b>0,52%</b>		<b>-8,71%</b>			

Untuk nilai negatif pada persentase BUMDes aktif dikarenakan adanya permasalahan internal dan eksternal dari pengurus BUMDes sehingga mengakibatkan BUMDes yang semula aktif menjadi tidak aktif. Kepengurusan lembaga desa pun menjadi salah satu penentu keaktifan lembaga desa.

Dengan segala hal tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah menyadari masih adanya keterbatasan kapasitas aparatur desa dalam pemanfaatan teknologi informasi dan masih adanya *blankspot* di desa sehingga dalam melakukan pelayanan desa berbasis digital yang harus dilakukan oleh aparatur desa tidak dapat maksimal (siskeudes (data keuangan desa), siapdes (data administrasi desa), sipades (data aset desa) dan



aplikasi lainnya yang mendukung pelayanan berbasis digital). Serta lembaga desa yang masih perlu ditingkatkan kapasitasnya dalam menunjang kebermanfaatan dan peningkatan pembangunan desa baik dari sisi ekonomi, sosial, kesehatan, budaya, pendidikan dan infrastruktur. Selain itu, masih rendahnya daya saing masyarakat dalam berinovasi dengan memanfaatkan sumber daya alam dan atau mengembangkan teknologi tepat guna yang dapat mendorong kerja sama antara sektor pemerintah desa dan swasta untuk mendukung pembangunan daerahnya.

### *2.2.2 ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH*

Isu pembangunan berkelanjutan prioritas dapat menjadi acuan yang penting untuk diperhatikan dalam pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah, dimana saling berkaitan antara isu global, isu nasional dan isu regional.



Tabel 2.11 Isu Strategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Persentase desa mandiri dalam indeks desa membangun menunjukkan tren yang positif.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kapasitas aparatur desa masih terbatas;</li> <li>Rendahnya kemampuan aparatur desa dalam penggunaan IT;</li> <li>Rendahnya pengembangan usaha mikro di desa;</li> <li>Masih adanya desa tertinggal;</li> <li>Akses desa yang sulit dijangkau;</li> <li>Kualitas jaringan internet belum optimal.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Deforestasi dan degradasi hutan di dalam dan di luar kawasan hutan.</li> <li>Kerusakan habitat (tempat hidup tumbuhan dan satwa liar) akibat fragmentasi habitat dan penurunan tutupan lahan.</li> <li>Kebakaran hutan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Cuaca ekstrem.</li> <li>Perubahan kritis terhadap ekosistem.</li> <li>Biodiversitas loss dan gangguan ekosistem.</li> <li>Krisis sumber daya alam.</li> <li>Misinformasi dan disinformasi.</li> <li>Dampak buruk teknologi AI.</li> <li>Involuntary migration.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Rendahnya produktivitas.</li> <li>Rendahnya kualitas sumber daya manusia.</li> <li>Pergeseran struktur kelas masyarakat.</li> <li>Kebutuhan hidup tinggi pada usia produktif.</li> <li>Krisis lingkungan.</li> <li>Geopolitik dan geoekonomi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kalimantan Tengah sebagai Pusat Pangan Nasional, Pusat Konservasi Internasional dan hilirisasi SDA.</li> <li>Infrastruktur belum memadai.</li> <li>Luas wilayah dan aksesibilitas.</li> <li>Ketergantungan pada sektor primer.</li> <li>Pengelolaan lingkungan dan deforestasi.</li> </ol>	Belum optimalnya pembangunan daerah pedalaman dan tertinggal serta ketimpangan pembangunan antar zona pembangunan.



		dan lahan gambut.	8. Cyber insecurity.	7. Tata kelola dan akuntabilitas pemerintah.	6. Kesiapan Kalimantan Tengah menyongsong IKN.	
		4. Banjir, kekeringan dan longsor akibat degradasi lahan.	9. Polarisasi sosial.		7. Urbanisasi dan pemukiman kumuh.	
		5. Penurunan kualitas air akibat rusaknya fungsi daerah tangkapan air.	10. Polusi.		8. SDM yang berdayasaing.	
		6. Hilangnya cadangan sumber daya alam akibat hilangnya hutan.			9. Ketimpangan wilayah dan kesejahteraan.	

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.



Adapun hambatan dalam proses pembangunan desa dan masih adanya desa tertinggal merupakan kendala yang menjadi isu strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah yang memerlukan perbaikan signifikan dalam aspek – aspek pembangunan desa yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat desa di Kalimantan Tengah seperti belum optimalnya pendayagunaan aparatur desa, masih adanya akses desa yang sulit dijangkau, masih rendahnya kesadaran masyarakat desa dalam pemanfaatan sumber daya alam melalui penggunaan teknologi tepat guna, masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengembangan usaha mikro di desa yang dikarenakan masih rendahnya kemampuan masyarakat maupun aparatur desa dalam penggunaan IT untuk mempromosikan usahanya serta masih belum optimalnya kualitas jaringan internet di desa. Serta belum optimalnya pembangunan daerah pedalaman dan tertinggal serta ketimpangan pembangunan antar zona pembangunan.

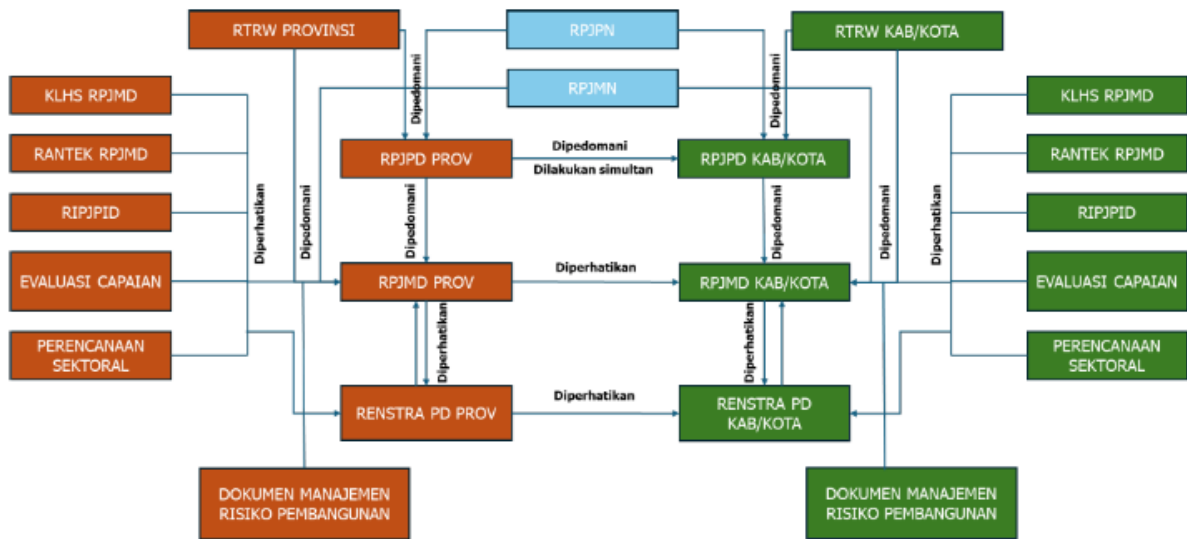


## **BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

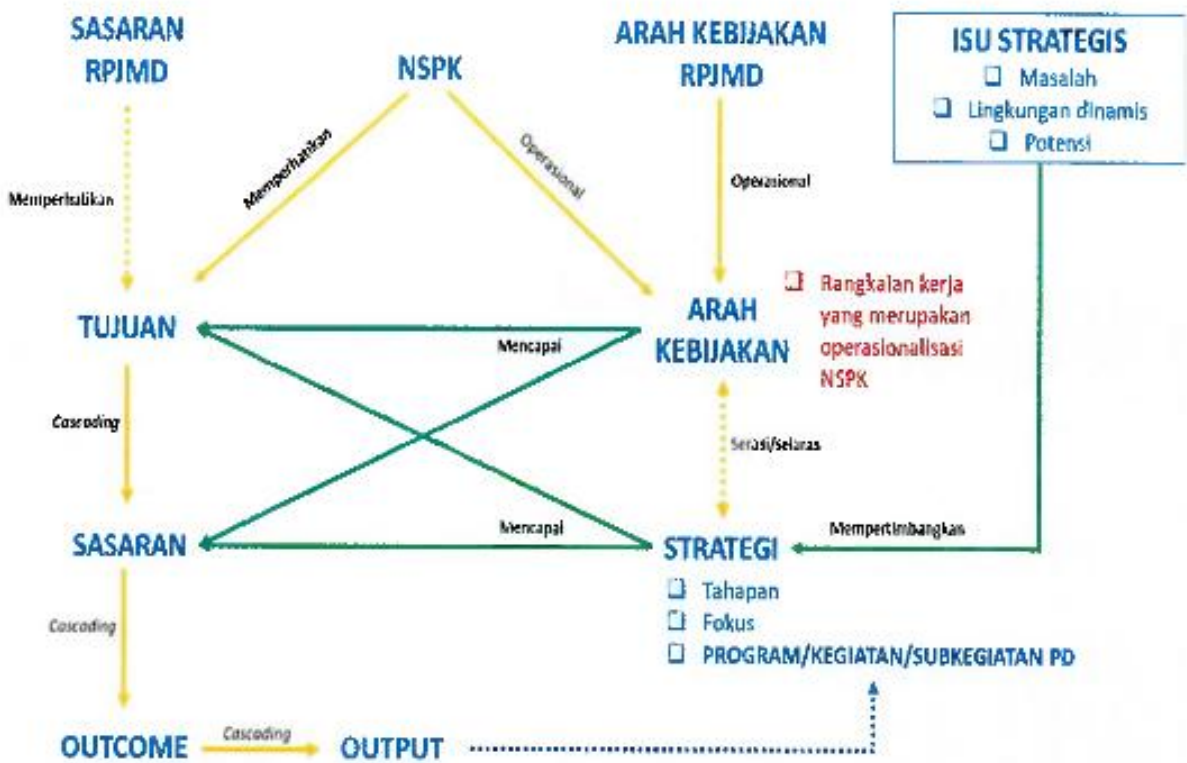
Salah satu proses penting dalam pembangunan adalah perencanaan, dimana proses tersebut terdiri dari perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Sesuai dengan Undang – Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa setiap daerah untuk Menyusun rencana pembangunan jangka tersebut secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan.

Dimana dalam prosesnya, dokumen RPJMD telah memuat substansi penting berkaitan dengan upaya pembangunan jangka menengah di Provinsi Kalimantan Tengah, yang juga kemudian disinkronisasi dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lainnya, termasuk dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025 – 2029. Selanjutnya hal ini akan menjadi pedoman bagi perangkat daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah tahun 2025 – 2029 yang memuat tujuan, sasaran dan program kerja di urusan wajib dan urusan pilihan pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Tengah.



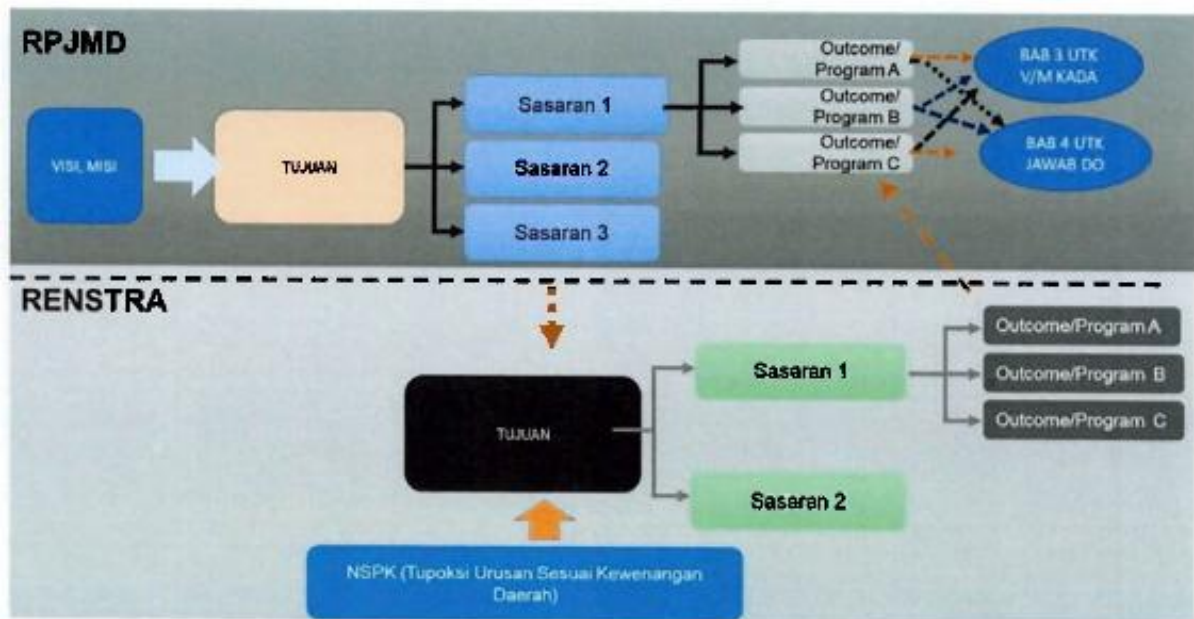


Gambar 3.1 Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan Pembangunan



Gambar 3.2 Konsep Renstra Perangkat Daerah





Gambar 3.3 Kerangka keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah

Terdapat beberapa hal yang relevan sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMN Tahun 2025 – 2029, secara umum Pemerintah Pusat mencanangkan delapan prioritas nasional yang merupakan hasil pengejawantahan dari asta cita misi Presiden dan Wakil Presiden periode 2024 – 2029, yaitu :

Tabel 3.1 Delapan Prioritas Nasional dalam RPJMN periode 2025 – 2029

Urutan	Deskripsi
Prioritas 1	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM).



Prioritas 2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
Prioritas 3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
Prioritas 4	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
Prioritas 5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
Prioritas 6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
Prioritas 7	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.



Prioritas 8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.
-------------	---

Di samping itu, hal ini telah membuka periode pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah berikutnya, periode 2025 – 2029, seiring dengan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur hasil Pilkada serentak tahun 2024 yang dilantik pada tanggal 20 Februari 2025. Adapun visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah periode 2025 – 2029 adalah

**”MENGANGKAT HARKAT DAN MARTABAT KHUSUSNYA MASYARAKAT DAYAK DAN MASYARAKAT KALIMANTAN TENGAH UMUMNYA (MANGGATANG UTUS), DENGAN KEARIFAN LOKAL DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENUJU KALTENG MAJU, MODERN, BERMARTABAT, DAN BERKAH, MENUJU INDONESIA EMAS 2045”**

Dimana berdasarkan penurunan visi Gubernur dan Wakil Gubernur serta tetap mengacu pada misi RPJMN periode 2025 – 2029 atau Asta Cita yang tertuang dalam Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2025 terdapat misi Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai berikut yang disusun sebagai arah dan batasan pembangunan yang akan dilakukan.



Tabel 3.2 Lima Misi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2025 - 2029

Urutan	Deskripsi
Misi 1	Meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pemanfaatan sumber daya alam lokal.
Misi 2	Peningkatan pendidikan untuk sumber daya manusia yang beretika melalui pendidikan inklusif dengan kaidah <i>BELOM BAHADAT</i> .
Misi 3	Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis lingkungan.
Misi 4	Menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat sebagai keadilan sosial.
Misi 5	Pemberdayaan kearifan lokal dalam kebijakan dan program pemerintah untuk mewujudkan visi Indonesia Maju 2045.

Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang selaras dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) yang membidangi urusan pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal berada pada Asta Cita ke enam, yaitu "Membangun Dari Desa dan Dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan

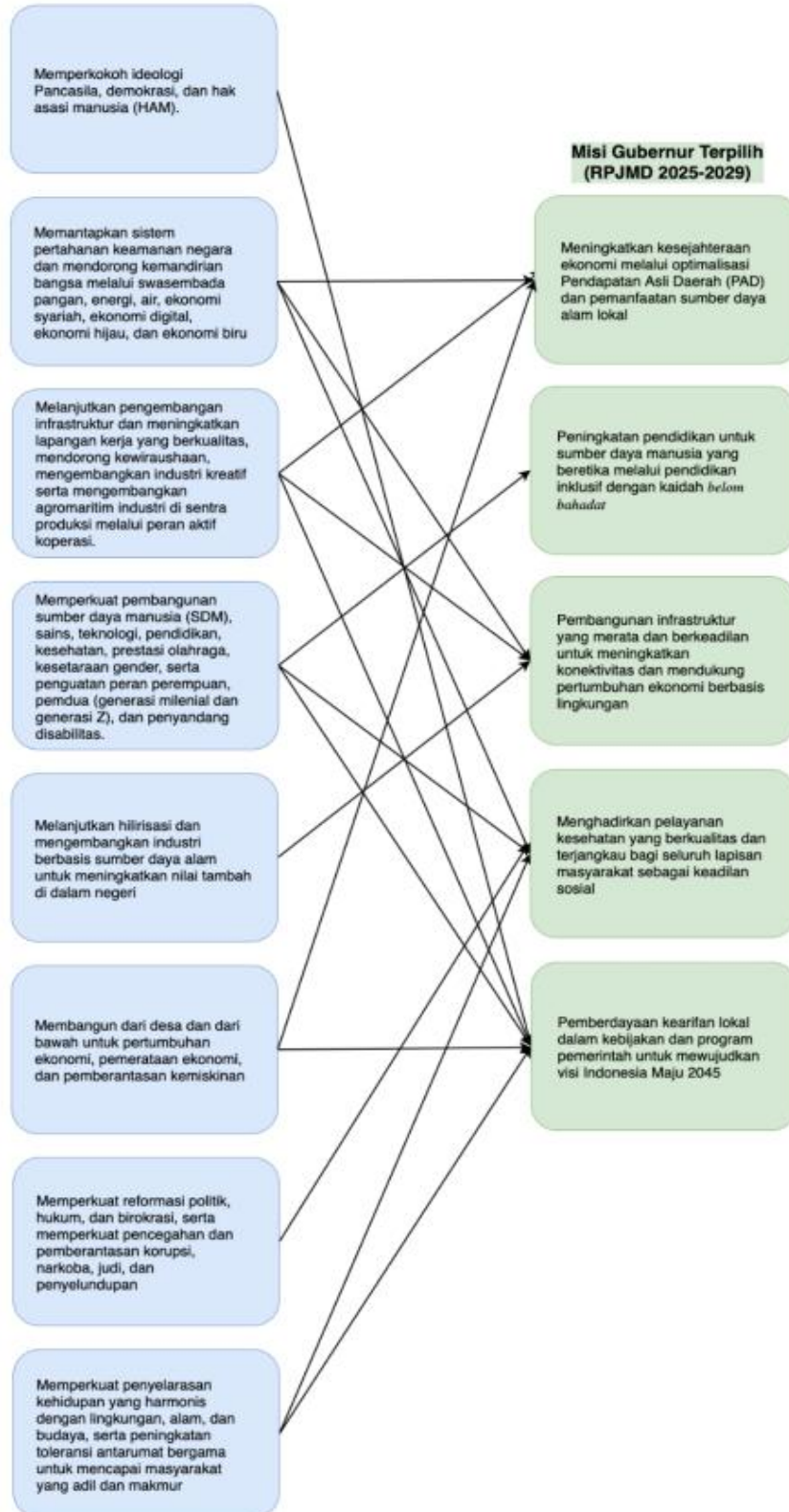


Kemiskinan". Dengan sasaran utama ke tiga, yaitu "Mewujudkan Pembangunan Kemandirian Perdesaan Dari Bawah sebagai Sumber Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan", yang memiliki indikator sasaran/indikator kinerja yaitu persentase desa mandiri dengan satuan persen. Adapun keselarasan pada misi kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Kalimantan Tengah berada pada misi ke satu, yaitu "Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi melalui Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Lokal". Dengan sasaran ke empat, yaitu "Meningkatnya Kapasitas Desa melalui Pengembangan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal untuk Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa", yang memiliki indikator sasaran/indikator kinerja yaitu persentase desa mandiri dengan satuan persen.

Berikut keterhubungan antara misi RPJMN periode 2025 - 2029 dan misi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah periode 2025 – 2029.



**Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden  
(RPJMN 2025-2029)**



Gambar 3.4 Keterhubungan antara Misi RPJMN periode 2025 – 2029 dan Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah periode 2025 – 2029



### 3.1 TUJUAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 – 2029.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang sesuai periodisasi dan substansinya baik untuk pemerintah daerah dan perangkat daerah. Dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang (RPJPD) dijabarkan oleh dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah (RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah), selanjutnya dioperasionalkan dalam perencanaan pembangunan tahunan daerah (RKPD dan Renja PD).

Perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan daerah kewenangan provinsi memiliki tujuan dan *outcome* yang dapat disesuaikan dengan konteks daerah masing – masing, dalam hal ini termuat pada Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 2 tahun 2025 tentang pedoman penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana strategis perangkat daerah tahun 2025 – 2029. Sehingga kinerja yang ingin diwujudkan selama lima tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan perangkat daerah berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran RPJMD. Adapun tujuan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa adalah “Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa” dengan indikator kinerja adalah Indeks Desa Membangun (IDM). Tak hanya itu saja, berikut penentuan *outcome* berdasarkan program yang melekat pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.



Tabel 3.3 Outcome urusan pemberdayaan masyarakat dan desa

Program	Outcome	Indikator
Program penataan desa	Meningkatnya kualitas penataan desa.	Persentase fasilitasi penataan desa (%).
Program peningkatan kerjasama desa	Meningkatnya efektivitas kerja sama desa.	Persentase fasilitasi kerjasama Desa (%).
Program administrasi pemerintahan Desa	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.	1) Persentase aparatur desa & anggota BPD yg ditingkatkan kapasitasnya (%). 2) Persentase fasilitasi tata kelola desa (%).
Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan.	1) Persentase fasilitasi pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (%). 2) Persentase fasilitasi pemberdayaan lembaga adat desa & Lembaga Masyarakat hukum adat (%).
Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)? B (%).



### **3.2 SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 – 2029.**

Rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan renstra perangkat daerah. Dimana dalam penentuannya berdasarkan keterkaitan *outcome* antar program yang mendukung pembangunan desa, yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

Sesuai Undang – Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah yang mampu urusan pemberdayaan masyarakat desa sebagai pendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat desa sebagai upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pembangunan desa sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar – besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Dimana dalam menyepakati hal – hal yang bersifat strategis di desa diperlukan adanya musyawarah desa antara badan permusyawaratan



desa, pemerintah desa dan unsur masyarakat, yang kemudian setelah dibahas dan disepakati bersama maka ditetapkanlah peraturan perundang – undangan oleh kepala desa berupa peraturan desa yang berasaskan rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan dan keberlanjutan.

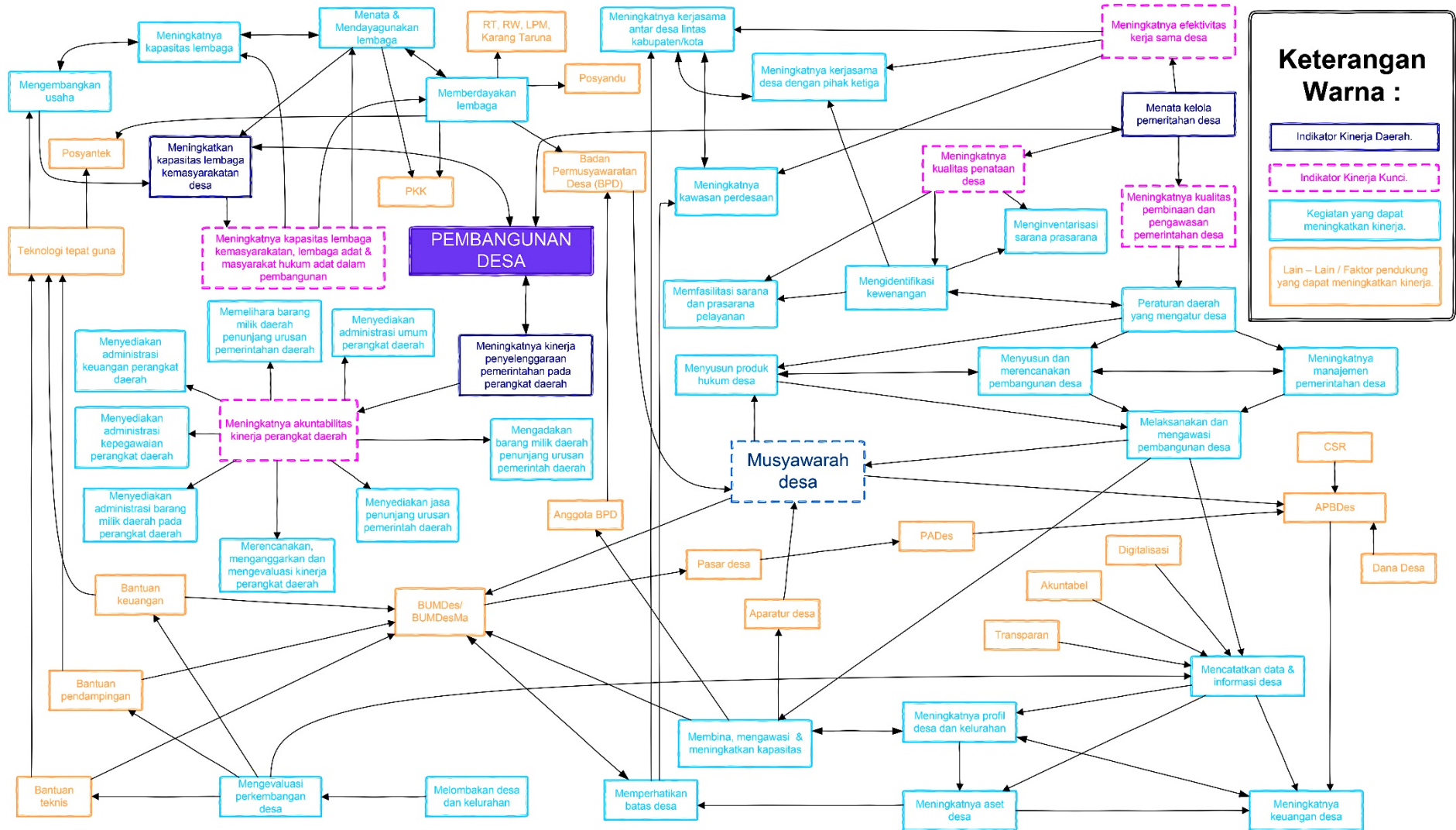
Di dalam perjalanannya, pembangunan desa memerlukan adanya peningkatan tata kelola pemerintahan desa, peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada perangkat daerah berupa bantuan keuangan, bantuan pendampingan dan bantuan teknis yang mendukung perkembangan pemberdayaan aparatur desa, lembaga desa dan badan usaha desa yang dapat meningkatkan pendapatan asli desa sebagai anggaran pendapatan belanja desa yang penggunaan dan sumbernya ditetapkan melalui musyawarah desa. Sehingga dalam penerapannya diperlukan adanya peningkatan pencatatan data dan informasi desa yang akuntabel, transparan dan digitalisasi sebagai evaluasi perkembangan desa yang dapat dijadikan lomba desa dan kelurahan guna merangsang peningkatan profil desa dan kelurahan yang nantinya diharapkan adanya peningkatan kerjasama desa sehingga tidak hanya terdiri dari satu desa saja melainkan dengan desa yang berdekatan baik yang masih dalam satu batas administrasi yang sama ataupun lintas kewenangan melalui identifikasi, penyusunan,



perencanaan dan manajemen pemerintahan desa yang diatur dalam peraturan daerah yang mengatur desa dalam kawasan perdesaan dan inventarisasi sarana dan prasarana desa secara efektif.

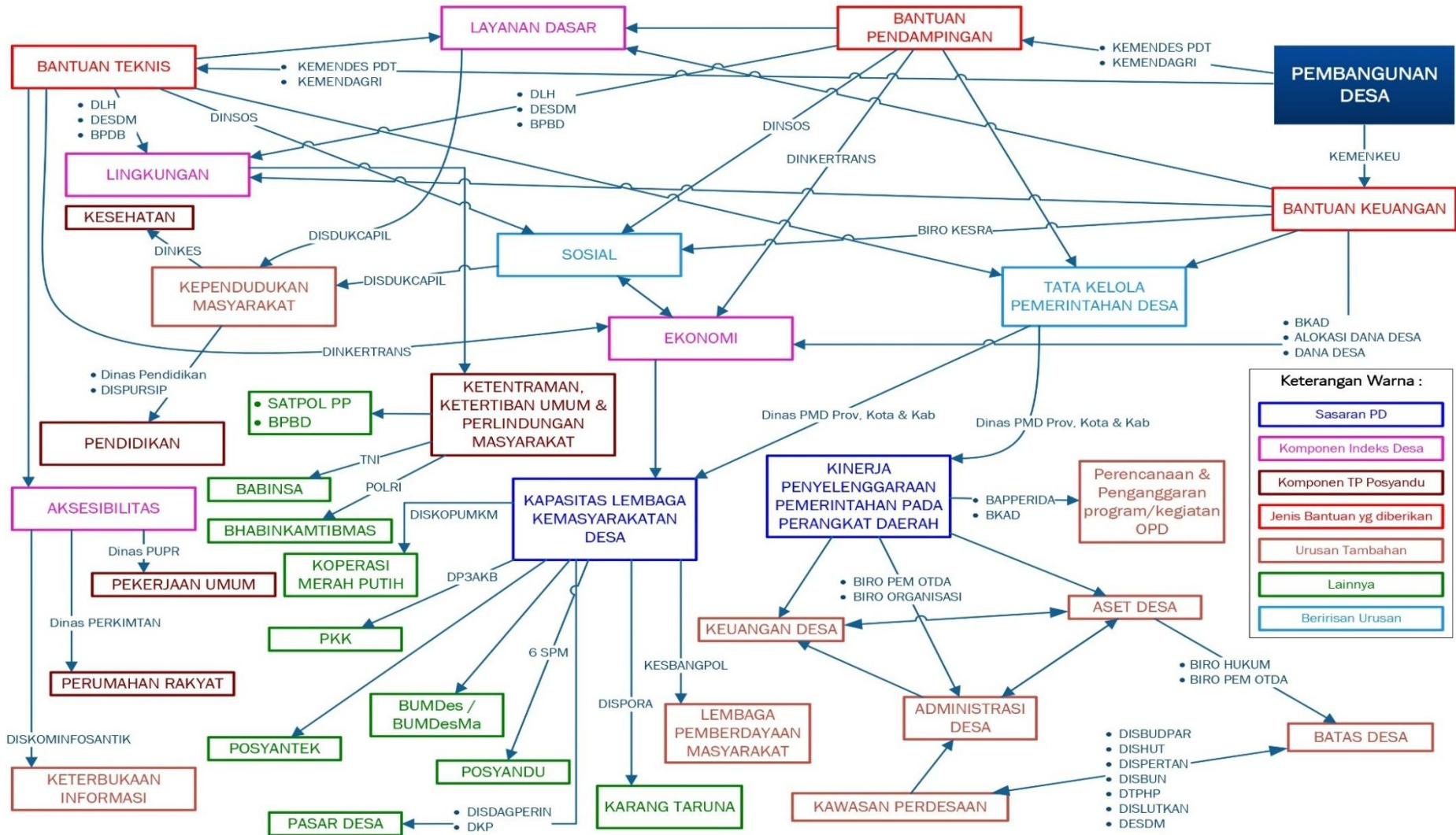
Adapun program atau isu yang melibatkan dan mempengaruhi lebih dari satu sektor membutuhkan koordinasi dan kolaborasi lintas fungsi guna meningkatkan efektivitas dalam mencapai tujuan kinerja secara efisien dan efektif dengan melibatkan semua pihak terkait. Juga menghindari duplikasi sehingga sumber daya dapat digunakan secara optimal. Mengidentifikasi irisan kinerja antar bidang secara horizontal, bukan hanya hirarki vertikal, untuk mendorong koordinasi yang kuat. Hal tersebut terlihat di dalam *crosscutting*.





Gambar 3.5 Keterhubungan Kinerja Pembangunan Desa





Gambar 3.6 Cross Cutting Dinas PMD Prov. Kalteng



Sehingga dalam penentuannya menjadi penting di dalam memastikan masyarakat mendapatkan akses terhadap enam standar minimal pelayanan yang dapat memberikan kebermanfaatan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Adapun hal tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut.

*Tabel 3.4 Rumusan tujuan dan sasaran renstra Dinas PMD*

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
<b>2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>											
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa		Indeks Desa Membangun (IDM) (Indeks)	0,718	0,728	0,738	0,748	0,758	0,768	0,778	
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa.	Persentase peningkatan status desa mandiri (%)	3,77	2	2	2	2	2	2	
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa.	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga (Persentase)	1	1	1	1	1	1	1	
		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada perangkat daerah	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	90	91	92	93	94	95	96	



### 3.3 STRATEGI PERANGKAT DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 – 2029.

Rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah – langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program/ kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai target tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah.

Strategi perangkat daerah dirumuskan sebagai pendekatan umum dalam mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dan semaksimal mungkin dilakukan upaya sinkronisasi dengan arah kebijakan yang tercantum di dalam RPJPD 2025 – 2045 pada tahap I, dimana pembangunan akan dilakukan melalui penguatan pada fondasi yang akan menjadi penopang upaya transformasi pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah terkhusus dalam urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.

*Tabel 3.5 Pentahapan Renstra Perangkat Daerah*

<b>TAHAP I (2026)</b>	<b>TAHAP II (2027)</b>	<b>TAHAP III (2028)</b>	<b>TAHAP IV (2029)</b>	<b>TAHAP V (2030)</b>
Penguatan fondasi sumber daya aparatur penyelenggara pemerintahan	Penguatan dan pengembangan inovasi dan optimalisasi induk data desa	Penguatan dan pengembangan inovasi dan optimalisasi induk data desa	Penguatan dan pengembangan inovasi dan optimalisasi induk data desa	Percepatan penyelesaian perwujudan fondasi pembangunan



di desa dan optimalisasi induk data desa.	dalam pembangunan wilayah tengah.	dalam pembangunan wilayah barat.	dalam pembangunan wilayah timur.	daerah yang berkelanjutan.
---	-----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------

**1. Penguatan fondasi sumber daya aparatur penyelenggara pemerintahan di desa dan optimalisasi induk data desa.**

Fokus utama diarahkan pada investasi peningkatan sumber daya aparatur penyelenggara pemerintahan desa agar dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah desa serta mengoptimalkan induk data desa dalam upaya pembangunan baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sosial di desa.

**2. Penguatan dan pengembangan inovasi dan optimalisasi induk data desa dalam pembangunan wilayah tengah.**

Fokus utama diarahkan pada akselerasi pembangunan dengan penguatan dan pengembangan kualitas tata kelola pemerintah desa pada upaya peningkatan penambahan nilai, pemanfaatan sumber daya alam lokal dan pengembangan inovasi pembangunan serta mengoptimalkan induk data desa dalam upaya pembangunan baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan



masyarakat serta sosial di desa, khususnya wilayah tengah (Kota Palangka Raya, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Katingan, Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau).

### **3. Penguatan dan pengembangan inovasi dan optimalisasi induk data desa dalam pembangunan wilayah barat.**

Fokus utama diarahkan pada akselerasi pembangunan dengan penguatan dan pengembangan kualitas tata kelola pemerintah desa pada upaya peningkatan penambahan nilai, pemanfaatan sumber daya alam lokal dan pengembangan inovasi pembangunan serta mengoptimalkan induk data desa dalam upaya pembangunan baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sosial di desa, khususnya wilayah barat (Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Seruyan).

### **4. Penguatan dan pengembangan inovasi dan optimalisasi induk data desa dalam pembangunan wilayah timur.**

Fokus utama diarahkan pada akselerasi pembangunan dengan penguatan dan pengembangan kualitas tata kelola pemerintah desa pada upaya peningkatan penambahan nilai, pemanfaatan sumber daya alam lokal dan pengembangan inovasi pembangunan serta mengoptimalkan induk data desa dalam upaya pembangunan baik



dalam bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sosial di desa, khususnya wilayah timur (Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Murung Raya).

#### **5. Percepatan penyelesaian perwujudan fondasi pembangunan daerah yang berkelanjutan.**

Fokus utama diarahkan pada akselerasi, pemantapan dan perwujudan pembangunan dari program – program yang berkaitan dengan pemerintah desa dan induk data desa dalam upaya pembangunan baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sosial di desa.

### **3.4 ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 – 2029.**

Rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah.



Arah kebijakan perangkat daerah disusun untuk memastikan keterpaduan antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan yang memperhatikan dinamika lokal, berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, penguatan daya saing daerah, pelestarian lingkungan dan tata Kelola pemerintahan yang baik.

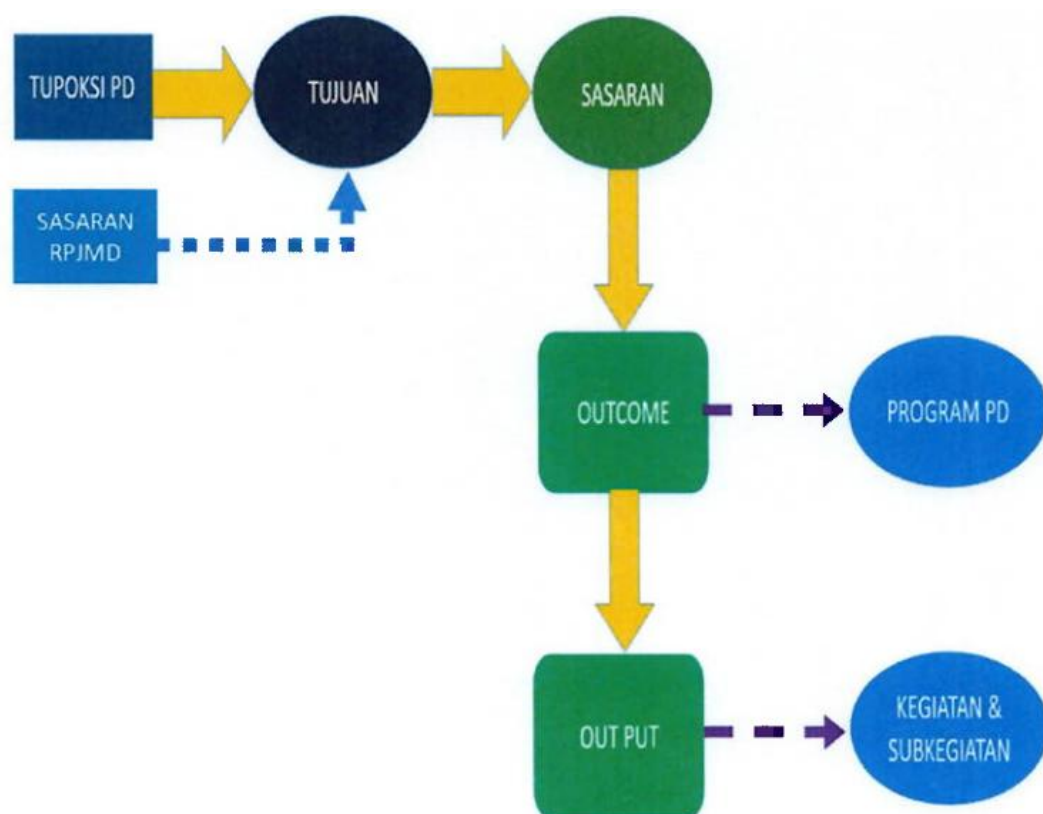
*Tabel 3.6 Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah*

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
1.		Penataan kelembagaan desa dalam mendukung pembangunan secara lebih efektif dan efisien.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di desa.</li> <li>• Penataan kelembagaan di desa.</li> <li>• Pengembangan sumber daya aparatur penyelenggaraan pemerintahan di desa.</li> <li>• Peningkatan skala aktivitas perekonomian di desa.</li> </ul>	



## BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil *cascading* dari tujuan, sasaran, *outcome* dan output yang mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 900.1-2850 tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas keputusan menteri dalam negeri nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemuktahiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dimana dapat diuraikan seperti berikut.



Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah.



Sebagaimana tercantum dalam dokumen visi, misi dan program yang menjadi program unggulan pemerintah daerah dalam jangka waktu lima tahun ke depan disarikan dari program unggulan **HUMA BETANG** yang ditawarkan oleh Agustiar Sabran, S.I.Kom. dan Edy Pratowo, S.Sos sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2025 – 2029, sebagai berikut :

- A. Kalteng Bermartabat
  - a. Meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan.
  - b. Memperluas sosialisasi di berbagai instansi dan kalangan masyarakat agar menjiwai spirit *BELOM BAHADAT*.
- B. Betang Maju
  - a. Pembangunan 1.000 km jalan desa.
  - b. Revitalisasi infrastruktur lintas kabupaten dan kota.
  - c. Pembangunan Delta Kalteng Ekonomi Eksklusif.
  - d. Peningkatan Infrastruktur Air Bersih Desa.
  - e. Peningkatan Akses Listrik Desa, 100% Bersinar.
  - f. Akses Sinyal dan Internet Daerah Pedalaman.
- C. Betang Makmur
  - a. Rp2 juta per Kartu Keluarga Bantuan Pangan.
  - b. Operasi Pasar Murah.
  - c. 250 Miliarder Muda Baru.
  - d. Milenial Job Center.
  - e. Inkubasi UMKM.
  - f. Asuransi Petani dan Nelayan.
  - g. Bantuan Perahu dan Alat Tangkap.



D. Betang Cerdas

- a. Sekolah/Kuliah Gratis.
- b. Satu Keluarga Harus Ada Sarjana.
- c. Satu Keluarga Harus Ada Sarjana.
- d. Insentif Guru Agama.
- e. Kalteng Mengaji.

E. Betang Sehat

- a. Berobat Gratis Berbasis KTP.
- b. Insentif Tenaga Kesehatan Desa.
- c. Revitalisasi Puskesmas Desa.
- d. Pendampingan Ibu Hamil dan Pascahamil.
- e. 1 Desa 1 Ambulans.

F. Betang Harmoni

- a. Berdayakan 100 Dewi (Desa Wisata).
- b. Rp150 Miliar Bantuan Provinsi untuk Kabupaten Kota.
- c. Rp250 Juta Stimulus Desa.
- d. Insentif Kepala Desa, BPD, Damang, Mantir, dan RT/RW se Provinsi Kalimantan Tengah.
- e. Layanan Cepat Tanggap Kebakaran Lahan dan Bantuan Warga.

Program perangkat daerah merupakan akumulasi dari program – program urusan yang diampu oleh perangkat daerah yang akan dijalankan selama lima tahun ke depan, dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah sebagai pengampu urusan pemberdayaan masyarakat dan desa. Program perangkat daerah ini



termasuk didalamnya adalah indikator kinerja dan pagu indikatif anggaran untuk pelaksanaan program tersebut, dimana untuk menyusun rencana strategis yang kemudian diturunkan ke dalam rencana kerja perangkat daerah. Berikut uraian program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah yang akan dilaksanakan pada periode 2025 – 2029.



## 4.1 URAIAN PROGRAM

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah memiliki lima program dalam melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang direncanakan dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 4.1 Program Dinas PMD Prov. Kalteng tahun 2025 – 2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					35.198.012.855,55		35.671.213.112,59		37.124.987.257,23		38.758.256.151,59		40.653.761.927,12	
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					17.050.191.186,55		19.431.213.112,59		19.924.987.257,23		19.723.256.151,59		20.933.761.927,12	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem	90	91	92	17.050.191.186,55	93	19.431.213.112,59	94	19.924.987.257,23	95	19.723.256.151,59	96	20.933.761.927,12	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan



	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B (%)													Masyarakat Dan Desa
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA					200.000.000,00		270.000.000,00		375.000.000,00		350.000.000,00		500.000.000,00	
Meningkatnya kualitas penataan desa.	Persentase Fasilitasi Penataan Desa (Persentase)	0	0	74	200.000.000,00	76	270.000.000,00	78	375.000.000,00	80	350.000.000,00	82	500.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					1.400.000.000,00		1.250.000.000,00		1.270.000.000,00		1.300.000.000,00		1.350.000.000,00	
Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa (Persentase)	70	72	74	1.400.000.000,00	76	1.250.000.000,00	78	1.270.000.000,00	80	1.300.000.000,00	82	1.350.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					9.672.821.669,00		8.590.000.000,00		9.355.000.000,00		10.280.000.000,00		10.570.000.000,00	
Meningkatnya kualitas pembinaan dan	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD	10	10	10	9.672.821.669,00	10	8.590.000.000,00	10	9.355.000.000,00	10	10.280.000.000,00	10	10.570.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang



pengawasan pemerintahan desa.	yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)													Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa (Persentase)	70	72	74		76		78		80		82		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					6.875.000.000,00		6.130.000.000,00		6.200.000.000,00		7.105.000.000,00		7.300.000.000,00	
Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan.	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	70	72	74	6.875.000.000,00	76	6.130.000.000,00	78	6.200.000.000,00	80	7.105.000.000,00	82	7.300.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat	70	72	74		76		78		80		82		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa



	Hukum Adat (Persentase)													
<b>TOTAL KESELURUHAN</b>					35.198.012.855.55		35.671.213.112.59		37.124.987.257.23		38.758.256.151.59		40.653.761.927.12	

## 4.2 URAIAN KEGIATAN

Adapun kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah dapat diuraikan sebagai berikut :



Tabel 4.2 Rumusan Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan Dinas PMD Prov. Kalteng

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
<b>2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>							
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa.	Meningkatnya kualitas penataan desa.		Indeks Desa Membangun (IDM)		
					Persentase peningkatan status desa mandiri		
					Persentase Fasilitasi Penataan Desa	2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA	
				Terlaksananya fasilitasi penataan desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	2.13.02.1.01 - Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat	2.13.02.1.01 - Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	
				Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan	2.13.02.1.01 - Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian		



					Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan	Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	
					jumlah Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	2.13.02.1.01 - Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	
					Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan	2.13.02.1.01.0001 - Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat	2.13.02.1.01.0002 - Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	2.13.02.1.01.0003 - Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	
					jumlah Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	2.13.02.1.01.0004 - Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	
			Meningkatnya efektivitas kerja sama desa		Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	
					jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	2.13.03.1.01 - Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	



					Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	2.13.03.1.01 - Fasilitas Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	
					Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan pihak ketiga yang Dilaksanakan	2.13.03.1.01 - Fasilitas Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	
			Terlaksananya fasilitasi kerjasama antar desa		Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	2.13.03.1.01.0001 - Fasilitas Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan pihak ketiga yang Dilaksanakan	2.13.03.1.01.0002 - Fasilitas Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	
					jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	2.13.03.1.01.0003 - Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	
		Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.			Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	
					Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa	2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	
			Terlaksananya tata kelola pemerintahan desa sesuai peraturan perundang-undangan		jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	2.13.04.1.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	
					jumlah Dokumen hasil Fasilitas Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	2.13.04.1.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	



					Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	2.13.04.1.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	2.13.04.1.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota	2.13.04.1.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	2.13.04.1.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali Kota yang Mengatur Desa	2.13.04.1.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	2.13.04.1.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	2.13.04.1.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	



					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	2.13.04.1.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	2.13.04.1.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	2.13.04.1.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Produk Hukum desa yang Ditetapkan	2.13.04.1.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	
					Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	2.13.04.1.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	
					jumlah orang yang Mengikuti Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	2.13.04.1.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali Kota yang Mengatur Desa	2.13.04.1.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa	



					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	2.13.04.1.01.0002 - Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Produk Hukum desa yang Ditetapkan	2.13.04.1.01.0003 - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	
					jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	2.13.04.1.01.0004 - Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	2.13.04.1.01.0005 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	2.13.04.1.01.0006 - Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	
					jumlah orang yang Mengikuti Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	2.13.04.1.01.0007 - Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	2.13.04.1.01.0008 - Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	2.13.04.1.01.0009 - Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	



					jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	2.13.04.1.01.0010 - Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	
					Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	2.13.04.1.01.0011 - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	2.13.04.1.01.0012 - Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	2.13.04.1.01.0015 - Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	2.13.04.1.01.0016 - Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota	2.13.04.1.01.0018 - Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga			Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga		



		Kemasyarakatan Desa.	Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan.		Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	
					Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	
				Terlaksananya pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2.13.05.1.01 - Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	2.13.05.1.01 - Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	2.13.05.1.01 - Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat					



						yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2.13.05.1.01 - Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	2.13.05.1.01 - Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelebagaannya	2.13.05.1.01 - Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan	2.13.05.1.01.0002 - Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan	



					Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	2.13.05.1.01.0003 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	2.13.05.1.01.0005 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2.13.05.1.01.0006 - Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	2.13.05.1.01.0008 - Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	2.13.05.1.01.0009 - Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	



		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada perangkat daerah			Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan.		
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.		Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B	2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
			Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah.		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2.13.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.13.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2.13.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.13.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.13.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	



					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.13.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.13.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.13.01.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2.13.01.1.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2.13.01.1.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.13.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.13.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	



				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.13.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.13.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.13.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.13.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.13.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.13.01.1.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.13.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	



					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.13.01.1.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2.13.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.13.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.13.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.13.01.1.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2.13.01.1.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.13.01.1.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya Administrasi	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.13.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	



				Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2.13.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2.13.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2.13.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2.13.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2.13.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.13.01.1.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2.13.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2.13.01.1.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	



					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2.13.01.1.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2.13.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2.13.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.13.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.13.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.13.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2.13.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.13.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	



					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.13.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.13.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.13.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2.13.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2.13.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.13.01.1.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.13.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.13.01.1.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2.13.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	



				Terlaksananya pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2.13.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2.13.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2.13.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2.13.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2.13.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2.13.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2.13.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2.13.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	



					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2.13.01.1.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2.13.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah.		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2.13.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.13.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.13.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.13.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2.13.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.13.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	



				Terpeliharanya Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.13.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2.13.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2.13.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2.13.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2.13.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2.13.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.13.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	



					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.13.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
--	--	--	--	--	--	---	--

#### 4.3 URAIAN SUB KEGIATAN BESERTA KINERJA, INDIKATOR, TARGET DAN PAGU INDIKATIF

Berikut uraian sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif urusan pemberdayaan masyarakat dan desa pada renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025 – 2029.

*Tabel 4.3 Rencana program/kegiatan/sub kegiatan dan pendanaan Dinas PMD Prov. Kalteng*

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KE T
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				35.198.012.85 5,55		35.671.213.11 2,59		37.124.987.25 7,23		38.758.256.15 1,59		40.653.761.92 7,12		
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN				17.050.191.18 6,55		19.431.213.11 2,59		19.924.987.25 7,23		19.723.256.15 1,59		20.933.761.92 7,12		



PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI														
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B	90	92	17.050.191.18 6,55	93	19.431.213.11 2,59	94	19.924.987.25 7,23	95	19.723.256.15 1,59	96	20.933.761.92 7,12	2.13.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.13.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Aturan	90	92	900.284.784,5 5	93	982.935.555,5 9	94	1.020.078.755 ,23	95	1.035.284.764 ,59	96	1.255.284.766 ,12		
Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah.	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	2	900.284.784,5 5	2	982.935.555,5 9	2	1.020.078.755 ,23	2	1.035.284.764 ,59	2	1.255.284.766 ,12		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8	8		8		8		8		8			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil	2	0		2		2		2		2			



	Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD												
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	2		2		2		2		2		
2.13.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	
2.13.01.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD				-		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	0	-	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	
2.13.01.1.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00	



Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00		
2.13.01.1.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00		
2.13.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				10.284.784,55		10.284.765,59		10.284.765,58		10.284.764,59		10.284.766,12		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8	8	10.284.784,55	8	10.284.765,59	8	10.284.765,58	8	10.284.764,59	8	10.284.766,12		



2.13.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				850.000.000,0 0		927.650.790,0 0		964.793.989,6 5		980.000.000,0 0		1.200.000.000 ,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	3	850.000.000,0 0	3	927.650.790,0 0	3	964.793.989,6 5	3	980.000.000,0 0	3	1.200.000.000 ,00		
2.13.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	90	92	9.291.806.655 ,00	93	10.092.291.69 8,00	94	10.596.661.25 5,00	95	10.596.724.14 0,00	96	10.707.229.91 4,00		
Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	10	4	9.291.806.655 ,00	4	10.092.291.69 8,00		10.596.661.25 5,00	4	10.596.724.14 0,00	4	10.707.229.91 4,00		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46	80		98		105		110		113			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	1		1		1		1		1			



2.13.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				9.238.306.794 ,00		10.038.306.79 4,00		10.538.306.79 4,00		10.538.369.67 9,00		10.648.875.45 3,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46	80	9.238.306.794 ,00	98	10.038.306.79 4,00	105	10.538.306.79 4,00	110	10.538.369.67 9,00	113	10.648.875.45 3,00		
2.13.01.1.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD				30.000.000,00		30.485.043,00		34.854.600,00		34.854.600,00		34.854.600,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	30.000.000,00	12	30.485.043,00	12	34.854.600,00	12	34.854.600,00	12	34.854.600,00		
2.13.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				13.499.985,00		13.499.985,00		13.499.985,00		13.499.985,00		13.499.985,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	1	13.499.985,00	1	13.499.985,00	1	13.499.985,00	1	13.499.985,00	1	13.499.985,00		
2.13.01.1.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/				9.999.876,00		9.999.876,00		9.999.876,00		9.999.876,00		9.999.876,00		



Triwulanan/Semesteran SKPD														
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10	4	9.999.876,00	4	9.999.876,00		9.999.876,00	4	9.999.876,00	4	9.999.876,00		
2.13.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi BMD pada Perangkat Daerah	90	92	118.112.247,0 0	93	118.112.247,0 0	94	118.112.247,0 0	95	118.112.247,0 0	96	118.112.247,0 0		
Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	2	118.112.247,0 0	2	118.112.247,0 0	2	118.112.247,0 0	2	118.112.247,0 0	2	118.112.247,0 0		
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	1		1		1		1		1			
2.13.01.1.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				9.767.099,00		9.767.099,00		9.767.099,00		9.767.099,00		9.767.099,00		



Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	2	9.767.099,00	2	9.767.099,00	2	9.767.099,00	2	9.767.099,00	2	9.767.099,00		
2.13.01.1.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				100.000.000,0 0		100.000.000,0 0		100.000.000,0 0		100.000.000,0 0		100.000.000,0 0		
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	1	100.000.000,0 0	1	100.000.000,0 0	1	100.000.000,0 0	1	100.000.000,0 0	1	100.000.000,0 0		
2.13.01.1.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				8.345.148,00		8.345.148,00		8.345.148,00		8.345.148,00		8.345.148,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	2	8.345.148,00	2	8.345.148,00	2	8.345.148,00	2	8.345.148,00	2	8.345.148,00		
2.13.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	90	92	1.159.867.500 ,00	93	810.738.612,0 0	94	828.000.000,0 0	95	998.000.000,0 0	96	1.028.000.000 ,00		
Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20	20	1.159.867.500 ,00	20	810.738.612,0 0	20	828.000.000,0 0	20	998.000.000,0 0	20	1.028.000.000 ,00		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0		5		5		5		5			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan	20	10		10		10		10		10			



	Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan													
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10	12		12		12		12		12			
2.13.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				401.867.500,0 0		300.000.000,0 0		250.000.000,0 0		350.000.000,0 0		350.000.000,0 0		
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1	1	401.867.500,0 0	1	300.000.000,0 0	1	250.000.000,0 0	1	350.000.000,0 0	1	350.000.000,0 0		
2.13.01.1.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10	12	8.000.000,00	12	8.000.000,00	12	8.000.000,00	12	8.000.000,00	12	8.000.000,00		
2.13.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				400.000.000,0 0		250.000.000,0 0		350.000.000,0 0		400.000.000,0 0		400.000.000,0 0		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20	20	400.000.000,0 0	20	250.000.000,0 0	20	350.000.000,0 0	20	400.000.000,0 0	20	400.000.000,0 0		



2.13.01.1.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				-		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	0	0	-	5	20.000.000,00	5	20.000.000,00	5	20.000.000,00	5	20.000.000,00		
2.13.01.1.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				350.000.000,0 0		232.738.612,0 0		200.000.000,0 0		220.000.000,0 0		250.000.000,0 0		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	20	10	350.000.000,0 0	10	232.738.612,0 0	10	200.000.000,0 0	10	220.000.000,0 0	10	250.000.000,0 0		
2.13.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	90	92	2.501.000.000 ,00	93	2.386.015.000 ,00	94	3.246.015.000 ,00	95	2.746.015.000 ,00	96	2.996.015.000 ,00		
Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9	5	2.501.000.000 ,00	2	2.386.015.000 ,00	2	3.246.015.000 ,00	2	2.746.015.000 ,00	2	2.996.015.000 ,00		
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	4		4		4		4		4			



	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	0		12		12		12		12		
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12		12		12		12		12		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45	12		12		12		12		12		
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	12		12		12		12		12		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1		1		1		1		1		
2.13.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor				150.000.000,0 0		250.015.000,0 0		250.015.000,0 0		250.015.000,0 0		250.015.000,0 0	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	150.000.000,0 0	1	250.015.000,0 0	1	250.015.000,0 0	1	250.015.000,0 0	1	250.015.000,0 0	
2.13.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				400.000.000,0 0		90.000.000,0		150.000.000,0 0		150.000.000,0 0		150.000.000,0 0	



Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9	5	400.000.000,0 0	2	90.000.000,0	2	150.000.000,0 0	2	150.000.000,0 0	2	150.000.000,0 0		
2.13.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				66.000.000,0		66.000.000,0		66.000.000,0		66.000.000,0		66.000.000,0		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	12	66.000.000,0 0	12	66.000.000,0	12	66.000.000,0 0	12	66.000.000,0 0	12	66.000.000,0 0		
2.13.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				250.000.000,0 0		250.000.000,0 0		300.000.000,0 0		300.000.000,0 0		300.000.000,0 0		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	4	250.000.000,0 0	4	250.000.000,0 0	4	300.000.000,0 0	4	300.000.000,0 0	4	300.000.000,0 0		
2.13.01.1.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				300.000.000,0 0		300.000.000,0 0		450.000.000,0 0		250.000.000,0 0		400.000.000,0 0		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	12	300.000.000,0 0	12	300.000.000,0 0	12	450.000.000,0 0	12	250.000.000,0 0	12	400.000.000,0 0		
2.13.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				400.000.000,0 0		400.000.000,0 0		500.000.000,0 0		500.000.000,0 0		500.000.000,0 0		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	45	12	400.000.000,0 0	12	400.000.000,0 0	12	500.000.000,0 0	12	500.000.000,0 0	12	500.000.000,0 0		



Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
2.13.01.1.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				-		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	0	-	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00		
2.13.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				935.000.000,0 0		1.000.000.000 ,00		1.500.000.000 ,00		1.200.000.000 ,00		1.300.000.000 ,00		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3	3	935.000.000,0 0	3	1.000.000.000 ,00	3	1.500.000.000 ,00	3	1.200.000.000 ,00	3	1.300.000.000 ,00		
2.13.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90	92	500.000.000,0 0	93	1.575.000.000 ,00	94	850.000.000,0 0	95	1.500.000.000 ,00	96	1.250.000.000 ,00		
Terlaksananya pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	1	500.000.000,0 0	1	1.575.000.000 ,00	1	850.000.000,0 0	1	1.500.000.000 ,00	1	1.250.000.000 ,00		
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	0		1		0		1		1			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau	5	0		1		0		1		0			



	Lapangan yang Disediakan													
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100	3		10		13		20		18			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	24	10		15		10		10		15			
2.13.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				-		600.000.000,0 0		-		600.000.000,0 0		-		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5	0	-	1	600.000.000,0 0	0	-	1	600.000.000,0 0	0	-		
2.13.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel				350.000.000,0 0		325.000.000,0 0		300.000.000,0 0		150.000.000,0 0		150.000.000,0 0		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	1	350.000.000,0 0	1	325.000.000,0 0	1	300.000.000,0 0	1	150.000.000,0 0	1	150.000.000,0 0		
2.13.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100.000.000,0 0		200.000.000,0 0		300.000.000,0 0		200.000.000,0 0		300.000.000,0 0		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100	3	100.000.000,0 0	10	200.000.000,0 0	13	300.000.000,0 0	20	200.000.000,0 0	18	300.000.000,0 0		
2.13.01.1.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-		400.000.000,0 0		-		500.000.000,0 0		600.000.000,0 0		



Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	0	-	1	400.000.000,0	0	-	1	500.000.000,0	1	600.000.000,0		
2.13.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000.000,00		50.000.000,00		250.000.000,00		50.000.000,00		200.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	24	10	50.000.000,00	15	50.000.000,00	10	250.000.000,00	10	50.000.000,00	15	200.000.000,00		
2.13.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90	92	1.479.120.000,00	93	2.266.120.000,00	94	2.166.120.000,00	95	1.629.120.000,00	96	2.279.120.000,00		
Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	12	1.479.120.000,00	12	2.266.120.000,00	12	2.166.120.000,00	12	1.629.120.000,00	12	2.279.120.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	4		4		4		4		4			
2.13.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				29.120.000,00		29.120.000,00		29.120.000,00		29.120.000,00		29.120.000,00		



Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	12	29.120.000,00	12	29.120.000,00	12	29.120.000,00	12	29.120.000,00	12	29.120.000,00		
2.13.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				350.000.000,0 0		500.000.000,0 0		400.000.000,0 0		400.000.000,0 0		450.000.000,0 0		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	4	350.000.000,0 0	4	500.000.000,0 0	4	400.000.000,0 0	4	400.000.000,0 0	4	450.000.000,0 0		
2.13.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.100.000.000 ,00		1.737.000.000 ,00		1.737.000.000 ,00		1.200.000.000 ,00		1.800.000.000 ,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	1.100.000.000 ,00	12	1.737.000.000 ,00	12	1.737.000.000 ,00	12	1.200.000.000 ,00	12	1.800.000.000 ,00		
2.13.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90	92	1.100.000.000 ,00	93	1.200.000.000 ,00	94	1.100.000.000 ,00	95	1.100.000.000 ,00	96	1.300.000.000 ,00		
Terpeliharanya Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24	10	1.100.000.000 ,00	10	1.200.000.000 ,00	10	1.100.000.000 ,00	10	1.100.000.000 ,00	10	1.300.000.000 ,00		



	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	71	20		25		25		25		25		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	60	25		25		25		30		30		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1		1		1		1		1		
2.13.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				400.000.000,0 0		400.000.000,0 0		400.000.000,0 0		400.000.000,0 0		500.000.000,0 0	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	60	25	400.000.000,0 0	25	400.000.000,0 0	25	400.000.000,0 0	30	400.000.000,0 0	30	500.000.000,0 0	
2.13.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100.000.000,0 0		150.000.000,0 0		150.000.000,0 0		150.000.000,0 0		150.000.000,0 0	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	71	20	100.000.000,0 0	25	150.000.000,0 0	25	150.000.000,0 0	25	150.000.000,0 0	25	150.000.000,0 0	



2.13.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				350.000.000,0 0		400.000.000,0 0		300.000.000,0 0		300.000.000,0 0		400.000.000,0 0		
Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	350.000.000,0 0	1	400.000.000,0 0	1	300.000.000,0 0	1	300.000.000,0 0	1	400.000.000,0 0		
2.13.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				250.000.000,0 0		250.000.000,0 0		250.000.000,0 0		250.000.000,0 0		250.000.000,0 0		
Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24	10	250.000.000,0 0	10	250.000.000,0 0	10	250.000.000,0 0	10	250.000.000,0 0	10	250.000.000,0 0		
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA				200.000.000,0 0		270.000.000,0 0		375.000.000,0 0		350.000.000,0 0		500.000.000,0 0		
Meningkatnya kualitas penataan desa.	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	0	74	200.000.000,0 0	76	270.000.000,0 0	78	375.000.000,0 0	80	350.000.000,0 0	82	500.000.000,0 0	2.13.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.13.02.1.01 - Penatausahaan	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan	0	74	200.000.000,0 0	76	270.000.000,0 0	78	375.000.000,0 0	80	350.000.000,0 0	82	500.000.000,0 0		



Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat													
Terlaksananya fasilitasi penataan desa	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan	0	0	200.000.000,0	4	270.000.000,0	4	375.000.000,0	4	350.000.000,0	4	500.000.000,0		
	jumlah Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	0	4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat	0	0		4		4		4		4			
2.13.02.1.01.0001 - Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi				-		50.000.000,00		75.000.000,00		50.000.000,00		100.000.000,0	0	



Terlaksananya Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitas Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitas Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan	0	0	-	4	50.000.000,00	4	75.000.000,00	4	50.000.000,00	4	100.000.000,00	0	
2.13.02.1.01.0002 - Fasilitas Kelembagaan Desa dan Desa Adat				-		20.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		100.000.000,00	0	
Terlaksananya Fasilitas Kelembagaan Desa dan Desa Adat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kelembagaan Desa dan Desa Adat	0	0	-	4	20.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	100.000.000,00	0	
2.13.02.1.01.0003 - Fasilitas Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa				200.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	0	
Terlaksananya Fasilitas Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	0	4	200.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	0	
2.13.02.1.01.0004 - Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa				-		100.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		200.000.000,00	0	
Tersedianya Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	jumlah Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	0	0	-	1	100.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	200.000.000,00	0	



2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA				1.400.000.000 ,00		1.250.000.000 ,00		1.270.000.000 ,00		1.300.000.000 ,00		1.350.000.000 ,00		
Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	70	74	1.400.000.000 ,00	76	1.250.000.000 ,00	78	1.270.000.000 ,00	80	1.300.000.000 ,00	82	1.350.000.000 ,00	2.13.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.13.03.1.01 - Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Kerjasama Antar Desa yang menjadi Kewenangan Provinsi	70	74	1.400.000.000 ,00	76	1.250.000.000 ,00	78	1.270.000.000 ,00	80	1.300.000.000 ,00	82	1.350.000.000 ,00		
Terlaksananya fasilitasi kerjasama antar desa	jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1	4	1.400.000.000 ,00	4	1.250.000.000 ,00	4	1.270.000.000 ,00	4	1.300.000.000 ,00	4	1.350.000.000 ,00		
	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan pihak ketiga yang Dilaksanakan	1	4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	0	0		4		4		4		4			
2.13.03.1.01.0001 - Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota				-		50.000.000,00		50.000.000,00		100.000.000,0 0		150.000.000,0 0		
Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	0	0	-	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	100.000.000,0 0	4	150.000.000,0 0		
2.13.03.1.01.0002 - Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga				500.000.000,0 0		400.000.000,0 0		320.000.000,0 0		400.000.000,0 0		400.000.000,0 0		



Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan pihak ketiga yang Dilaksanakan	1	4	500.000.000,0	4	400.000.000,0	4	320.000.000,0	4	400.000.000,0	4	400.000.000,0		
				0		0		0		0		0		
2.13.03.1.01.0003 - Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				900.000.000,0		800.000.000,0		900.000.000,0		800.000.000,0		800.000.000,0		
				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1	4	900.000.000,0	4	800.000.000,0	4	900.000.000,0	4	800.000.000,0	4	800.000.000,0		
				0		0		0		0		0		
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				9.672.821.669,00		8.590.000.000,00		9.355.000.000,00		10.280.000.000,00		10.570.000.000,00		
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10	10	9.672.821.669,00	10	8.590.000.000,00	10	9.355.000.000,00	10	10.280.000.000,00	10	10.570.000.000,00	2.13.0.00.0.00.01	.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	70	74		76		78		80		82			
2.13.04.1.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan Pembinaan & Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	70	74	9.672.821.669,00	76	8.590.000.000,00	78	9.355.000.000,00	80	10.280.000.000,00	82	10.570.000.000,00		
Terlaksananya tata kelola pemerintahan desa sesuai peraturan perundang - undangan	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	45	4	9.672.821.669,00	4	8.590.000.000,00	4	9.355.000.000,00	4	10.280.000.000,00	4	10.570.000.000,00		
	jumlah orang yang Mengikuti Pemilihan, Pengangkatan dan	13	100		100		100		100		100			



	Pemberhentian Kepala Desa													
	Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	142	50		50		50		50		50			
	Jumlah Dokumen Produk Hukum desa yang Ditetapkan	0	4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	1	4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	0	4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	1	4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	4	4		4		4		4		4			



Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali Kota yang Mengatur Desa	80	4		4		4		4		4			
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1	4		4		4		4		4			
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota	0	4		4		4		4		4			
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	1	4		4		4		4		4			
Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	3	4		4		4		4		4			
jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	0	4		4		4		4		4			
jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	1621	200		250		250		300		300			



2.13.04.1.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa				100.000.000,0 0		150.000.000,0 0		200.000.000,0 0		200.000.000,0 0		400.000.000,0 0		
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa	80	4	100.000.000,0 0	4	150.000.000,0 0	4	200.000.000,0 0	4	200.000.000,0 0	4	400.000.000,0 0		
2.13.04.1.01.0002 - Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa				1.000.000.000 ,00		650.000.000,0 0		650.000.000,0 0		700.000.000,0 0		750.000.000,0 0		
Terlaksananya Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	1	4	1.000.000.000 ,00	4	650.000.000,0 0	4	650.000.000,0 0	4	700.000.000,0 0	4	750.000.000,0 0		
2.13.04.1.01.0003 - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa				500.000.000,0 0		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Produk Hukum desa yang Ditetapkan	0	4	500.000.000,0 0	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00		
2.13.04.1.01.0004 - Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa				500.000.000,0 0		700.000.000,0 0		500.000.000,0 0		800.000.000,0 0		500.000.000,0 0		



Terlaksananya Fasilitas	jumlah Dokumen hasil	0	4	500.000.000,0	4	700.000.000,0	4	500.000.000,0	4	800.000.000,0	4	500.000.000,0		
Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	Fasilitas Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa			0		0		0		0		0		
2.13.04.1.01.0005 - Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa				600.000.000,0		800.000.000,0		800.000.000,0		800.000.000,0		500.000.000,0		
				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	1	4	600.000.000,0	4	800.000.000,0	4	800.000.000,0	4	800.000.000,0	4	500.000.000,0		
				0		0		0		0		0		
2.13.04.1.01.0006 - Fasilitas Pengelolaan Aset Desa				100.000.000,0		200.000.000,0		400.000.000,0		400.000.000,0		350.000.000,0		
				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	1	4	100.000.000,0	4	200.000.000,0	4	400.000.000,0	4	400.000.000,0	4	350.000.000,0		
				0		0		0		0		0		
2.13.04.1.01.0007 - Fasilitas Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				150.000.000,0		125.000.000,0		150.000.000,0		200.000.000,0		200.000.000,0		
				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Fasilitas Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	jumlah orang yang Mengikuti Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	13	100	150.000.000,0	100	125.000.000,0	100	150.000.000,0	100	200.000.000,0	100	200.000.000,0		
				0		0		0		0		0		
2.13.04.1.01.0008 - Fasilitas Evaluasi				1.500.000.000,00		1.650.000.000,00		2.000.000.000,00		2.200.000.000,00		2.300.000.000,00		



Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan														
Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	3	4	1.500.000.000,00	4	1.650.000.000,00	4	2.000.000.000,00	4	2.200.000.000,00	4	2.300.000.000,00		
2.13.04.1.01.0009 - Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan				400.000.000,00		400.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		600.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	1	4	400.000.000,00	4	400.000.000,00	4	500.000.000,00	4	500.000.000,00	4	600.000.000,00		
2.13.04.1.01.0010 - Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa				1.000.000.000,00		1.100.000.000,00		1.200.000.000,00		1.000.000.000,00		1.100.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	1621	200	1.000.000.000,00	250	1.100.000.000,00	250	1.200.000.000,00	300	1.000.000.000,00	300	1.100.000.000,00		
2.13.04.1.01.0011 - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD				200.000.000,00		250.000.000,00		300.000.000,00		350.000.000,00		400.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	142	50	200.000.000,00	50	250.000.000,00	50	300.000.000,00	50	350.000.000,00	50	400.000.000,00		
2.13.04.1.01.0012 - Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan				50.000.000,00		65.000.000,00		50.000.000,00		10.000.000,00		150.000.000,00		



Pendampingan dan Bantuan Teknis														
Terlaksananya Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	0	4	50.000.000,00	4	65.000.000,00	4	50.000.000,00	4	10.000.000,00	4	150.000.000,00		
2.13.04.1.01.0015 - Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				3.050.000.000,00		1.950.000.000,00		2.000.000.000,00		2.500.000.000,00		2.600.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	4	4	3.050.000.000,00	4	1.950.000.000,00	4	2.000.000.000,00	4	2.500.000.000,00	4	2.600.000.000,00		
2.13.04.1.01.0016 - Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa				350.000.000,00		350.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		500.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	45	4	350.000.000,00	4	350.000.000,00	4	400.000.000,00	4	400.000.000,00	4	500.000.000,00		
2.13.04.1.01.0018 - Fasilitas Pencatatan Data				172.821.669,00		180.000.000,00		185.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		



dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota														
Terlaksananya Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota	0	4	172.821.669,0 0	4	180.000.000,0 0	4	185.000.000,0 0	4	200.000.000,0 0	4	200.000.000,0 0		
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				6.875.000.000 ,00		6.130.000.000 ,00		6.200.000.000 ,00		7.105.000.000 ,00		7.300.000.000 ,00		
Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan.	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	70	74	6.875.000.000 ,00	76	6.130.000.000 ,00	78	6.200.000.000 ,00	80	7.105.000.000 ,00	82	7.300.000.000 ,00	2.13.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	70	74		76		78		80		82			
2.13.05.1.01 - Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	70	74	6.875.000.000 ,00	76	6.130.000.000 ,00	78	6.200.000.000 ,00	80	7.105.000.000 ,00	82	7.300.000.000 ,00		



Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
Terlaksananya pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	5	4	6.875.000.000,00	4	6.130.000.000,00	4	6.200.000.000,00	4	7.105.000.000,00	4	7.300.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1	4		4		4		4		4			
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan	190	50		50		50		50		50			



	kapasitas Kelembagaannya												
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1	4		4		4		4		4		
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1	4		4		4		4		4		
2.13.05.1.01.0002 - Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan				1.000.000.000 ,00		600.000.000,0 0		500.000.000,0 0		700.000.000,0 0		750.000.000,0 0	



dan Masyarakat Hukum Adat														
Terlaksananya Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1	4	1.000.000.000,00	4	600.000.000,00	4	500.000.000,00	4	700.000.000,00	4	750.000.000,00		
2.13.05.1.01.0003 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				2.500.000.000,00		1.705.000.000,00		1.800.000.000,00		2.155.000.000,00		2.200.000.000,00		
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan	190	50	2.500.000.000,00	50	1.705.000.000,00	50	1.800.000.000,00	50	2.155.000.000,00	50	2.200.000.000,00		



	kapasitas Kelembagaannya													
2.13.05.1.01.0005 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				1.175.000.000 ,00		1.000.000.000 ,00		550.000.000,0 0		800.000.000,0 0		850.000.000,0 0		
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1	4	1.175.000.000 ,00	4	1.000.000.000 ,00	4	550.000.000,0 0	4	800.000.000,0 0	4	850.000.000,0 0		
2.13.05.1.01.0006 - Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				850.000.000,0 0		900.000.000,0 0		850.000.000,0 0		850.000.000,0 0		900.000.000,0 0		
Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1	4	850.000.000,0 0	4	900.000.000,0 0	4	850.000.000,0 0	4	850.000.000,0 0	4	900.000.000,0 0		
2.13.05.1.01.0008 - Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa				350.000.000,0 0		425.000.000,0 0		500.000.000,0 0		600.000.000,0 0		600.000.000,0 0		
Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan	5	4	350.000.000,0 0	4	425.000.000,0 0	4	500.000.000,0 0	4	600.000.000,0 0	4	600.000.000,0 0		



Ketentruman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Ketentruman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa													
2.13.05.1.01.0009 - Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				1.000.000.000,00		1.500.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1	1	1.000.000.000,00	1	1.500.000.000,00	1	2.000.000.000,00	1	2.000.000.000,00	1	2.000.000.000,00		



Tabel 4.4 Program perangkat daerah dalam mendukung program prioritas daerah

No	Program Prioritas Daerah (Huma Betang)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
1	Insentif kepala desa, BPD, Damang, Mantir, dan RT/RW se Kalimantan Tengah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program administrasi pemerintahan desa</li> <li>• Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</li> <li>• Sub Kegiatan Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis</li> </ul>

Tabel 4.5 Sub kegiatan prioritas perangkat daerah dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
<b>2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>				
1.	2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.	2.13.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	



			2.13.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Permendagri no. 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
			2.13.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			2.13.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	UU no. 5 tahun 2014 tentang kedudukan, hak, kewajiban dan fungsi pegawai ASN.
			2.13.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			2.13.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Perpres no. 39 tahun 2019 tentang satu data indonesia.
2.	2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA	Meningkatnya kualitas penataan desa.	2.13.02.1.01 - Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	
			2.13.02.1.01.0001 - Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan	Permendagri no. 1 tahun 2017 tentang penataan desa.



			Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi	
			2.13.02.1.01.0002 - Fasilitas Kelembagaan Desa dan Desa Adat	Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat.
3.	2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	2.13.03.1.01 - Fasilitas Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	
			2.13.03.1.01.0001 - Fasilitas Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Permendagri no. 96 tahun 2017 tentang tata cara kerja sama desa di bidang pemerintahan desa.
			2.13.03.1.01.0002 - Fasilitas Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Permendagri no. 96 tahun 2017 tentang tata cara kerja sama desa di bidang pemerintahan desa.
			2.13.03.1.01.0003 - Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	Permendes PDDT no. 5 tahun 2016 tentang pembangunan kawasan perdesaan.
4.	2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.	2.13.04.1.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	
			2.13.04.1.01.0001 - Fasilitas Penyusunan	Permendagri no. 120 tahun 2018 tentang perubahan atas



			Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa	permendagri no. 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah.
			2.13.04.1.01.0002 - Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Permendagri no. 47 tahun 2016 tentang administrasi pemerintahan desa.
			2.13.04.1.01.0003 - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	- Peraturan pemerintah no. 47 tahun 2015 tentang perubahan atas PP no. 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan UU no. 6 tahun 2014 tentang desa.- Permendagri no. 44 tahun 2016 tentang kewenangan desa.- Permendagri no. 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di desa.
			2.13.04.1.01.0004 - Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	Permendes PDTT no. 21 tahun 2020 tentang pedoman umum pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
			2.13.04.1.01.0005 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Permendagri no. 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.
			2.13.04.1.01.0006 - Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Permendagri no. 3 tahun 2024 tentang perubahan atas permendagri no. 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa.



			<p>2.13.04.1.01.0007 - Fasilitasi Pemilihan, Pangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa</p>	<p>- Permendagri no. 65 tahun 2017 tentang perubahan atas permendagri no. 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa.</p> <p>- Permendagri no. 66 tahun 2017 tentang perubahan atas permendagri no. 82 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.</p>
			<p>2.13.04.1.01.0008 - Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan</p>	<p>Permendagri no. 13 tahun 2007 tentang penyelenggaraan perlombaan desa dan kelurahan.</p>
			<p>2.13.04.1.01.0009 - Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan</p>	<p>- Permendagri no. 12 tahun 2007 tentang pedoman penyusunan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan.</p> <p>- Permendagri no. 84 tahun 2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa.</p>
			<p>2.13.04.1.01.0010 - Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa</p>	<p>- UU no. 3 tahun 2004 tentang perubahan kedua atas UU no. 6 tahun 2014 tentang desa. - Permendagri no. 67 tahun 2017 tentang perubahan atas permendagri no. 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.</p>



			2.13.04.1.01.0011 - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Permendagri no. 110 tahun 2016 tentang badan permusyawaratan desa (BPD).
			2.13.04.1.01.0012 - Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	Program prioritas insentif kepala desa, anggota BPD, damang, mantir dan RT/RW se Kalteng.
			2.13.04.1.01.0015 - Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	- Peraturan pemerintah no. 11 tahun 2021 tentang BUMDes.  - Permendes PDTT no. 3 tahun 2021 tentang pendaftaran, pendataan dan pemeringkatan, pembinaan dan pengembangan, dan pengadaan barang dan/atau jasa BUMDes/BUMDesma.
			2.13.04.1.01.0016 - Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Permendagri no. 45 tahun 2016 tentang pedoman penetapan dan penegasan batas desa.
5.	2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	2.13.05.1.01 - Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum	



		dalam pembangunan.	Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
			2.13.05.1.01.0002 - Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Permendagri no. 13 tahun 2024 tentang pos pelayanan terpadu (POSYANDU).
			2.13.05.1.01.0003 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Perpres no. 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Pekerjaan : Kader Pembangunan Manusia.
			2.13.05.1.01.0005 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	- Inpres no. 8 tahun 2025 tentang optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan



			dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	ekstrem.- Permendagri no 19 tahun 2007 tentang pelatihan pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan.
			2.13.05.1.01.0006 - Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Permendes PDTT no. 23 tahun 2017 tentang pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan SDA desa.
			2.13.05.1.01.0008 - Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	<p>- Ketahanan pangan &amp; gizi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU no. 6 tahun 2014 ttg desa.</li> <li>2. UU no. 18 tahun 2012 ttg pangan.</li> <li>3. Perpres no. 83 tahun 2017 ttg kebijakan strategis pangan &amp; gizi.</li> <li>4. Permendes PDTT no. 21 tahun 2020 ttg pedoman umum pembangunan desa &amp; pemberdayaan masyarakat desa.</li> <li>5. Permendagri no. 13 tahun 2024 ttg pos pelayanan terpadu (POSYANDU).</li> <li>6. SK Gubernur ttg TP POSYANDU.</li> </ol>
				<p>- Ketahanan politik :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU no. 6 tahun 2014 ttg desa.</li> <li>2. UU no. 7 tahun 2017 ttg pemilu.</li> <li>3. Permendes PDTT no. 21 tahun 2020 ttg pedoman umum pembangunan desa &amp; pemberdayaan masyarakat desa.</li> </ol>



				<p>- Ketahanan iklim &amp; mitigasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU no. 24 tahun 2007 ttg penanggulangan bencana.</li> <li>2. UU no. 32 tahun 2009 ttg perlindungan &amp; pengelolaan lingkungan hidup.</li> <li>3. UU no. 6 tahun 2014 ttg desa.</li> <li>4. Permendes PDTT no. 21 tahun 2020 ttg pedoman umum pembangunan desa &amp; pemberdayaan masyarakat desa.</li> <li>5. Kepmendes PDTT no. 71 tahun 2021 ttg panduan penanganan bencana alam.</li> </ol>
				<p>- Ketahanan sosial &amp; ekonomi masyarakat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU no. 6 tahun 2014 ttg desa.</li> <li>2. PP no. 11 tahun 2021 ttg BUMDes.</li> <li>3. Permendagri no. 44 tahun 2016 ttg kewenangan desa.</li> <li>4. Permendes PDTT no. 21 tahun 2020 ttg pedoman umum pembangunan desa &amp; pemberdayaan masyarakat desa.</li> <li>5. Permenkumham no. 3 tahun 2021 ttg paralegal dalam pemberian bantuan hukum.</li> </ol>
			<p>2.13.05.1.01.0009 - Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga</p>	<p>- Perpres no. 99 tahun 2017 tentang gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.</p> <p>- Permendagri no. 36 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan perpres no. 99 tahun 2017</p>



				tentang gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.
--	--	--	--	--

#### 4.4 TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 – 2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERANGKAT DAERAH.

Berikut target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025 – 2029 melalui indikator kinerja utama (IKU) :

*Tabel 4.6 Indikator Kinerja Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
<b>2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>										
<b>I</b>	<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>									
1	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga	Persentase	1	1	1	1	1	1	1	
<b>II</b>	<b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>									
1	Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks	0,718	0,728	0,738	0,748	0,758	0,768	0,778	



2	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	3,77	2	2	2	2	2	2	
<b>III</b>	<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>									
1	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase	90	91	92	93	94	95	96	
<b>IV</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KUNCI</b>									
1	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Persentase	10	10	10	10	10	10	10	
2	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	Persentase	70	72	74	76	78	80	82	
3	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	Persentase	0	0	74	76	78	80	82	
4	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	Persentase	70	72	74	76	78	80	82	



5	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	Persentase	70	72	74	76	78	80	82	
6	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	Persentase	70	72	74	76	78	80	82	

*Tabel 4.7 Indikator Kinerja Utama Dinas PMD Prov. Kalteng*

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
2.	Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks	0,718	0,728	0,738	0,748	0,758	0,768	0,778	
3.	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase	90	91	92	93	94	95	96	
4.	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	3,77	2	2	2	2	2	2	
5.	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga	Persentase	1	1	1	1	1	1	1	



#### 4.5 TARGET KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025 – 2029 MELALUI INDIKATOR KUNCI (IKK)

Berikut target kinerja penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa tahun 2025 – 2029 melalui indikator kinerja kunci (IKK) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah.

*Tabel 4.8 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas PMD Prov. Kalteng*

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA										
2.	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	positif	Persentase	70	72	74	76	78	80	82	
3.	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	positif	Persentase	10	10	10	10	10	10	10	
4.	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	positif	Persentase	0	0	74	76	78	80	82	
5.	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	positif	Persentase	70	72	74	76	78	80	82	



6.	Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa	positif	Persentase	70	72	74	76	78	80	82	
7.	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	positif	Persentase	70	72	74	76	78	80	82	

*Tabel 4.9 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Provinsi Kalimantan Tengah terhadap Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*

No	Indikator	Satuan	Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase pengentasan desa tertinggal	Persentase	17,81	21,87	20	25	33,33	50
2	Persentase peningkatan status desa mandiri	Persentase	12,14	13,82	16,03	19,09	23,6	30,89



## **BAB V PENUTUP**

Dokumen rencana strategis (Renstra) ini merupakan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah selama lima tahun ke depan, periode 2025 – 2029. Dokumen ini telah secara rinci memberikan gambaran mengenai visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program prioritas hingga pendanaan yang digunakan untuk urusan pemberdayaan masyarakat dan desa di Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya dokumen ini menjadi pedoman menyusun rencana kerja setiap tahunnya bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah. Dan dokumen telah disusun dengan komprehensif untuk memberikan kepastian perencanaan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah.

Menciptakan spirit pembangunan berdasarkan potensi lokal, alokasi sumber daya yang efisien dan mengarusutamakan pada kearifan lokal daerah, haruslah dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang matang dengan pertimbangan dan penilaian yang tepat agar dapat menghasilkan dampak yang besar bagi masyarakat. Upaya ini perlu didukung oleh berbagai pihak, tidak hanya pemerintah provinsi saja, dalam pencapaiannya, termasuk dari pihak masyarakat, komunitas, media, bisnis, akademisi, hingga pihak – pihak berkepentingan lain yang memiliki satu spirit untuk pencapaian visi dan misi daerah dalam RPJMD.

### **5.1 KAJIDAH PELAKSANAAN**

Dokumen perencanaan yang baik adalah dokumen yang dapat dilaksanakan sebagai acuan proses pembangunan daerah. Oleh karena itu, perlu beberapa penekanan skema pelaksanaan dalam setiap



rancangan kebijakan, program, sampai dengan kegiatan dalam renstra yang nantinya akan dilakukan. Beberapa penekanan yang diperlukan tertuang sebagai berikut:

1. Dokumen ini merupakan dokumen acuan bagi pemangku kepentingan untuk melaksanakan pembangunan sekaligus merealisasikan program unggulan kepada masyarakat.
2. Penyusunan arah kebijakan dalam dokumen ini dilakukan secara *cascading* dengan memperhatikan arahan nasional dalam RPJMN Tahun 2025 – 2029 sekaligus RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 – 2045 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 – 2029 sehingga dokumen ini telah sinkron dengan dokumen perencanaan pembangunan di level atasnya.
3. Mengacu pada RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah periode I Tahun 2025 – 2029, yang menjadi perodesasi pembangunan adalah penguatan pondasi sebagai upaya transformasi dalam proses pembangunan, perbaikan maupun pengembangan sektor – sektor mendasar mencakup aspek infrastruktur dasar, kualitas sumber daya manusia hingga aspek lingkungan dalam mendukung pembangunan sebagaimana tercantum dalam rancangan teknokratik RPJMN Tahun 2025 – 2029 sebagai lumbung pangan nasional dan pusat konservasi internasional.
4. Perbaikan basis data pembangunan yang terintegrasi antarbidang perlu dilakukan untuk memudahkan proses monitoring dan evaluasi pembangunan ke depan, termasuk kerjasama dengan instansi vertikal pemerintah pusat di daerah dalam pengukuran indikator di dalam data.
5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pengendalian pembangunan harus dilakukan secara konsisten dan tepat waktu sebagai proses pengendalian pembangunan daerah agar sesuai dengan tujuan dan target pembangunan.



## 5.2 SKEMA MONITORING DAN EVALUASI

Proses monitoring dan evaluasi perlu dilakukan dalam rangka pengendalian proses pembangunan daerah serta pemantauan capaian target pembangunan sebagaimana telah dalam dokumen renstra ini. Terdapat tiga jenis monitoring dan evaluasi yang harus dilaksanakan, yaitu proses monitoring yang dilakukan setiap tahun yang juga diselenggarakan dengan proses pelaksanaan rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah setiap tahunnya, proses peninjauan kembali yang dapat dilakukan ketika terjadi kondisi *force majeure* selama masa pembangunan, dan proses evaluasi yang harus dilakukan sebelum proses perencanaan renstra pada periode selanjutnya.

Tabel 5.1 Skema pelaksanaan monitoring dan evaluasi Renstra Dinas PMD  
Prov. Kalteng Tahun 2025 – 2029

No	Jenis	Waktu					Target
		2025	2026	2027	2028	2029	
1	Monitoring	V	V	V	V		Penyelarasan pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam renstra; beserta monitoring capaian indikator kinerja dalam renstra.



No	Jenis	Waktu					Target
		2025	2026	2027	2028	2029	
2	Peninjauan Kembali/ Pengendalian			V			Review terhadap dokumen renstra dapat dilakukan jika terjadi kondisi <i>force majeure</i> yang tidak bisa dihindarkan.
3	Evaluasi					V	Evaluasi dilakukan untuk menilai pencapaian target arah pembangunan dan pencapaian target indikator pembangunan, sebelum proses perencanaan renstra periode selanjutnya dilaksanakan.

Selain itu, pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen renstra nantinya harus dilakukan dengan prinsip demokratis, artinya dapat melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah. Hal ini difungsikan untuk meningkatkan partisipasi pembangunan oleh berbagai pihak. Beberapa forum dapat dirancang dalam upaya



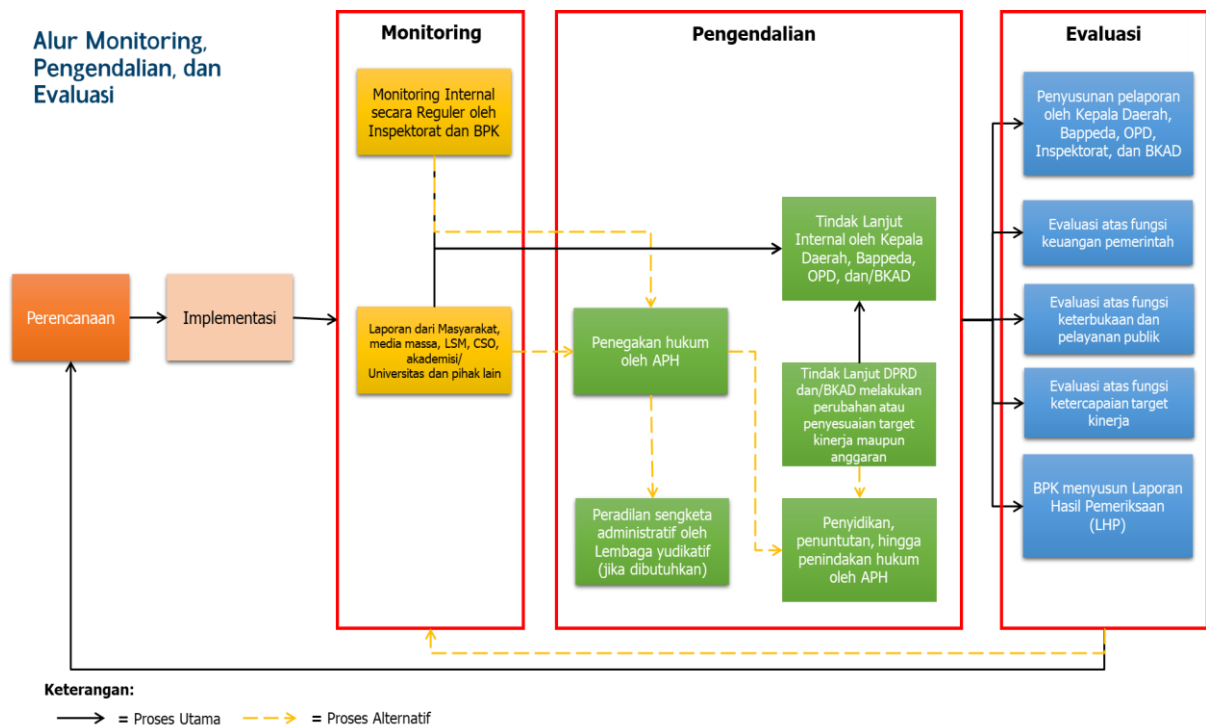
meningkatkan partisipasi pembangunan untuk dapat mengevaluasi ketercapaian pembangunan setiap tahunnya.

Tabel 5.2 Jenis forum monitoring dan evaluasi Renstra tahun 2025 – 2029

No	Jenis Forum Monev	Sasaran Forum Monev	Waktu Pelaksanaan
1	Monitoring OPD lintas kabupaten/kota	Pelaksanaan monitoring dilakukan pada internal OPD lintas kabupaten/kota.	Dilaksanakan pada setiap tahun.
2	Publikasi dan sosialisasi capaian kinerja pembangunan daerah	Skema ini dilaksanakan dengan sasaran melakukan komunikasi dengan masyarakat terkait hasil pembangunan daerah yang telah dilaksanakan	Dilaksanakan pada setiap tahun.

Dengan demikian, proses *monitoring*, *pengendalian*, dan *evaluasi* membentuk suatu siklus yang berkesinambungan dan saling menguatkan. Ketiganya tidak berdiri sendiri, melainkan saling terhubung dalam sistem perencanaan pembangunan.





Gambar 5.1 Alur pendetailan monitoring, pengendalian dan evaluasi

**Monitoring** dimulai dengan proses pengawasan dan pelaporan, yakni:

1. Aktor pengawasan seperti Inspektorat dan BPK berperan melakukan pengawasan internal atas pelayanan dan keterbukaan publik, fungsi keuangan pemerintah, ketercapaian target kinerja, dan lain sebagainya. Lembaga pengawas tersebut dapat melakukan audit, review, hingga observasi lapangan.
2. Bersamaan, sebelum, atau sesudahnya dapat dilakukan pelaporan oleh masyarakat, media massa, LSM, CSO, dan akademisi/ universitas. Mereka memberikan laporan berupa keluhan, kritik, indikasi penyimpangan, atau hasil riset terhadap implementasi program. Kedua jalur ini (pengawasan dan pelaporan) membentuk satu rantai deteksi awal yang bisa saling menguatkan. Laporan masyarakat bisa menjadi input bagi Inspektorat atau BPKP untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Begitu pula sebaliknya, hasil



audit dapat memicu keterlibatan media dan masyarakat dalam menyuarakan temuan atau ketidakberesan.

Setelah temuan teridentifikasi, masuk tahap **pengendalian** untuk mencegah, memperbaiki, dan menindaklanjuti.

1. Kepala Daerah, Bapperida, OPD dan BKAD akan menindaklanjuti monitoring internal secara regular yang dilakukan oleh Inspektorat maupun BPK. Kepala Daerah, Bapperida, OPD dan BKAD bertanggung jawab untuk menyesuaikan pelayanan dan keterbukaan publik, keuangan pemerintah, target kinerja, hingga arah pelaksanaan program/kegiatan berdasarkan hasil temuan, rekomendasi, atau masukan.
2. DPRD dan BKAD kemudian melakukan penyesuaian, atau penundaan alokasi anggaran untuk program atau kegiatan yang bermasalah serta penyesuaian target kinerja. DPRD memanfaatkan temuan dari proses monitoring untuk menekan perbaikan anggaran dalam siklus anggaran tahun berjalan atau berikutnya.
3. Jika dalam proses monitoring terdapat dugaan pelanggaran atau penyimpangan, maka akan masuk ke fase penegakan hukum awal:
  - Aktor penegak hukum (APH) dapat mulai menyelidiki kasus, baik berdasarkan laporan resmi dari APIP maupun hasil investigasi masyarakat/sumber lain.
  - Pada tahap ini, keterlibatan aktor penegak hukum bersifat respon terhadap indikasi awal pelanggaran.
4. Apabila muncul sengketa administratif atau hukum terkait hasil monitoring (misal: keberatan atas temuan atau sanksi), maka aktor peradilan sengketa yakni lembaga yudikatif akan masuk. Lembaga Yudikatif menjadi ruang penyelesaian formal jika ada konflik hukum antara pemerintah dan pihak lain berdasarkan hasil monitoring.



5. Jika ditemukan pelanggaran serius (korupsi, penyalahgunaan wewenang, atau pelanggaran hukum lainnya), maka aktor penegakan hukum kembali aktif:
  - APH akan melanjutkan proses ke tahap penyidikan, penuntutan, hingga penindakan hukum.
  - Proses ini berjalan paralel atau lanjutan dari temuan monitoring, khususnya jika ada indikasi tindak pidana.

Selanjutnya, **Evaluasi** dilakukan setelah satu periode pelaksanaan program/kegiatan selesai, baik tahunan maupun akhir periode renstra/renja dengan didasarkan pada hasil monitoring regular maupun temuan lembaga pengawas. Detailnya:

1. Kepala Daerah, Bappeda, OPD, Inspektorat, dan BKAD menyusun laporan evaluasi internal secara regular yang berkaitan dengan ketercapaian target kinerja, fungsi keuangan pemerintah, keterbukaan dan pelayanan publik.
2. Sementara itu, lembaga pengawas yang berwenang juga dapat melakukan evaluasi atas ketercapaian target kinerja, fungsi keuangan pemerintah, keterbukaan dan pelayanan publik.
3. BPK secara regular juga akan menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang menjadi dasar akuntabilitas kepada DPR/ DPRD.

Hasil evaluasi kemudian akan menjadi bahan perbaikan dan perencanaan ke depan. Selain itu, hasil evaluasi juga digunakan untuk menilai keberhasilan program. Jika terdapat temuan pelanggaran atau kegagalan kinerja, maka hasil evaluasi bisa kembali masuk ke siklus monitoring dan pengendalian baru, menciptakan *loop* perbaikan berkelanjutan. Namun, jika tidak ditemukan pelanggaran maka hasil evaluasi menjadi masukan dalam perencanaan dan/ implementasi.



### **5.3 REVIU APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH (APIP) TERHADAP RANHIR RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 – 2029**

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **0** catatan yang selaras dan **27** catatan yang tidak selaras. **27** catatan tidak selaras dikarenakan belum melengkapi Satuan dan Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) secara lengkap untuk tahun 2022 – 2024 sebagai bahan pembandingan untuk menetapkan target kinerja dan satuan yang digunakan dalam dokumen Renstra Periode 2025 – 2029.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah kepada tim reviu diketahui bahwa :

- a. Telah dilakukan pengisian data statistik sektoral daerah sesuai data yang ada pada aplikasi E – Walidata yaitu sebanyak **31** data untuk tahun 2020 – 2024, namun pada aplikasi SPID e – Reviu Perencanaan terdapat **27** nama DSSD 2022 – 2024.
- b. Pengisian DSSD telah diinput untuk Tahun 2020 – 2024, namun pada aplikasi SPID e – Reviu tidak muncul/tersaji DSSD 2024.

Berdasarkan hasil reviu Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 – 2029 disarankan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah untuk :

- a. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah teknis, terkait sinkronisasi dan integrasi DSSD dengan dokumen perencanaan.
- b. Menjadikan Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) untuk tahun 2022 – 2024 sebagai bahan pembandingan untuk menetapkan target kinerja dan satuan yang digunakan dalam dokumen Renstra Periode 2025 – 2029.



- c. Dalam penyusunan Renstra agar mempedomani ketentuan yang berlaku tentang Pedoman Penyusunan Renstra 2025 – 2029 serta ketentuan lainnya.
- d. Memastikan keterhubungan program prioritas daerah dan program prioritas perangkat daerah dimuat pada saat penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan diantaranya Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, Rencana Kerja Tahunan, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja (dokumen yang berisi kesepakatan antara atasan dan bawahan tentang target kinerja yang harus dicapai dalam periode tertentu). Penjelasan keterkaitan dengan RPJMD sebaiknya ditulis lebih rinci sehingga memudahkan proses monitoring, evaluasi, reviu dan penilaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

#### **5.4 KINERJA RENSTRA PD PER URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa memiliki tujuan dan *outcome* yang disesuaikan dengan konteks daerah masing – masing . Adapun diantaranya sebagai berikut :



Tabel 5.3 Indikator Kinerja Utama pada Dinas PMD Prov. Kalteng Periode 2025 – 2030.

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE OUTPUT 2024	TARGET OUTPUT						KONDISI AKHIR OUTPUT	KETERANGAN ANALISIS
						2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa.		Indeks Desa Membangun (IDM)	Skor	0,718	0,728	0,738	0,748	0,758	0,768	0,778	0,778	Skor Indeks Desa Membangun (IDM) dari hasil peringkat status IDM Provinsi yang dikeluarkan oleh Kemendes PDT pada tahun berjalan.  Untuk selanjutnya akan ada penyesuaian yang dikarenakan adanya perubahan nama dari Indeks Desa Membangun menjadi Indeks Desa, dimana secara penilaian pun mengalami perubahan, semula menggunakan tiga dimensi menjadi enam dimensi, yaitu layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan tata kelola pemerintahan desa.
a		Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa.	Persentase peningkatan status desa mandiri.	Persen	3,77%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	12%	<p><b>Dasar perhitungan :</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <math display="block">\frac{\sum \text{peningkatan status desa dari berkembang/maju ke desa mandiri}}{\sum \text{Desa Berkembang/maju}} \times 100\%</math> </div> <p>Peningkatan mengacu pada perubahan dari satu kategori status ke kategori yang lebih tinggi. Persentase peningkatan dihitung untuk menunjukkan seberapa besar perubahan yang terjadi dalam bentuk persentase dengan membandingkan jumlah desa yang telah meningkat statusnya dengan total desa yang dievaluasi.</p> <p>Peningkatan status desa yang dimaksud adalah dari desa berkembang/maju menuju desa mandiri. Jumlah peningkatan status</p>



													desa pada tahun berjalan dan bukan akumulasi dari tahun sebelumnya.  Adapun basis data berasal dari Indeks Desa Membangun (IDM) yang merupakan hasil pendataan yang dilakukan oleh desa yang dikelola oleh kemendes PDT.
b		Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa.	Persentase fasilitasi pemberdayaan lembaga	Persen	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	6%	<p><b>Dasar perhitungan :</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <math display="block">\frac{\sum \text{ lembaga desa yg difasilitasi tahun } n}{\sum \text{ lembaga desa tahun } n} \times 100\%</math> </div> <p>Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang dibina pada tahun berjalan dan bukan akumulasi dari tahun sebelumnya. Adapun lembaga desa yang dibina adalah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Posyandu;</li> <li>2. Posyantek;</li> <li>3. PKK; dan</li> <li>4. BUMDes.</li> </ol>
c		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada perangkat daerah.	Kinerja penyelenggaraan pemerintahan.	Persen	90	91	92	93	94	95	96	96	<p><b>Dasar perhitungan :</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <math display="block">\frac{\sum \text{ realisasi pelaksanaan program}}{\sum \text{ target pelaksanaan program}} \times 100\%</math> </div> <p>Realisasi program yang berada pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa tahun berjalan dan bukan akumulasi dari tahun sebelumnya.</p>



Tabel 5.4 Indikator Kinerja Utama pada Program/Kegiatan/Subkegiatan Dinas PMD Prov. Kalteng Periode 2025 – 2030

NO	KODE REKENING	URAIAN	SATUAN	BASE LINE OUTPUT 2024	TARGET OUTPUT						KONDISI AKHIR OUTPUT	KETERANGAN ANALISIS
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA.										
1	2.13.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI.	Persen	90	91	92	93	94	95	96	96	<p><b>Dasar perhitungan :</b></p> $\frac{\text{Skor SAKIP tahun } n}{\text{Rentang minimum SAKIP (kategori B)}} \times 100\%$ <p>Indikator skor SAKIP pada Laporan Hasil Evaluasi (LHE) perangkat daerah tahun berjalan. Untuk kategori B memiliki rentang nilai antara 60 - 70, sehingga menggunakan rentang minimum sebagai pembagi yang kemudian dikalikan 100 untuk mendapatkan persentasenya.</p>
	2.13.1.1.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH.	Persen	90	91	92	93	94	95	96	96	<p><b>Dasar perhitungan :</b></p> $\frac{\sum \text{Realisasi pelaksanaan sub kegiatan}}{\sum \text{Target pelaksanaan sub kegiatan}} \times 100\%$ <p>Realisasi sub kegiatan yang berada di bawah kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja</p>



												<i>perangkat daerah pada tahun berjalan dan bukan akumulasi dari tahun sebelumnya.</i>	
	2.13.1.1.01.001	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH.	DOKUMEN	3	3	2	2	2	2	2	2	13	Dokumen yang disusun pada tahun berjalan adalah 1. RENSTRA 2025 - 2029/2030; 2. Perubahan Renja; dan 3. Renja.
	2.13.1.1.01.002	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA - SKPD.	DOKUMEN	0	0	0	2	2	2	2	2	10	Dokumen yang disusun pada tahun berjalan adalah 1. RKA Murni; dan 2. RKA mendahului perubahan.
	2.13.1.1.01.004	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN DPA - SKPD.	DOKUMEN	2	2	2	2	2	2	2	2	12	Dokumen yang disusun pada tahun berjalan adalah 1. DPA Murni; dan 2. DPA mendahului perubahan.
	2.13.1.1.01.005	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD.	DOKUMEN	1	1	1	1	1	1	1	1	6	Dokumen yang disusun pada tahun berjalan adalah Perubahan DPA.
	2.13.1.1.01.006	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD.	LAPORAN	8	8	8	8	8	8	8	8	48	Dokumen yang disusun pada tahun berjalan adalah 1. perjanjian kinerja; 2. perjanjian kinerja perubahan; 3. rencana aksi kinerja (triwulan I, II, III & IV); 4. LKIP tahunan; dan 5. LPPD.
	2.13.1.1.01.007	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH.	LAPORAN	3	3	3	3	3	3	3	3	18	Dokumen yang disusun pada tahun berjalan adalah laporan pelaksanaan kegiatan rapat teknis, evaluasi & koordinasi.



	2.13.1.1.02	<b>ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH.</b>	<b>Persen</b>	<b>90</b>	<b>91</b>	<b>92</b>	<b>93</b>	<b>94</b>	<b>95</b>	<b>96</b>	<b>96</b>	<b>Dasar perhitungan :</b>  $\frac{\Sigma \text{ Realisasi pelaksanaan sub kegiatan}}{\Sigma \text{ Target pelaksanaan sub kegiatan}} \times 100\%$ <i>Realisasi sub kegiatan yang berada di bawah kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah pada tahun berjalan dan bukan akumulasi dari tahun sebelumnya.</i>
	2.13.1.1.02.001	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN.	ORANG/ BULAN	46	76	80	98	105	110	113	113	Sesuai dengan kebutuhan jumlah ASN DPMD pada tahun berjalan.  Angka merupakan jumlah ASN yg menerima gaji dan tunjangan. Angka dimaksud belum dikalikan 14, dimana untuk gaji 12 bulan + 1 gaji ke13 + 1 gaji ke14.  Jumlah ASN yang dimaksud adalah 1. PNS & PPPK lama; 2. PNS & PPPK pindahan; 3. PNS & PPPK baru.
	2.13.1.1.02.003	PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/ VERIFIKASI KEUANGAN SKPD.	DOKUMEN	12	12	12	12	12	12	12	72	Setiap bulan melakukan verifikasi laporan keuangan bulanan. Dokumen laporan keuangan yang diverifikasi adalah laporan keuangan januari s.d. desember pada tahun berjalan.
	2.13.1.1.02.005	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD.	LAPORAN	4	1	1	1	1	1	1	6	Dokumen yang disusun pada tahun berjalan adalah 1. laporan keuangan akhir tahun; dan 2. hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun.
	2.13.1.1.02.007	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	LAPORAN	10	4	4	4	4	4	4	24	Dokumen yang disusun pada tahun berjalan adalah laporan keuangan triwulan.



		BULANAN/TRIWULAN/SEMESTERAN/SKPD.										
	<b>2.13.1.1.03</b>	<b>ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH.</b>	<i>Persen</i>	<b>90</b>	<b>91</b>	<b>92</b>	<b>93</b>	<b>94</b>	<b>95</b>	<b>96</b>	<b>96</b>	<b>Dasar perhitungan :</b>  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 5px auto;"> <math display="block">\frac{\Sigma \text{ Realisasi pelaksanaan sub kegiatan}}{\Sigma \text{ Target pelaksanaan sub kegiatan}} \times 100\%</math> </div> <p><i>Realisasi sub kegiatan yang berada di bawah kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada tahun berjalan dan bukan akumulasi dari tahun sebelumnya.</i></p>
	2.13.1.1.03.0001	PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD.	DOKUMEN	2	2	2	2	2	2	2	12	Dokumen yang disusun pada tahun berjalan adalah 1. perencanaan kebutuhan murni; dan 2. perencanaan perubahan kebutuhan BMD.
	2.13.1.1.03.0002	PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD.	DOKUMEN	1	1	1	1	1	1	1	6	Dokumen yang disusun pada tahun berjalan adalah pengamanan barang milik daerah.
	2.13.1.1.03.0006	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD.	LAPORAN	2	2	2	2	2	2	2	12	Dokumen yang disusun pada tahun berjalan adalah 1. penatausahaan BMD murni; dan 2. perubahan penatausahaan BMD.



	2.13.1.1.05	<b>ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH.</b>	<b>Persen</b>	<b>90</b>	<b>91</b>	<b>92</b>	<b>93</b>	<b>94</b>	<b>95</b>	<b>96</b>	<b>96</b>	<b>Dasar perhitungan :</b>
												$\frac{\Sigma \text{ Realisasi pelaksanaan sub kegiatan}}{\Sigma \text{ Target pelaksanaan sub kegiatan}} \times 100\%$ <p><i>Realisasi sub kegiatan yang berada di bawah kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah pada tahun berjalan dan bukan akumulasi dari tahun sebelumnya.</i></p>
	2.13.1.1.05.0002	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA.	PAKET	1	1	1	1	1	1	1	6	Sesuai dengan kebutuhan jumlah ASN DPMD pada tahun berjalan.
	2.13.1.1.05.0003	PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN.	DOKUMEN	10	12	12	12	12	12	12	72	Dokumen yang disusun pada tahun berjalan adalah 1. SKP ASN, diinput serta diunggah e-kinerja; 2. KP4 ASN, pembaharuan data pegawai; 3. Inventarisasi kebutuhan diklat pegawai; 4. Input kepemilikan sertifikat diklat pegawai pada siapASN; 5. Pengajuan kenaikan pangkat ASN; 6. Pengajuan pensiun ASN; 7. Pengajuan Ijin Belajar Pegawai; 8. Pengajuan Tugas Belajar Pegawai; 9. Pengajuan Penyesuaian Ijazah Pegawai; 10. Pengajuan Cuti Pegawai.
	2.13.1.1.05.0009	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.	ORANG	20	20	20	20	20	20	20	120	Sesuai dengan kebutuhan jumlah ASN DPMD pada tahun berjalan.
	2.13.1.1.05.0010	SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN.	ORANG	0	0	0	5	5	5	5	20	Sesuai dengan kebutuhan jumlah ASN DPMD pada tahun berjalan.



	2.13.1.1.05.0011	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.	ORANG	20	20	10	10	10	10	10	70	Sesuai dengan kebutuhan jumlah ASN DPMD pada tahun berjalan.
	<b>2.13.1.1.06</b>	<b>ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH.</b>	<i>Persen</i>	<b>90</b>	<b>91</b>	<b>92</b>	<b>93</b>	<b>94</b>	<b>95</b>	<b>96</b>	<b>96</b>	<p><b>Dasar perhitungan :</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <math display="block">\frac{\sum \text{Realisasi pelaksanaan sub kegiatan}}{\sum \text{Target pelaksanaan sub kegiatan}} \times 100\%</math> </div> <p><i>Realisasi sub kegiatan yang berada di bawah kegiatan administrasi umum perangkat daerah pada tahun berjalan dan bukan akumulasi dari tahun sebelumnya.</i></p>
	2.13.1.1.06.0001	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/ PENERANGAN BANGUNAN KANTOR.	PAKET	1	1	1	1	1	1	1	6	Sesuai dengan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor pada tahun berjalan.
	2.13.1.1.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR.	PAKET	9	5	5	2	2	2	2	18	Sesuai dengan kebutuhan peralatan & perlengkapan kantor pada tahun berjalan.
	2.13.1.1.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN.	PAKET	12	12	12	12	12	12	12	72	Sesuai dengan kebutuhan barang cetakan & penggandaan per bulan pada tahun berjalan.
	2.13.1.1.06.0006	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN	DOKUMEN	1	4	4	4	4	4	4	24	Dokumen yang disusun per triwulan pada tahun berjalan adalah laporan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. Dimana bahan



		PERUNDANG - UNDANGAN.										bacaan dan peraturan perundang-undangan berupa surat kabar elektronik & cetak atau buku elektronik & buku cetak.
	2.13.1.1.06. 0008	FASILITASI KUNJUNGAN TAMU.	LAPORAN	12	12	12	12	12	12	12	72	Dokumen yang disusun pada tahun berjalan adalah laporan fasilitasi kunjungan tamu per bulan.
	2.13.1.1.06. 0009	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD.	LAPORAN	45	12	12	12	12	12	12	72	Dokumen yang disusun pada tahun berjalan adalah laporan rakor & konsultasi SKPD yang dilakukan per bulan.
	2.13.1.1.06. 0010	PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD.	DOKUMEN	0	0	0	12	12	12	12	48	Dokumen yang disusun pada tahun berjalan adalah laporan bulanan penatausahaan arsip dinamis pada SKPD yang dilakukan per bulan.
	2.13.1.1.06. 0011	DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD.	DOKUMEN	3	3	3	3	3	3	3	18	Dokumen yang disusun pada tahun berjalan adalah laporan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik berupa <i>launching</i> & penginputan data ke data sektoral SIDARA, evaluasi data ke data sektoral SIDARA dan SIDARA <i>Award</i> .
	<b>2.13.1.1.07</b>	<b>PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH.</b>	<b>Persen</b>	<b>90</b>	<b>91</b>	<b>92</b>	<b>93</b>	<b>94</b>	<b>95</b>	<b>96</b>	<b>96</b>	<p><b>Dasar perhitungan :</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <math display="block">\frac{\Sigma \text{ Realisasi pelaksanaan sub kegiatan}}{\Sigma \text{ Target pelaksanaan sub kegiatan}} \times 100\%</math> </div> <p><i>Realisasi sub kegiatan yang berada di bawah kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah pada tahun berjalan dan bukan akumulasi dari tahun sebelumnya.</i></p>



	2.13.1.1.07. 0002	PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL.	UNIT	5	3	0	1	1	1	1	7	sesuai dengan kebutuhan kendaraan dinas operasional pada tahun berjalan.
	2.13.1.1.07. 0005	PENGADAAN MEBEL.	PAKET	1	1	1	1	1	1	1	6	sesuai dengan kebutuhan mebel pada tahun berjalan.
	2.13.1.1.07. 0006	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA.	UNIT	100	91	3	39	20	20	20	193	sesuai dengan kebutuhan peralatan & mesin lainnya pada tahun berjalan.
	2.13.1.1.07. 0009	PENGADAAN BANGUNAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA.	UNIT	1	1	0	1	1	1	1	5	sesuai dengan kebutuhan bangunan gedung kantor/bangunan lainnya pada tahun berjalan.
	2.13.1.1.07. 0010	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA.	UNIT	100	27	1	50	53	40	40	211	sesuai dengan kebutuhan sarana & prasarana gedung kantor/bangunan lainnya pada tahun berjalan.
	<b>2.13.1.1.08</b>	<b>PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH.</b>	<b>Persen</b>	<b>90</b>	<b>91</b>	<b>92</b>	<b>93</b>	<b>94</b>	<b>95</b>	<b>96</b>	<b>96</b>	<p><b>Dasar perhitungan :</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <math display="block">\frac{\Sigma \text{ Realisasi pelaksanaan sub kegiatan}}{\Sigma \text{ Target pelaksanaan sub kegiatan}} \times 100\%</math> </div> <p>Realisasi sub kegiatan yang berada di bawah kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah pada tahun berjalan dan bukan akumulasi dari tahun sebelumnya.</p>



2.13.1.1.08.0001	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT.	LAPORAN	100	12	12	12	12	12	12	12	72	sesuai dengan kebutuhan penyediaan surat menyurat yang dilakukan per bulan pada tahun berjalan.
2.13.1.1.08.0002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK.	LAPORAN	3	4	4	4	4	4	4	4	24	Dokumen yang disusun per triwulan pada tahun berjalan adalah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik yang dikeluarkan setiap bulan.
2.13.1.1.08.0004	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR.	LAPORAN	12	12	12	12	12	12	12	12	72	Dokumen yang disusun pada tahun berjalan berupa laporan. Adapun laporan yang dimaksud adalah 1. laporan bulanan honorarium bendahara, pptk, kpa,ppk, tim pengelola website, tenaga administrasi non ASN, tenaga <i>outsourcing</i> (tenaga kebersihan, tenaga keamanan, tenaga supir, tenaga informasi & teknologi). 2. laporan bulanan BPJS Kesehatan. 3. laporan bulanan BPJS Ketenagakerjaan. 4. laporan Pawai budaya.
<b>2.13.1.1.09</b>	<b>PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH.</b>	<i>Persen</i>	<b>90</b>	<b>91</b>	<b>92</b>	<b>93</b>	<b>94</b>	<b>95</b>	<b>96</b>	<b>96</b>	<b>96</b>	<p><b>Dasar perhitungan :</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <math display="block">\frac{\Sigma \text{Realisasi pelaksanaan sub kegiatan}}{\Sigma \text{Target pelaksanaan sub kegiatan}} \times 100\%</math> </div> <p><i>Realisasi sub kegiatan yang berada di bawah kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah pada tahun berjalan dan bukan akumulasi dari tahun sebelumnya.</i></p>
2.13.1.1.09.0001	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS	UNIT	60	28	28	29	29	30	30	30	174	Sesuai dengan kebutuhan kendaraan dinas operasional/lapangan pada tahun berjalan.



		OPERASIONAL ATAU LAPANGAN.										
	2.13.1.1.09.0006	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA.	UNIT	71	20	25	25	30	20	25	145	Sesuai dengan kebutuhan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya pada tahun berjalan.
	2.13.1.1.09.0009	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA.	UNIT	1	1	1	1	1	1	1	1	Sesuai dengan kebutuhan pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya pada tahun berjalan.
	2.13.1.1.09.0011	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA.	UNIT	24	5	10	15	10	10	15	65	Sesuai dengan kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya pada tahun berjalan.
<b>2</b>	<b>2.13.02</b>	<b>PROGRAM PENATAAN DESA.</b>	<b>Persen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74</b>	<b>76</b>	<b>78</b>	<b>80</b>	<b>82</b>	<b>82</b>	<p><b>Dasar perhitungan :</b></p> $\frac{\Sigma \text{ Realisasi pelaksanaan kegiatan}}{\Sigma \text{ Target pelaksanaan kegiatan}} \times 100\%$ <p>Realisasi kegiatan yang berada di bawah program penataan desa pada tahun berjalan dan bukan akumulasi dari tahun sebelumnya.</p>
	<b>2.13.02.1.01</b>	<b>PENATAUSAHAAN PENETAPAN SUSUNAN KELEMBAGAAN, PENGISIAN</b>	<b>Persen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74</b>	<b>76</b>	<b>78</b>	<b>80</b>	<b>82</b>	<b>82</b>	<p><b>Dasar perhitungan :</b></p> $\frac{\Sigma \text{ Realisasi pelaksanaan sub kegiatan}}{\Sigma \text{ Target pelaksanaan sub kegiatan}} \times 100\%$



		<b>JABATAN DAN MASA JABATAN KEPALA DESA DAN DESA ADAT.</b>											<i>Realisasi sub kegiatan yang berada di bawah kegiatan penatausahaan penetapan susunan kelembagaan, pengisian jabatan dan masa jabatan kepala desa dan desa adat pada tahun berjalan dan bukan akumulasi dari tahun sebelumnya.</i>
	2.13.02.1.01 .0001	IDENTIFIKASI, INVENTARISASI DAN FASILITASI PENATAAN KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN DESA ADAT YANG MENJADI KEWENANGAN PROVINSI.	DOKUMEN	0	0	0	4	4	4	4	16		Jumlah dokumen hasil fasilitasi pada triwulan tahun berjalan.
	2.13.02.1.01 .0002	FASILITASI KELEMBAGAAN DESA DAN DESA ADAT.	DOKUMEN	0	0	0	4	4	4	4	16		Jumlah dokumen hasil fasilitasi pada triwulan tahun berjalan.
	2.13.02.1.01 .0003	FASILITASI KABUPATEN/KOTA DAN DESA DALAM RANGKA PENATAAN DESA.	DOKUMEN	0	0	4	4	4	4	4	20		Jumlah dokumen hasil fasilitasi pada triwulan tahun berjalan.
	2.13.02.1.01 .0004	PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA PELAYANAN PEMERINTAHAN DESA.	UNIT	0	0	0	1	1	1	1	4		Sesuai dengan kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan pemerintahan desa pada tahun berjalan.



3	2.13.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA.</b>	Persen	70	72	74	76	78	80	82	82	<p><b>Dasar perhitungan :</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <math display="block">\frac{\Sigma \text{ Realisasi pelaksanaan kegiatan}}{\Sigma \text{ Target pelaksanaan kegiatan}} \times 100\%</math> </div> <p>Realisasi kegiatan yang berada di bawah program peningkatan kerjasama desa pada tahun berjalan dan bukan akumulasi dari tahun sebelumnya.</p>
	2.13.03.1.01	<b>FASILITASI KERJASAMA ANTAR DESA YANG MENJADI KEWENANGAN PROVINSI.</b>	Persen	70	72	74	76	78	80	82	82	<p><b>Dasar perhitungan :</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <math display="block">\frac{\Sigma \text{ Realisasi pelaksanaan sub kegiatan}}{\Sigma \text{ Target pelaksanaan sub kegiatan}} \times 100\%</math> </div> <p>Realisasi sub kegiatan yang berada di bawah kegiatan fasilitasi kerjasama antar desa yang menjadi kewenangan provinsi pada tahun berjalan dan bukan akumulasi dari tahun sebelumnya.</p>
	2.13.03.1.01.0001	FASILITASI KERJASAMA ANTAR DESA LINTAS KABUPATEN/ KOTA.	DOKUMEN	0	0	0	4	4	4	4	16	Dokumen yang disusun per triwulan pada tahun berjalan adalah laporan kerjasama antar desa lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan.
	2.13.03.1.01.0002	FASILITASI KERJASAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA.	DOKUMEN	1	4	4	4	4	4	4	24	Dokumen yang disusun per triwulan pada tahun berjalan adalah laporan kerjasama desa dengan pihak ketiga yang dilaksanakan.
	2.13.03.1.01.0003	FASILITASI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN.	DOKUMEN	1	4	4	4	4	4	4	24	Dokumen yang disusun per triwulan pada tahun berjalan adalah laporan fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan.



4	2.13.04	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA.</b>	Persen	10	10	10	10	10	10	10	10	<p><b>Dasar perhitungan :</b></p> $\frac{\Sigma \text{ aparatur desa anggota BPD terlatih}}{\Sigma \text{ aparatur desa anggota BPD}} \times 100\%$ <p>Realisasi aparatur desa dan anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya pada tahun berjalan dan bukan akumulasi dari tahun sebelumnya. Dengan masing - masing ditargetkan sebesar 5% (lima persen) setiap tahunnya.</p>
			Persen	70	72	74	76	78	80	82	82	<p><b>Dasar perhitungan :</b></p> $\frac{\Sigma \text{ Realisasi pelaksanaan fasilitasi}}{\Sigma \text{ Target pelaksanaan fasilitasi}} \times 100\%$ <p>Realisasi fasilitasi tata kelola desa pada tahun berjalan dan bukan akumulasi dari tahun sebelumnya.</p>
	2.13.04.1.01	<b>PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA.</b>	Persen	70	72	74	76	78	80	82	82	<p><b>Dasar perhitungan :</b></p> $\frac{\Sigma \text{ Realisasi pelaksanaan sub kegiatan}}{\Sigma \text{ Target pelaksanaan sub kegiatan}} \times 100\%$ <p>Realisasi sub kegiatan yang berada di bawah kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa pada tahun berjalan dan bukan akumulasi dari tahun sebelumnya.</p>
	2.13.04.1.01.0001	FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DOKUMEN	80	4	4	4	4	4	4	24	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyusunan perda kabupaten/kota & peraturan bupati/walikota yg mengatur desa pada tahun berjalan dan bukan akumulasi dari tahun sebelumnya yang dilaporkan per triwulan.



		DAN PERATURAN BUPATI/ WALIKOTA YANG MENGATUR DESA.										
	2.13.04.1.01 .0002	PEMBINAAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA.	DOKUMEN	1	4	4	4	4	4	4	24	Jumlah dokumen hasil pembinaan manajemen pemerintahan desa pada tahun berjalan per triwulan.
	2.13.04.1.01 .0003	FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DESA.	DOKUMEN	0	0	4	4	4	4	4	24	Jumlah dokumen produk hukum yang ditetapkan pada tahun berjalan per triwulan.
	2.13.04.1.01 .004	FASILITASI PENYUSUNAN, PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN DESA.	DOKUMEN	0	4	4	4	4	4	4	24	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pada tahun berjalan per triwulan.
	2.13.04.1.01 .0005	FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.	DOKUMEN	1	4	4	4	4	4	4	24	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pada tahun berjalan per triwulan.
	2.13.04.1.01 .0006	FASILITASI PENGELOLAAN ASET DESA.	DOKUMEN	1	4	4	4	4	4	4	24	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pada tahun berjalan per triwulan.
	2.13.04.1.01 .0007	FASILITASI PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN	ORANG	13	100	100	100	100	100	100	600	Sesuai dengan jumlah peserta yang mengikuti pemilihan, pengangkatan & pemberhentian kepala desa pada tahun berjalan dan bukan akumulasi dari tahun sebelumnya.



		PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.											
	2.13.04.1.01 .0008	FASILITASI EVALUASI PERKEMBANGAN DESA SERTA LOMBA DESA DAN KELURAHAN.	DOKUMEN	3	4	4	4	4	4	4	4	24	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pada tahun berjalan per triwulan.
	2.13.04.1.01 .0009	FASILITASI PELAKSANAAN PROFIL DESA DAN KELURAHAN.	DOKUMEN	1	4	4	4	4	4	4	4	24	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pada tahun berjalan per triwulan.
	2.13.04.1.01 .0010	PEMBINAAN APARATUR PEMERINTAH DESA.	ORANG	1621	200	200	250	250	300	300	1500		Jumlah apatur desa yang mendapat pembinaan dan pelatihan pada tahun berjalan dan bukan akumulasi dari tahun sebelumnya.
	2.13.04.1.01 .0011	PEMBINAAN PENINGKATAN KAPASITAS ANGGOTA BPD.	ORANG	142	50	50	50	50	50	50	300		Jumlah anggota BPD yang mendapat pembinaan pada tahun berjalan dan bukan akumulasi dari tahun sebelumnya.
	2.13.04.1.01 .0012	PEMBINAAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA MELALUI BANTUAN KEUANGAN, BANTUAN PENDAMPINGAN DAN BANTUAN TEKNIS.	DOKUMEN	0	4	4	4	4	4	4	4	24	Jumlah dokumen hasil pembinaan pada tahun berjalan per triwulan.



	2.13.04.1.01 .0015	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENETAPAN PENGATURAN BUM DESA KABUPATEN/KOTA DAN LEMBAGA KERJA SAMA ANTAR DESA.	DOKUMEN	4	4	4	4	4	4	4	24	Jumlah dokumen hasil pembinaan & pengawasan pada tahun berjalan per triwulan.
	2.13.04.1.01 .0016	FASILITASI PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA.	DOKUMEN	45	4	4	4	4	4	4	24	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pada tahun berjalan per triwulan.
	2.13.04.1.01 .0018	FASILITASI PENCATATAN DATA DAN INFORMASI MENGENAI PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN/ KOTA.	DOKUMEN	0	4	4	4	4	4	4	24	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pada tahun berjalan per triwulan.
<b>5</b>	<b>2.13.05</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN , LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT.</b>	<b>Persen</b>	<b>70</b>	<b>72</b>	<b>74</b>	<b>76</b>	<b>78</b>	<b>80</b>	<b>82</b>	<b>82</b>	<b>Dasar perhitungan :</b>  $\frac{\Sigma \text{ Realisasi pelaksanaan fasilitasi}}{\Sigma \text{ Target pelaksanaan fasilitasi}} \times 100\%$ <i>Realisasi fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa (LKD) pada tahun berjalan dan bukan akumulasi dari tahun sebelumnya.</i>
			<b>Persen</b>	<b>70</b>	<b>72</b>	<b>74</b>	<b>76</b>	<b>78</b>	<b>80</b>	<b>82</b>	<b>82</b>	



												<p><b>Dasar perhitungan :</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <math display="block">\frac{\Sigma \text{ Realisasi pelaksanaan fasilitasi}}{\Sigma \text{ Target pelaksanaan fasilitasi}} \times 100\%</math> </div> <p>Realisasi fasilitasi pemberdayaan lembaga adat desa dan lembaga masyarakat hukum adat pada tahun berjalan dan bukan akumulasi dari tahun sebelumnya.</p>
	2.13.05.1.01	<b>PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH PROVINSI SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA BERADA DI LINTAS DAERAH KABUPATEN/ KOTA.</b>	Persen	70	72	74	76	78	80	82	82	<p><b>Dasar perhitungan :</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <math display="block">\frac{\Sigma \text{ Realisasi pelaksanaan sub kegiatan}}{\Sigma \text{ Target pelaksanaan sub kegiatan}} \times 100\%</math> </div> <p>Realisasi sub kegiatan yang berada di bawah kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah provinsi serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama berada di lintas daerah kabupaten/kota pada tahun berjalan dan bukan akumulasi dari tahun sebelumnya.</p>
	2.13.05.1.01.0002	FASILITASI PENATAAN, PEMBERDAYAAN DAN PENDAYAGUNAAN KELEMBAGAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN	DOKUMEN	1	4	4	4	4	4	4	24	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pada tahun berjalan per triwulan.



		DESA/ KELURAHAN (RT, RW, PKK, POSYANDU, LPM DAN KARANG TARUNA), LEMBAGA ADAT DESA/ KELURAHAN DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT.											
	2.13.05.1.01 .0003	PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/ KELURAHAN (RT, RW, PKK, POSYANDU, LPM DAN KARANG TARUNA), LEMBAGA ADAT DESA/ KELURAHAN DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT.	LEMBAGA	190	50	50	50	50	50	50	300	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan adalah jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan pada tahun berjalan. Dalam hal ini lembaga yang dimaksud adalah lembaga Posyandu dan PKK.	
	2.13.05.1.01 .0005	FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA.	DOKUMEN	1	4	4	4	4	4	4	24	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pada tahun berjalan per triwulan.	
	2.13.05.1.01 .0006	FASILITASI PEMERINTAH DESA DALAM PEMANFAATAN	LAPORAN	1	4	4	4	4	4	4	24	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pada tahun berjalan per triwulan.	



		TEKNOLOGI TEPAT GUNA.										
	2.13.05.1.01 .0008	FASILITASI PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN DESA.	DOKUMEN	5	4	4	4	4	4	4	24	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pada tahun berjalan per triwulan.
	2.13.05.1.01 .0009	FASILITASI TIM PENGGERAK PKK DALAM PENYELENGGARAAN GERAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA.	LAPORAN	1	1	1	1	1	1	1	6	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pada tahun berjalan.

Palangka Raya, 30 September 2025

Kepala Dinas,



**H. ARYAWAN, S.IP., M.IP.**

Pembina Utama Muda

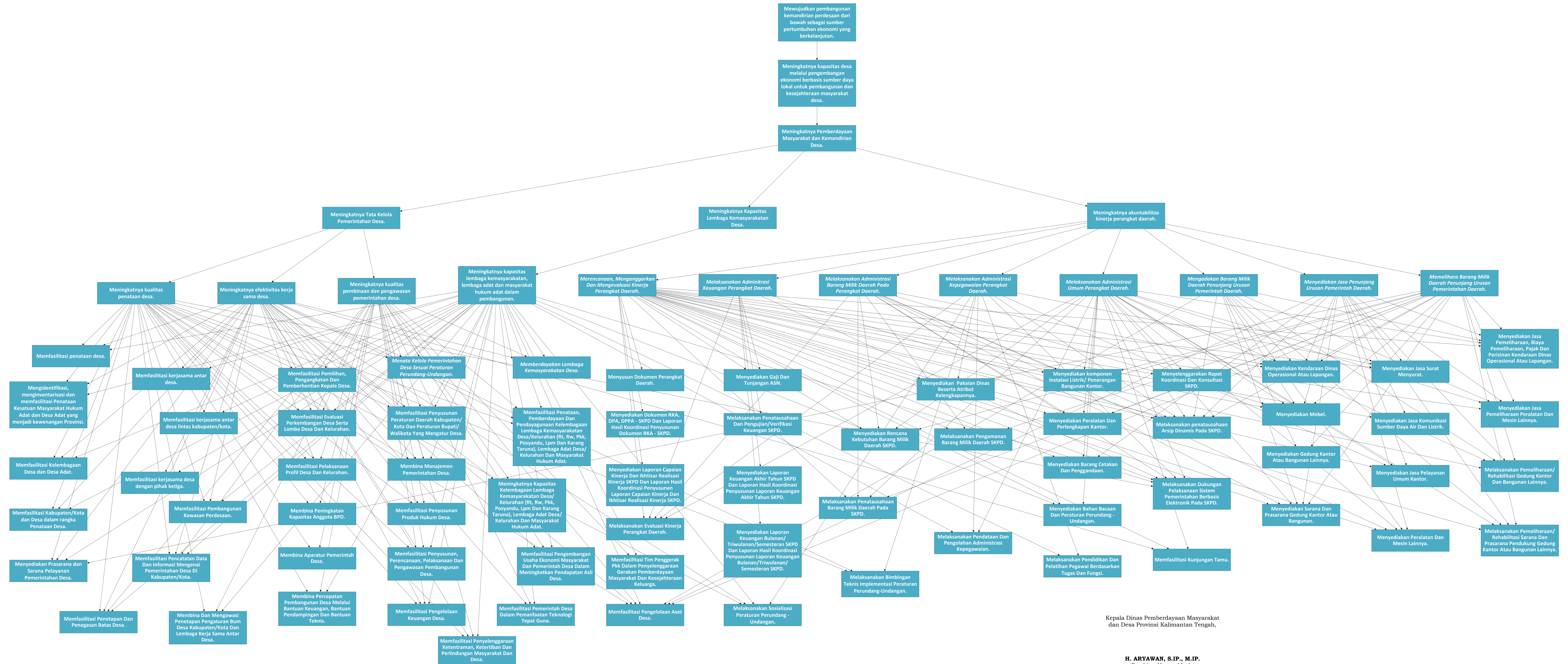
NIP. 19700514 200604 1 010



# LAMPIRAN



**POHON KINERJA PERIODE 2025 - 2030**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah,

**H. ARYAWAN, S.I.P., M.I.P.**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19700514 200604 1 010



**Sub-kegiatan Fasilitas Perbaikan Perumahan Desa Serta Landa Desa & Mekarahan**

Terdapatnya Fasilitas Fasilitas/ Perbaikan Perumahan Desa Serta Landa Desa Dan Mekarahan

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perumahan Desa Serta Landa Desa Dan Mekarahan (Dokumen)	1	1	1	1	1	1
Anggaran Tahun 2015	Rp	3.201.315.000,00				
Anggaran Tahun 2016	Rp	1.500.000.000,00				
Anggaran Tahun 2017	Rp	1.600.000.000,00				
Anggaran Tahun 2018	Rp	2.000.000.000,00				
Anggaran Tahun 2019	Rp	2.200.000.000,00				
Anggaran Tahun 2020	Rp	2.300.000.000,00				

**Sub-kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Profil Desa Dan Kelurahan**

Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Profil Desa Dan Kelurahan

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Profil Desa Dan Kelurahan (Dokumen)	1	1	1	1	1	1
Anggaran Tahun 2015	Rp	468.113.004,00				
Anggaran Tahun 2016	Rp	400.000.000,00				
Anggaran Tahun 2017	Rp	400.000.000,00				
Anggaran Tahun 2018	Rp	500.000.000,00				
Anggaran Tahun 2019	Rp	500.000.000,00				
Anggaran Tahun 2020	Rp	600.000.000,00				

**Sub-kegiatan Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa**

Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa (Orang)	100	100	100	100	100	100
Anggaran Tahun 2015	Rp	1.700.000.000,00				
Anggaran Tahun 2016	Rp	1.000.000.000,00				
Anggaran Tahun 2017	Rp	1.000.000.000,00				
Anggaran Tahun 2018	Rp	1.200.000.000,00				
Anggaran Tahun 2019	Rp	1.000.000.000,00				
Anggaran Tahun 2020	Rp	1.000.000.000,00				

**Sub-kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD**

Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD (Orang)	10	10	10	10	10	10
Anggaran Tahun 2015	Rp	88.410.000,00				
Anggaran Tahun 2016	Rp	200.000.000,00				
Anggaran Tahun 2017	Rp	200.000.000,00				
Anggaran Tahun 2018	Rp	300.000.000,00				
Anggaran Tahun 2019	Rp	300.000.000,00				
Anggaran Tahun 2020	Rp	400.000.000,00				

**Sub-kegiatan Pembinaan Peningkatan Perumahan Desa Melalui Bantuan Monev, Bantuan Peningkatan Dan Bantuan Teknik**

Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Perumahan Desa Melalui Bantuan Monev, Bantuan Peningkatan Dan Bantuan Teknik

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Peningkatan Perumahan Desa Melalui Bantuan Monev, Bantuan Peningkatan Dan Bantuan Teknik (Dokumen)	1	1	1	1	1	1
Anggaran Tahun 2015	Rp	20.000.000,00				
Anggaran Tahun 2016	Rp	60.000.000,00				
Anggaran Tahun 2017	Rp	60.000.000,00				
Anggaran Tahun 2018	Rp	90.000.000,00				
Anggaran Tahun 2019	Rp	10.000.000,00				
Anggaran Tahun 2020	Rp	100.000.000,00				

**Sub-kegiatan Pembinaan Dan Penguatan Peningkatan Perumahan Bum Desa**

Kelompokan Bum Desa Lembang Kerta Sama Antar Desa

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Dan Penguatan Peningkatan Perumahan Bum Desa Lembang Kerta Sama Antar Desa (Dokumen)	1	1	1	1	1	1
Anggaran Tahun 2015	Rp	2.671.800.000,00				
Anggaran Tahun 2016	Rp	1.000.000.000,00				
Anggaran Tahun 2017	Rp	1.600.000.000,00				
Anggaran Tahun 2018	Rp	2.000.000.000,00				
Anggaran Tahun 2019	Rp	2.000.000.000,00				
Anggaran Tahun 2020	Rp	2.600.000.000,00				

**Sub-kegiatan Fasilitas Peningan Dan Penguatan Balas Desa**

Terlaksananya Fasilitas Peningan Dan Penguatan Balas Desa

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Peningan Dan Penguatan Balas Desa (Dokumen)	1	1	1	1	1	1
Anggaran Tahun 2015	Rp	600.000.000,00				
Anggaran Tahun 2016	Rp	500.000.000,00				
Anggaran Tahun 2017	Rp	500.000.000,00				
Anggaran Tahun 2018	Rp	400.000.000,00				
Anggaran Tahun 2019	Rp	400.000.000,00				
Anggaran Tahun 2020	Rp	500.000.000,00				

**Sub-kegiatan Fasilitas Pemetaan Desa Dan Informasi Mengenal Pemerintahan Desa Di Kabupaten/Kota**

Terlaksananya Fasilitas Pemetaan Desa Dan Informasi Mengenal Pemerintahan Desa Di Kabupaten/Kota

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pemetaan Desa Dan Informasi Mengenal Pemerintahan Desa Di Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	1	1	1	1
Anggaran Tahun 2015	Rp	172.822.000,00				
Anggaran Tahun 2016	Rp	180.000.000,00				
Anggaran Tahun 2017	Rp	185.000.000,00				
Anggaran Tahun 2018	Rp	200.000.000,00				
Anggaran Tahun 2019	Rp	200.000.000,00				
Anggaran Tahun 2020	Rp	200.000.000,00				

**Sub-kegiatan Fasilitas Tim Penggerak PKA Dalam Penyelenggaraan Gerakan Pembangunan Masyarakat Dan Kesejahteraan Keluarga**

Terlaksananya Fasilitas Tim Penggerak PKA Dalam Penyelenggaraan Gerakan Pembangunan Masyarakat Dan Kesejahteraan Keluarga

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKA Dalam Penyelenggaraan Gerakan Pembangunan Masyarakat Dan Kesejahteraan Keluarga (Laporan)	1	1	1	1	1	1
Anggaran Tahun 2015	Rp	5.000.000.000,00				
Anggaran Tahun 2016	Rp	1.000.000.000,00				
Anggaran Tahun 2017	Rp	1.500.000.000,00				
Anggaran Tahun 2018	Rp	1.000.000.000,00				
Anggaran Tahun 2019	Rp	2.000.000.000,00				
Anggaran Tahun 2020	Rp	2.000.000.000,00				

Anggaran Tahun 2021	Rp	2.100.000.000,00
Anggaran Tahun 2020	Rp	500.000.000,00
Anggaran Tahun 2017	Rp	1.000.000.000,00
Anggaran Tahun 2014	Rp	1.500.000.000,00
Anggaran Tahun 2019	Rp	1.000.000.000,00
Anggaran Tahun 2016	Rp	1.000.000.000,00



**CATATAN HASIL REVIU  
RANCANGAN AKHIR RENSTRA DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
PERIODE 2025-2029**

INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Disusun Oleh/Tanggal	M. ABDUL HAYYI NU'MAN, S.E/ 9 September 2025 (Anggota Tim)
	Direviu Oleh/Tanggal	BETSIANY, S. Hut/ 9 September 2025 (Ketua Tim)
	Direviu Oleh/Tanggal	YULIANTI T.T. ASANG, S.T., CGRM/ 10 September 2025 (Pengendali Teknis )
Uraian Catatan Hasil Reviu **)		
<p>Sehubungan dengan penugasan berdasarkan Surat Tugas Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 700/048/SPT/IRBAN-II/INSP tanggal 26 Agustus 2025 untuk melaksanakan reviu atas Rancangan Akhir RENSTRA PD Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2025-2029, bersama ini kami sampaikan catatan hasil reviu sebagai berikut:</p>		
<b>DATA UMUM</b>		
Tujuan : Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa		
Sasaran : Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada perangkat daerah Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa.		
A. Keterhubungan dan kesesuaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dan/atau pertumbuhan kinerja urusan daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah bersangkutan dalam rancangan akhir Renstra PD Tahun 2025-2029		
Berdasarkan hasil reviu dinyatakan <b>66</b> catatan yang selaras dan <b>0</b> catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam lampiran.		
B. Keterhubungan Kinerja, Indikator, dan target kinerja rancangan akhir renstra PD tahun 2025-2029 (IKU Perangkat daerah dan IKK bagi perangkat daerah pemangku urusan)		
Berdasarkan hasil reviu dinyatakan <b>4</b> catatan yang selaras dan <b>0</b> catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam lampiran.		
C. Konsistensi dan keterhubungan antara program, kegiatan, subkegiatan rancangan akhir Renstra PD tahun 2025-2029 dengan program prioritas dan program perangkat daerah pada RPJMD tahun 2025-2029		
1. Konsistensi dan Keterhubungan Program Prioritas pada RPJMD dengan Program pada Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; Berdasarkan hasil reviu dinyatakan <b>1</b> catatan yang selaras dan <b>0</b> catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam lampiran.		

Reviu dilakukan tidak berdasarkan aplikasi SIPD e-Reviu Perencanaan Renstra dikarenakan pada aplikasi tidak ada data, namun reviu dilakukan berdasarkan data yang disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Konsistensi dan Keterhubungan Program Perangkat Daerah pada RPJMD dengan Program pada Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **5** catatan yang selaras dan **0** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam lampiran.

D. Kesesuaian antara target kinerja Ranhir Renstra PD tahun 2025-2029 dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian kinerja renstra PD periode 2020-2024.

1. Keselarasan Penetapan Target IKU dengan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Capaian Periode Sebelumnya;  
Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **3** catatan yang selaras dan **0** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam lampiran.
2. Keselarasan Penetapan Target IKD dengan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Capaian Periode Sebelumnya; dan  
Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **1** catatan yang selaras dan **0** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam lampiran.

E. Ketaatan dengan kaidah-kaidah perencanaan lainnya

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **0** catatan yang selaras dan **27** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam lampiran.

27 catatan tidak selaras dikarenakan belum melengkapi Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) secara lengkap untuk tahun 2022 – 2024 sebagai bahan pembandingan untuk menetapkan target kinerja dan satuan yang digunakan dalam dokumen Renstra Periode 2025 – 2029.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah kepada tim reviu diketahui bahwa :

1. Telah dilakukan pengisian data statistik sektoral daerah sesuai data yang ada pada aplikasi E-Walidata yaitu sebanyak 31 data untuk tahun 2020-2024, namun pada aplikasi SPID e-Reviu Perencanaan terdapat 27 nama DSSD 2022-2024.
2. Pengisian DSSD telah diinput untuk Tahun 2020-2024, namun Pada aplikasi SPID e-Reviu tidak muncul/tersaji DSSD 2024.

**Tanggapan :**

.....

.....


.....

.....

Direkomendasikan agar :

1. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah teknis, terkait sinkronisasi dan integrasi DSSD dengan dokumen perencanaan.
2. Menjadikan Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) untuk tahun 2022 – 2024 sebagai bahan pembandingan untuk menetapkan target kinerja dan satuan yang digunakan dalam dokumen Renstra Periode 2025 – 2029.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat  
dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah,



**H. ARYAWAN, S.IP, M.IP**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700514 200604 1 010

Palangka Raya, 11 September 2025

Pengendali Teknis,



**YULIANTI T.T. ASANG, S.T., CGRM**  
Pembina  
NIP. 19760415 200604 2 022



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Brigjend Katamso No. 9, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111,  
Telpon/Faksimile (0536) 3221585, Laman [www.dpmd.kalteng.go.id](http://www.dpmd.kalteng.go.id), Pos-el [dpmdes@kalteng.go.id](mailto:dpmdes@kalteng.go.id)

**TANGGAPAN CHR RENSTRA 2025 – 2029**

Memperhatikan catatan hasil reviu atas rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025 – 2029, berikut dapat kami sampaikan :

<b>CATATAN HASIL REVIU</b>	<b>TANGGAPAN</b>
KKR 1 (poin A)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah telah <b>SEPAKAT</b> dengan hasil reviu yang menyatakan program, kegiatan dan sub kegiatan telah selaras dengan tujuan dan sasaran yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah dalam ranhir renstra.
KKR 2 (poin B)	<p>Mohon ditinjau kembali agregat yang dinilai pada lembar KKR 2. Di dalam inmendagri no. 2 tahun 2025 memuat indikator tujuan dan indikator program, untuk indikator sasaran tidak termuat dalam dokumen inmendagri. Dalam penentuan indikator sasaran tetap mengacu pada inmendagri namun tidak mengikat, menyesuaikan dengan kebutuhan perangkat daerah. Adapun indikator sasaran menjabarkan indikator program sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sasaran 1 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa. Indikator Sasaran 1 : Persentase peningkatan status desa mandiri (%). Program &amp; indikator yang dijabarkan :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Program penataan desa ; Indikator : persentase fasilitasi penataan desa (%).</li><li>b. Program peningkatan kerjasama desa ; Indikator : persentase fasilitasi kerjasama desa (%).</li><li>c. Program administrasi pemerintahan desa ; Indikator :</li></ol></li></ol>

	<p>1) Persentase aparatur desa &amp; anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya (%).</p> <p>2) Persentase fasilitasi tata kelola desa (%).</p> <p>2. Sasaran 2 : Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa.</p> <p>Indikator Sasaran 2 : persentase fasilitasi pemberdayaan Lembaga (%).</p> <p>Program &amp; indikator yang dijabarkan :</p> <p>a. Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat. ;</p> <p>Indikator :</p> <p>1) Persentase fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa (LKD) (%).</p> <p>2) Persentase fasilitasi pemberdayaan lembaga adat desa &amp; lembaga masyarakat hukum adat (%).</p> <p>3. Sasaran 3 : Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada perangkat daerah.</p> <p>Indikator sasaran 3 : Kinerja penyelenggaraan pemerinthaan (%).</p> <p>Program &amp; indikator yang dijabarkan :</p> <p>a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi. ;</p> <p>Indikator : persentase instansi pemerintah dengan skor sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (sakup)? B (%).</p> <p>Sedangkan agregat yang dinilai adalah indikator tujuan dan indikator sasaran, dimana indikator program tidak menjadi agregat yang dinilai.</p>
KKR 3 (poin C1)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah telah <b>SEPAKAT</b> dengan hasil reuiu yang

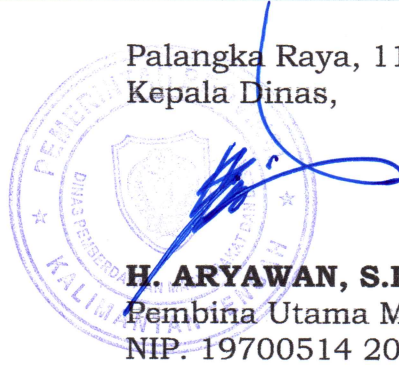
	menyatakan program pada ranhir renstra telah selaras dengan program prioritas pada RPJMD.
KKR 4 (poin C2)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah telah <b>SEPAKAT</b> dengan hasil reviu yang menyatakan program, kegiatan dan sub kegiatan pada ranhir renstra telah selaras dengan program prioritas daerah pada RPJMD.
KKR 5 (poin D1)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah telah <b>SEPAKAT</b> dengan hasil reviu yang menyatakan target kinerja utama pada ranhir renstra telah selaras dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian kinerja periode sebelumnya.
KKR 6 (poin D2)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah telah <b>SEPAKAT</b> dengan hasil reviu yang menyatakan target kinerja daerah pada ranhir renstra telah selaras dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian kinerja periode sebelumnya.
KKR 7 (poin E)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah telah mengisi data statistik sektoral daerah sesuai data yang ada pada aplikasi E – Walidata yaitu sebanyak 31 data. Adapun data yang telah kami isi sebagai berikut : 1) 2.13.000008 = Buku Register Desa. (Satuan : Dokumen); 2) 2.13.000009 = BUM Desa di Kabupaten/Kota. (Satuan : Dokumen); 3) 2.13.000011 = Desa yang melakukan pengembangan inovasi. (Satuan : Desa); 4) 2.13.000015 = Dokumen hasil fasilitasi pemerintahan desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna. (Satuan : Dokumen); 5) 2.13.000022 = Dokumen hasil penugasan urusan/kewenangan provinsi yang dilaksanakan oleh desa. (Satuan : Dokumen);

- 6) 2.13.000026 = Dokumen penyediaan sistem informasi pembangunan kampung berbasis teknologi. (Satuan : Dokumen);
- 7) 2.13.000028 = Kapasitas SDM aparatur desa. (Satuan : Orang);
- 8) 2.13.000029 = Kekayaan desa berupa harta bergerak dan tidak bergerak (Satuan : Dokumen);
- 9) 2.13.000030 = Laporan hasil fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan Gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga. (Satuan : Laporan);
- 10) 2.13.000032 = Laporan evaluasi dan monitoring P3MD, PPMD dan penggunaan dana kampung. (Satuan : Laporan);
- 11) 2.13.000033 = Laporan gelar teknologi tepat guna (TTG) Nasional (Satuan : Laporan);
- 12) 2.13.000036 = Laporan hasil pelaksanaan pekan inovasi perkembangan desa. (Satuan : Laporan);
- 13) 2.13.000037 = Laporan hasil penyelenggaraan lomba kampung/kelurahan di 29 kabupaten/kota. (Satuan : Laporan);
- 14) 2.13.000038 = Laporan kunjungan ketua tim penggerak PKK Provinsi Papua (Satuan : Laporan);
- 15) 2.13.000039 = Laporan pelaksanaan bulan bakti gotong royong masyarakat (BBGRM) tingkat provinsi dan nasional. (Satuan : Laporan);
- 16) 2.13.000040 = Laporan pelaksanaan gelar teknologi tepat guna nasional. (Satuan : Laporan);
- 17) 2.13.000041 = Laporan penyelenggaraan lomba kampung dan kelurahan tingkat provinsi (Satuan : Laporan);
- 18) 2.13.000057 = Partisipasi masyarakat desa. (Satuan : Desa);

- 19) 2.13.000058 = Partisipasi masyarakat desa pengawasan dan evaluasi secara partisipatif oleh Badan Permusyawaratan Desa. (Satuan : Peraturan Desa);
- 20) 2.13.000061 = Pendapatan asli desa, alokasi dana desa. (Satuan : Dokumen);
- 21) 2.13.000062 = Pengembangan teknologi tepat guna (Satuan : Laporan);
- 22) 2.13.000063 = Penyelenggaraan musyawarah desa. (Satuan : Dokumen);
- 23) 2.13.000064 = Peraturan bersama kepala desa musyawarah antar desa (Satuan : Peraturan kepala desa);
- 24) 2.13.000067 = Prakarsa masyarakat desa, asal – usul, adat – istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat desa, serta kemampuan dan potensi desa. (Satuan : Dokumen);
- 25) 2.13.000068 = Pranata hukum adat. (Satuan : Dokumen);
- 26) 2.13.000069 = Rukun tetangga, rukun warga, pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK), karang taruna, dan Lembaga pemberdayaan masyarakat atau yang disebut dengan nama lain. (Satuan : Lembaga desa dan desa adat);
- 27) 2.13.000070 = Sanggar PKK di Kampung (Satuan : Unit);
- 28) 2.13.000071 = SDM anggota BPD (Satuan : Orang);
- 29) 2.13.000073 = Surat keputusan Bupati/walikota terkait pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. (Satuan : Dokumen);
- 30) 2.13.000074 = Tingkat perkembangan desa (Satuan : Desa);
- 31) 2.13.000076 = Dokumen pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervise

	<p>serta fasilitasi di bidang kerja sama pemerintahan yang dilaksanakan. (Satuan : Dokumen).</p> <p>Dan bukti keterisian data kami lampirkan.</p>
--	---

Palangka Raya, 11 September 2025  
Kepala Dinas,



**H. ARYAWAN, S.IP., M.IP**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700514 200604 1 010

## Lampiran tanggapan KKR 2.

13) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

TUJUAN	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa		
INDIKATOR	Indeks Desa Membangun (IDM)		
PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	KET.
Penataan Desa	Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitas Penataan Desa	
Peningkatan Kerja Sama Desa	Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase Fasilitas Kerjasama Desa	
Administrasi Pemerintahan Desa	Meningkatnya kualitas pelayanan dan pengawasan pemerintahan desa	1. Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya 2. Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa	
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	1. Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) 2. Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	
Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Papua	Disesuaikan dengan konteks daerah	Disesuaikan dengan konteks daerah	Khusus Papua
Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Papua Barat	Disesuaikan dengan konteks daerah	Disesuaikan dengan konteks daerah	Khusus Papua Barat
Peningkatan Kesejahteraan Orang Asli Papua	Disesuaikan dengan konteks daerah	Disesuaikan dengan konteks daerah	Khusus Papua dan Papua Barat

### CASCADING DIMAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KALIMANTAN TERGAH TAHUN 2025 - 2029

	<b>VISI RPJMN</b> "BERSAMA INDONESIA MAJU MENUJU INDONESIA EMAS 2045."		
RPJMD 2025 - 2029	<b>MISI KE-EM RPJMN</b> "MEMBANGUN DARI DESA DAN DARI BAWAH UNTUK PERTUMBUHAN EKONOMI, PEMERATAAN EKONOMI DAN PEMERANTASAN KEMISKINAN."		
	<b>SARASAN UTAMA KE-TIGA</b> "MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN KEMANDIRIAN PERDESAAN DARI BAWAH SEBAGAI SUMBER PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKELANJUTAN."		
	<b>INDIKATOR SARASAN</b> IK : PERSENTASE DESA MANDIRI (%)		
	<b>VISI RPJMD</b> "Meningkatkan Harkat Marabat Dayak Khususnya, utamanya Masyarakat Kalimantan Tengah (Mangatang Ulu), Dengan Spirit Kearifan Lokal dan Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Menuju Kalteng Berkah, Kalteng Maju, Kalteng Bermartabat Untuk Menyambut Indonesia Emas 2045."		
RPJMD 2025 - 2029	<b>MISI KE - 1</b> "Meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pemanfaatan sumber daya alam lokal."	<b>MISI KE - 4</b> "Menghasilkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat sebagai keadilan sosial."	<b>MISI KE - 5</b> "Memberdayakan kearifan lokal dan kebudayaan Dayak dalam kehidupan sosial masyarakat/tata kelola pemerintahan/berita kebijakan dan program untuk mewujudkan visi Indonesia Maju 2045."
	<b>TUJUAN KE - 2</b> "Mewujudkan pemanfaatan sumber daya lokal berbasis literasi berdasarkan prinsip ekonomi hijau dan biru."	<b>TUJUAN KE - 7</b> "Mewujudkan pembangunan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat dan terjangkau bagi masyarakat di seluruh wilayah."	<b>TUJUAN KE - 10</b> "Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel berbasis inovasi dan digitalisasi."
	<b>SARASAN KE - 4</b> "Meningkatnya kapasitas desa melalui pengembangan ekonomi berbasis sumber daya lokal untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa."	<b>SARASAN KE - 20</b> "Terwujudnya perhasan layanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat melalui penguatan sistem rujukan dan optimalisasi teknologi kesehatan."	<b>SARASAN KE - 25</b> "Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi digital yang berbasis elektronik."
	<b>INDIKATOR KE - 4</b> "Persentase desa mandiri (%)"	<b>INDIKATOR KE - 2</b> "Prevalensi stunting (pendek & sangat pendek) pada balita (%)."	<b>INDIKATOR KE - 2</b> "Nilai SAKIP (skor)."
	<b>TUJUAN DIMAS PMD PROV. KALTENG</b> MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KEMANDIRIAN DESA		
	<b>INDIKATOR TUJUAN DIMAS PMD PROV. KALTENG</b> INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM)		
	<b>SARASAN 1</b> MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA.	<b>SARASAN 2</b> MENINGKATNYA KAPASITAS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA.	<b>SARASAN 3</b> MENINGKATNYA KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PADA PERANGKAT DAERAH.
RENSTRA 2025 - 2029	<b>INDIKATOR SARASAN 1</b> PERSENTASE PENINGKATAN STATUS DESA MANDIRI (%)	<b>INDIKATOR SARASAN 2</b> PERSENTASE FASILITASI PEMBERDAYAAN LEMBAGA (%)	<b>INDIKATOR SARASAN 3</b> KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN (%)
	<b>PROGRAM PENATAAN DESA</b> IK : PERSENTASE FASILITASI PENATAAN DESA (%).	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b> IK : 1) PERSENTASE APARATUR DESA & ANGGOTA BPD YG DITINGKATKAN KAPASITASNYA (%). 2) PERSENTASE FASILITASI TATA KELOLA DESA (%).	<b>PROGRAM PERUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> IK : PERSENTASE INSTANSI PEMERINTAH DENGAN SKOR SISTEM AKUNTABILITAS KEBERLAHAN TUNTAS PEMERINTAH (SCIP) (%)
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA</b> IK : PERSENTASE FASILITASI KERJASAMA DESA (%).	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b> IK : 1) PERSENTASE FASILITASI PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA (LKD) (%). 2) PERSENTASE FASILITASI PEMBERDAYAAN LEMBAGA ADAT DESA & LEMBAGA MASYARAKAT HUKUM ADAT (%).	

## Lampiran tanggapan KKR 7.

No	Kode SSD	Uraian	Satuan	Data Lampau	Data 2024	Status Verifikasi	Catatan Verifikasi
1	2.13.000008	Buku Register Desa <a href="#">11224</a> <a href="#">11225</a> <a href="#">11226</a> <a href="#">11227</a> <a href="#">11228</a> <a href="#">11229</a> <a href="#">11230</a> <a href="#">11231</a> <a href="#">11232</a> <a href="#">11233</a> <a href="#">11234</a> <a href="#">11235</a> <a href="#">11236</a> <a href="#">11237</a> <a href="#">11238</a> <a href="#">11239</a> <a href="#">11240</a> <a href="#">11241</a> <a href="#">11242</a> <a href="#">11243</a> <a href="#">11244</a> <a href="#">11245</a> <a href="#">11246</a> <a href="#">11247</a> <a href="#">11248</a> <a href="#">11249</a> <a href="#">11250</a> <a href="#">11251</a> <a href="#">11252</a> <a href="#">11253</a> <a href="#">11254</a> <a href="#">11255</a> <a href="#">11256</a> <a href="#">11257</a> <a href="#">11258</a> <a href="#">11259</a> <a href="#">11260</a> <a href="#">11261</a> <a href="#">11262</a> <a href="#">11263</a> <a href="#">11264</a> <a href="#">11265</a> <a href="#">11266</a> <a href="#">11267</a> <a href="#">11268</a> <a href="#">11269</a> <a href="#">11270</a> <a href="#">11271</a> <a href="#">11272</a> <a href="#">11273</a> <a href="#">11274</a> <a href="#">11275</a> <a href="#">11276</a> <a href="#">11277</a> <a href="#">11278</a> <a href="#">11279</a> <a href="#">11280</a> <a href="#">11281</a> <a href="#">11282</a> <a href="#">11283</a> <a href="#">11284</a> <a href="#">11285</a> <a href="#">11286</a> <a href="#">11287</a> <a href="#">11288</a> <a href="#">11289</a> <a href="#">11290</a> <a href="#">11291</a> <a href="#">11292</a> <a href="#">11293</a> <a href="#">11294</a> <a href="#">11295</a> <a href="#">11296</a> <a href="#">11297</a> <a href="#">11298</a> <a href="#">11299</a> <a href="#">11300</a> <a href="#">11301</a> <a href="#">11302</a> <a href="#">11303</a> <a href="#">11304</a> <a href="#">11305</a> <a href="#">11306</a> <a href="#">11307</a> <a href="#">11308</a> <a href="#">11309</a> <a href="#">11310</a> <a href="#">11311</a> <a href="#">11312</a> <a href="#">11313</a> <a href="#">11314</a> <a href="#">11315</a> <a href="#">11316</a> <a href="#">11317</a> <a href="#">11318</a> <a href="#">11319</a> <a href="#">11320</a> <a href="#">11321</a> <a href="#">11322</a> <a href="#">11323</a> <a href="#">11324</a> <a href="#">11325</a> <a href="#">11326</a> <a href="#">11327</a> <a href="#">11328</a> <a href="#">11329</a> <a href="#">11330</a> <a href="#">11331</a> <a href="#">11332</a> <a href="#">11333</a> <a href="#">11334</a> <a href="#">11335</a> <a href="#">11336</a> <a href="#">11337</a> <a href="#">11338</a> <a href="#">11339</a> <a href="#">11340</a> <a href="#">11341</a> <a href="#">11342</a> <a href="#">11343</a> <a href="#">11344</a> <a href="#">11345</a> <a href="#">11346</a> <a href="#">11347</a> <a href="#">11348</a> <a href="#">11349</a> <a href="#">11350</a> <a href="#">11351</a> <a href="#">11352</a> <a href="#">11353</a> <a href="#">11354</a> <a href="#">11355</a> <a href="#">11356</a> <a href="#">11357</a> <a href="#">11358</a> <a href="#">11359</a> <a href="#">11360</a> <a href="#">11361</a> <a href="#">11362</a> <a href="#">11363</a> <a href="#">11364</a> <a href="#">11365</a> <a href="#">11366</a> <a href="#">11367</a> <a href="#">11368</a> <a href="#">11369</a> <a href="#">11370</a> <a href="#">11371</a> <a href="#">11372</a> <a href="#">11373</a> <a href="#">11374</a> <a href="#">11375</a> <a href="#">11376</a> <a href="#">11377</a> <a href="#">11378</a> <a href="#">11379</a> <a href="#">11380</a> <a href="#">11381</a> <a href="#">11382</a> <a href="#">11383</a> <a href="#">11384</a> <a href="#">11385</a> <a href="#">11386</a> <a href="#">11387</a> <a href="#">11388</a> <a href="#">11389</a> <a href="#">11390</a> <a href="#">11391</a> <a href="#">11392</a> <a href="#">11393</a> <a href="#">11394</a> <a href="#">11395</a> <a href="#">11396</a> <a href="#">11397</a> <a href="#">11398</a> <a href="#">11399</a> <a href="#">11400</a> <a href="#">11401</a> <a href="#">11402</a> <a href="#">11403</a> <a href="#">11404</a> <a href="#">11405</a> <a href="#">11406</a> <a href="#">11407</a> <a href="#">11408</a> <a href="#">11409</a> <a href="#">11410</a> <a href="#">11411</a> <a href="#">11412</a> <a href="#">11413</a> <a href="#">11414</a> <a href="#">11415</a> <a href="#">11416</a> <a href="#">11417</a> <a href="#">11418</a> <a href="#">11419</a> <a href="#">11420</a> <a href="#">11421</a> <a href="#">11422</a> <a href="#">11423</a> <a href="#">11424</a> <a href="#">11425</a> <a href="#">11426</a> <a href="#">11427</a> <a href="#">11428</a> <a href="#">11429</a> <a href="#">11430</a> <a href="#">11431</a> <a href="#">11432</a> <a href="#">11433</a> <a href="#">11434</a> <a href="#">11435</a> <a href="#">11436</a> <a href="#">11437</a> <a href="#">11438</a> <a href="#">11439</a> <a href="#">11440</a> <a href="#">11441</a> <a href="#">11442</a> <a href="#">11443</a> <a href="#">11444</a> <a href="#">11445</a> <a href="#">11446</a> <a href="#">11447</a> <a href="#">11448</a> <a href="#">11449</a> <a href="#">11450</a> <a href="#">11451</a> <a href="#">11452</a> <a href="#">11453</a> <a href="#">11454</a> <a href="#">11455</a> <a href="#">11456</a> <a href="#">11457</a> <a href="#">11458</a> <a href="#">11459</a> <a href="#">11460</a> <a href="#">11461</a> <a href="#">11462</a> <a href="#">11463</a> <a href="#">11464</a> <a href="#">11465</a> <a href="#">11466</a> <a href="#">11467</a> <a href="#">11468</a> <a href="#">11469</a> <a href="#">11470</a> <a href="#">11471</a> <a href="#">11472</a> <a href="#">11473</a> <a href="#">11474</a> <a href="#">11475</a> <a href="#">11476</a> <a href="#">11477</a> <a href="#">11478</a> <a href="#">11479</a> <a href="#">11480</a> <a href="#">11481</a> <a href="#">11482</a> <a href="#">11483</a> <a href="#">11484</a> <a href="#">11485</a> <a href="#">11486</a> <a href="#">11487</a> <a href="#">11488</a> <a href="#">11489</a> <a href="#">11490</a> <a href="#">11491</a> <a href="#">11492</a> <a href="#">11493</a> <a href="#">11494</a> <a href="#">11495</a> <a href="#">11496</a> <a href="#">11497</a> <a href="#">11498</a> <a href="#">11499</a> <a href="#">11500</a> <a href="#">11501</a> <a href="#">11502</a> <a href="#">11503</a> <a href="#">11504</a> <a href="#">11505</a> <a href="#">11506</a> <a href="#">11507</a> <a href="#">11508</a> <a href="#">11509</a> <a href="#">11510</a> <a href="#">11511</a> <a href="#">11512</a> <a href="#">11513</a> <a href="#">11514</a> <a href="#">11515</a> <a href="#">11516</a> <a href="#">11517</a> <a href="#">11518</a> <a href="#">11519</a> <a href="#">11520</a> <a href="#">11521</a> <a href="#">11522</a> <a href="#">11523</a> <a href="#">11524</a> <a href="#">11525</a> <a href="#">11526</a> <a href="#">11527</a> <a href="#">11528</a> <a href="#">11529</a> <a href="#">11530</a> <a href="#">11531</a> <a href="#">11532</a> <a href="#">11533</a> <a href="#">11534</a> <a href="#">11535</a> <a href="#">11536</a> <a href="#">11537</a> <a href="#">11538</a> <a href="#">11539</a> <a href="#">11540</a> <a href="#">11541</a> <a href="#">11542</a> <a href="#">11543</a> <a href="#">11544</a> <a href="#">11545</a> <a href="#">11546</a> <a href="#">11547</a> <a href="#">11548</a> <a href="#">11549</a> <a href="#">11550</a> <a href="#">11551</a> <a href="#">11552</a> <a href="#">11553</a> <a href="#">11554</a> <a href="#">11555</a> <a href="#">11556</a> <a href="#">11557</a> <a href="#">11558</a> <a href="#">11559</a> <a href="#">11560</a> <a href="#">11561</a> <a href="#">11562</a> <a href="#">11563</a> <a href="#">11564</a> <a href="#">11565</a> <a href="#">11566</a> <a href="#">11567</a> <a href="#">11568</a> <a href="#">11569</a> <a href="#">11570</a> <a href="#">11571</a> <a href="#">11572</a> <a href="#">11573</a> <a href="#">11574</a> <a href="#">11575</a> <a href="#">11576</a> <a href="#">11577</a> <a href="#">11578</a> <a href="#">11579</a> <a href="#">11580</a> <a href="#">11581</a> <a href="#">11582</a> <a href="#">11583</a> <a href="#">11584</a> <a href="#">11585</a> <a href="#">11586</a> <a href="#">11587</a> <a href="#">11588</a> <a href="#">11589</a> <a href="#">11590</a> <a href="#">11591</a> <a href="#">11592</a> <a href="#">11593</a> <a href="#">11594</a> <a href="#">11595</a> <a href="#">11596</a> <a href="#">11597</a> <a href="#">11598</a> <a href="#">11599</a> <a href="#">11600</a> <a href="#">11601</a> <a href="#">11602</a> <a href="#">11603</a> <a href="#">11604</a> <a href="#">11605</a> <a href="#">11606</a> <a href="#">11607</a> <a href="#">11608</a> <a href="#">11609</a> <a href="#">11610</a> <a href="#">11611</a> <a href="#">11612</a> <a href="#">11613</a> <a href="#">11614</a> <a href="#">11615</a> <a href="#">11616</a> <a href="#">11617</a> <a href="#">11618</a> <a href="#">11619</a> <a href="#">11620</a> <a href="#">11621</a> <a href="#">11622</a> <a href="#">11623</a> <a href="#">11624</a> <a href="#">11625</a> <a href="#">11626</a> <a href="#">11627</a> <a href="#">11628</a> <a href="#">11629</a> <a href="#">11630</a> <a href="#">11631</a> <a href="#">11632</a> <a href="#">11633</a> <a href="#">11634</a> <a href="#">11635</a> <a href="#">11636</a> <a href="#">11637</a> <a href="#">11638</a> <a href="#">11639</a> <a href="#">11640</a> <a href="#">11641</a> <a href="#">11642</a> <a href="#">11643</a> <a href="#">11644</a> <a href="#">11645</a> <a href="#">11646</a> <a href="#">11647</a> <a href="#">11648</a> <a href="#">11649</a> <a href="#">11650</a> <a href="#">11651</a> <a href="#">11652</a> <a href="#">11653</a> <a href="#">11654</a> <a href="#">11655</a> <a href="#">11656</a> <a href="#">11657</a> <a href="#">11658</a> <a href="#">11659</a> <a href="#">11660</a> <a href="#">11661</a> <a href="#">11662</a> <a href="#">11663</a> <a href="#">11664</a> <a href="#">11665</a> <a href="#">11666</a> <a href="#">11667</a> <a href="#">11668</a> <a href="#">11669</a> <a href="#">11670</a> <a href="#">11671</a> <a href="#">11672</a> <a href="#">11673</a> <a href="#">11674</a> <a href="#">11675</a> <a href="#">11676</a> <a href="#">11677</a> <a href="#">11678</a> <a href="#">11679</a> <a href="#">11680</a> <a href="#">11681</a> <a href="#">11682</a> <a href="#">11683</a> <a href="#">11684</a> <a href="#">11685</a> <a href="#">11686</a> <a href="#">11687</a> <a href="#">11688</a> <a href="#">11689</a> <a href="#">11690</a> <a href="#">11691</a> <a href="#">11692</a> <a href="#">11693</a> <a href="#">11694</a> <a href="#">11695</a> <a href="#">11696</a> <a href="#">11697</a> <a href="#">11698</a> <a href="#">11699</a> <a href="#">11700</a> <a href="#">11701</a> <a href="#">11702</a> <a href="#">11703</a> <a href="#">11704</a> <a href="#">11705</a> <a href="#">11706</a> <a href="#">11707</a> <a href="#">11708</a> <a href="#">11709</a> <a href="#">11710</a> <a href="#">11711</a> <a href="#">11712</a> <a href="#">11713</a> <a href="#">11714</a> <a href="#">11715</a> <a href="#">11716</a> <a href="#">11717</a> <a href="#">11718</a> <a href="#">11719</a> <a href="#">11720</a> <a href="#">11721</a> <a href="#">11722</a> <a href="#">11723</a> <a href="#">11724</a> <a href="#">11725</a> <a href="#">11726</a> <a href="#">11727</a> <a href="#">11728</a> <a href="#">11729</a> <a href="#">11730</a> <a href="#">11731</a> <a href="#">11732</a> <a href="#">11733</a> <a href="#">11734</a> <a href="#">11735</a> <a href="#">11736</a> <a href="#">11737</a> <a href="#">11738</a> <a href="#">11739</a> <a href="#">11740</a> <a href="#">11741</a> <a href="#">11742</a> <a href="#">11743</a> <a href="#">11744</a> <a href="#">11745</a> <a href="#">11746</a> <a href="#">11747</a> <a href="#">11748</a> <a href="#">11749</a> <a href="#">11750</a> <a href="#">11751</a> <a href="#">11752</a> <a href="#">11753</a> <a href="#">11754</a> <a href="#">11755</a> <a href="#">11756</a> <a href="#">11757</a> <a href="#">11758</a> <a href="#">11759</a> <a href="#">11760</a> <a href="#">11761</a> <a href="#">11762</a> <a href="#">11763</a> <a href="#">11764</a> <a href="#">11765</a> <a href="#">11766</a> <a href="#">11767</a> <a href="#">11768</a> <a href="#">11769</a> <a href="#">11770</a> <a href="#">11771</a> <a href="#">11772</a> <a href="#">11773</a> <a href="#">11774</a> <a href="#">11775</a> <a href="#">11776</a> <a href="#">11777</a> <a href="#">11778</a> <a href="#">11779</a> <a href="#">11780</a> <a href="#">11781</a> <a href="#">11782</a> <a href="#">11783</a> <a href="#">11784</a> <a href="#">11785</a> <a href="#">11786</a> <a href="#">11787</a> <a href="#">11788</a> <a href="#">11789</a> <a href="#">11790</a> <a href="#">11791</a> <a href="#">11792</a> <a href="#">11793</a> <a href="#">11794</a> <a href="#">11795</a> <a href="#">11796</a> <a href="#">11797</a> <a href="#">11798</a> <a href="#">11799</a> <a href="#">11800</a> <a href="#">11801</a> <a href="#">11802</a> <a href="#">11803</a> <a href="#">11804</a> <a href="#">11805</a> <a href="#">11806</a> <a href="#">11807</a> <a href="#">11808</a> <a href="#">11809</a> <a href="#">11810</a> <a href="#">11811</a> <a href="#">11812</a> <a href="#">11813</a> <a href="#">11814</a> <a href="#">11815</a> <a href="#">11816</a> <a href="#">11817</a> <a href="#">11818</a> <a href="#">11819</a> <a href="#">11820</a> <a href="#">11821</a> <a href="#">11822</a> <a href="#">11823</a> <a href="#">11824</a> <a href="#">11825</a> <a href="#">11826</a> <a href="#">11827</a> <a href="#">11828</a> <a href="#">11829</a> <a href="#">11830</a> <a href="#">11831</a> <a href="#">11832</a> <a href="#">11833</a> <a href="#">11834</a> <a href="#">11835</a> <a href="#">11836</a> <a href="#">11837</a> <a href="#">11838</a> <a href="#">11839</a> <a href="#">11840</a> <a href="#">11841</a> <a href="#">11842</a> <a href="#">11843</a> <a href="#">11844</a> <a href="#">11845</a> <a href="#">11846</a> <a href="#">11847</a> <a href="#">11848</a> <a href="#">11849</a> <a href="#">11850</a> <a href="#">11851</a> <a href="#">11852</a> <a href="#">11853</a> <a href="#">11854</a> <a href="#">11855</a> <a href="#">11856</a> <a href="#">11857</a> <a href="#">11858</a> <a href="#">11859</a> <a href="#">11860</a> <a href="#">11861</a> <a href="#">11862</a> <a href="#">11863</a> <a href="#">11864</a> <a href="#">11865</a> <a href="#">11866</a> <a href="#">11867</a> <a href="#">11868</a> <a href="#">11869</a> <a href="#">11870</a> <a href="#">11871</a> <a href="#">11872</a> <a href="#">11873</a> <a href="#">11874</a> <a href="#">11875</a> <a href="#">11876</a> <a href="#">11877</a> <a href="#">11878</a> <a href="#">11879</a> <a href="#">11880</a> <a href="#">11881</a> <a href="#">11882</a> <a href="#">11883</a> <a href="#">11884</a> <a href="#">11885</a> <a href="#">11886</a> <a href="#">11887</a> <a href="#">11888</a> <a href="#">11889</a> <a href="#">11890</a> <a href="#">11891</a> <a href="#">11892</a> <a href="#">11893</a> <a href="#">11894</a> <a href="#">11895</a> <a href="#">11896</a> <a href="#">11897</a> <a href="#">11898</a> <a href="#">11899</a> <a href="#">11900</a> <a href="#">11901</a> <a href="#">11902</a> <a href="#">11903</a> <a href="#">11904</a> <a href="#">11905</a> <a href="#">11906</a> <a href="#">11907</a> <a href="#">11908</a> <a href="#">11909</a> <a href="#">11910</a> <a href="#">11911</a> <a href="#">11912</a> <a href="#">11913</a> <a href="#">11914</a> <a href="#">11915</a> <a href="#">11916</a> <a href="#">11917</a> <a href="#">11918</a> <a href="#">11919</a> <a href="#">11920</a> <a href="#">11921</a> <a href="#">11922</a> <a href="#">11923</a> <a href="#">11924</a> <a href="#">11925</a> <a href="#">11926</a> <a href="#">11927</a> <a href="#">11928</a> <a href="#">11929</a> <a href="#">11930</a> <a href="#">11931</a> <a href="#">11932</a> <a href="#">11933</a> <a href="#">11934</a> <a href="#">11935</a> <a href="#">11936</a> <a href="#">11937</a> <a href="#">11938</a> <a href="#">11939</a> <a href="#">11940</a> <a href="#">11941</a> <a href="#">11942</a> <a href="#">11943</a> <a href="#">11944</a> <a href="#">11945</a> <a href="#">11946</a> <a href="#">11947</a> <a href="#">11948</a> <a href="#">11949</a> <a href="#">11950</a> <a href="#">11951</a> <a href="#">11952</a> <a href="#">11953</a> <a href="#">11954</a> <a href="#">11955</a> <a href="#">11956</a> <a href="#">11957</a> <a href="#">11958</a> <a href="#">11959</a> <a href="#">11960</a> <a href="#">11961</a> <a href="#">11962</a> <a href="#">11963</a> <a href="#">11964</a> <a href="#">11965</a> <a href="#">11966</a> <a href="#">11967</a> <a href="#">11968</a> <a href="#">11969</a> <a href="#">11970</a> <a href="#">11971</a> <a href="#">11972</a> <a href="#">11973</a> <a href="#">11974</a> <a href="#">11975</a> <a href="#">11976</a> <a href="#">11977</a> <a href="#">11978</a> <a href="#">11979</a> <a href="#">11980</a> <a href="#">11981</a> <a href="#">11982</a> <a href="#">11983</a> <a href="#">11984</a> <a href="#">11985</a> <a href="#">11986</a> <a href="#">11987</a> <a href="#">11988</a> <a href="#">11989</a> <a href="#">11990</a> <a href="#">11991</a> <a href="#">11992</a> <a href="#">11993</a> <a href="#">11994</a> <a href="#">11995</a> <a href="#">11996</a> <a href="#">11997</a> <a href="#">11998</a> <a href="#">11999</a> <a href="#">12000</a> <a href="#">12001</a> <a href="#">12002</a> <a href="#">12003</a> <a href="#">12004</a> <a href="#">12005</a> <a href="#">12006</a> <a href="#">12007</a> <a href="#">12008</a> <a href="#">12009</a> <a href="#">12010</a> <a href="#">12011</a> <a href="#">12012</a> <a href="#">12013</a> <a href="#">12014</a> <a href="#">12015</a> <a href="#">12016</a> <a href="#">12017</a> <a href="#">12018</a> <a href="#">12019</a> <a href="#">12020</a> <a href="#">12021</a> <a href="#">12022</a> <a href="#">12023</a> <a href="#">12024</a> <a href="#">12025</a> <a href="#">12026</a> <a href="#">12027</a> <a href="#">12028</a> <a href="#">12029</a> <a href="#">12030</a> <a href="#">12031</a> <a href="#">12032</a> <a href="#">12033</a> <a href="#">12034</a> <a href="#">12035</a> <a href="#">12036</a> <a href="#">12037</a> <a href="#">12038</a> <a href="#">12039</a> <a href="#">12040</a> <a href="#">12041</a> <a href="#">12042</a> <a href="#">12043</a> <a href="#">12044</a> <a href="#">12045</a> <a href="#">12046</a> <a href="#">12047</a> <a href="#">12048</a> <a href="#">12049</a> <a href="#">12050</a> <a href="#">12051</a> <a href="#">12052</a> <a href="#">12053</a> <a href="#">12054</a> <a href="#">12055</a> <a href="#">12056</a> <a href="#">12057</a> <a href="#">12058</a> <a href="#">12059</a> <a href="#">12060</a> <a href="#">12061</a> <a href="#">12062</a> <a href="#">12063</a> <a href="#">12064</a> <a href="#">12065</a> <a href="#">12066</a> <a href="#">12067</a> <a href="#">12068</a> <a href="#">12069</a> <a href="#">12070</a> <a href="#">12071</a> <a href="#">12072</a> <a href="#">12073</a> <a href="#">12074</a> <a href="#">12075</a> <a href="#">12076</a> <a href="#">12077</a> <a href="#">12078</a> <a href="#">12079</a> <a href="#">12080</a> <a href="#">12081</a> <a href="#">12082</a> <a href="#">12083</a> <a href="#">12084</a> <a href="#">12085</a> <a href="#">12086</a> <a href="#">12087</a> <a href="#">12088</a> <a href="#">12089</a> <a href="#">12090</a> <a href="#">12091</a> <a href="#">12092</a> <a href="#">12093</a> <a href="#">12094</a> <a href="#">12095</a> <a href="#">12096</a> <a href="#">12097</a> <a href="#">12098</a> <a href="#">12099</a> <a href="#">12100</a> <a href="#">12101</a> <a href="#">12102</a> <a href="#">12103</a> <a href="#">12104</a> <a href="#">12105</a> <a href="#">12106</a> <a href="#">12107</a> <a href="#">12108</a> <a href="#">12109</a> <a href="#">12110</a> <a href="#">12111</a> <a href="#">12112</a> <a href="#">12113</a> <a href="#">12114</a> <a href="#">12115</a> <a href="#">12116</a> <a href="#">12117</a> <a href="#">12118</a> <a href="#">12119</a> <a href="#">12120</a> <a href="#">12121</a> <a href="#">12122</a> <a href="#">12123</a> <a href="#">12124</a> <a href="#">12125</a> <a href="#">12126</a> <a href="#">12127</a> <a href="#">12128</a> <a href="#">12129</a> <a href="#">12130</a> <a href="#">12131</a> <a href="#">12132</a> <a href="#">12133</a> <a href="#">12134</a> <a href="#">12135</a> <a href="#">12136</a> <a href="#">12137</a> <a href="#">12138</a> <a href="#">12139</a> <a href="#">12140</a> <a href="#">12141</a> <a href="#">12142</a> <a href="#">12143</a> <a href="#">12144</a> <a href="#">12145</a> <a href="#">12146</a> <a href="#">12147</a> <a href="#">12148</a> <a href="#">12149</a> <a href="#">12150</a> <a href="#">12151</a> <a href="#">12152</a> <a href="#">12153</a> <a href="#">12154</a> <a href="#">12155</a> <a href="#">12156</a> <a href="#">12157</a> <a href="#">12158</a> <a href="#">12159</a> <a href="#">12160</a> <a href="#">12161</a> <a href="#">12162</a> <a href="#">12163</a> <a href="#">12164</a> <a href="#">12165</a> <a href="#">12166</a> <a href="#">12167</a> <a href="#">12168</a> <a href="#">12169</a> <a href="#">12170</a> <a href="#">12171</a> <a href="#">12172</a> <a href="#">12173</a> <a href="#">12174</a> <a href="#">12175</a> <a href="#">12176</a> <a href="#">12177</a> <a href="#">12178</a> <a href="#">12179</a> <a href="#">12180</a> <a href="#">12181</a> <a href="#">12182</a> <a href="#">12183</a> <a href="#">12184</a> <a href="#">12185</a> <a href="#">12186</a> <a href="#">12187</a> <a href="#">12188</a> <a href="#">12189</a> <a href="#">12190</a> <a href="#">12191</a> <a href="#">12192</a> <a href="#">12193</a> <a href="#">12194</a> <a href="#">12195</a> <a href="#">12196</a> <a href="#">12197</a> <a href="#">12198</a> <a href="#">12199</a> <a href="#">12200</a> <a href="#">12201</a> <a href="#">12202</a> <a href="#">12203</a> <a href="#">12204</a> <a href="#">12205</a> <a href="#">12206</a> <a href="#">12207</a> <a href="#">12208</a> <a href="#">12209</a> <a href="#">12210</a> <a href="#">12211</a> <a href="#">12212</a> <a href="#">12213</a> <a href="#">12214</a> <a href="#">12215</a> <a href="#">12216</a> <a href="#">12217</a> <a href="#">12218</a> <a href="#">12219</a> <a href="#">12220</a> <a href="#">12221</a> <a href="#">12222</a> <a href="#">12223</a> <a href="#">12224</a> <a href="#">12225</a> <a href="#">12226</a> <a href="#">12227</a> <a href="#">12228</a> <a href="#">12229</a> <a href="#">12230</a> <a href="#">12231</a> <a href="#">12232</a> <a href="#">12233</a> <a href="#">12234</a> <a href="#">12235</a> <a href="#">12236</a> <a href="#">12237</a> <a href="#">12238</a>					





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
**INSPEKTORAT**

Jalan Yos Sudarso Nomor 06, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112

Telepon/Faksimile (0536) 3222359

Laman <https://inspektorat.kalteng.go.id>, Pos-el [inspektorat@kalteng.go.id](mailto:inspektorat@kalteng.go.id)

---

**LAPORAN HASIL REVIU**

**RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
TAHUN 2025-2029**

**NOMOR : 700.1.2.8/179/LHR/2025/INSP**  
**TANGGAL : 14 SEPTEMBER 2025**



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
**INSPEKTORAT**

Jalan Yos Sudarso Nomor 06, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112

Telepon/Faksimile (0536) 3222359

Laman <https://inspektorat.kalteng.go.id>, Pos-el [inspektorat@kalteng.go.id](mailto:inspektorat@kalteng.go.id)

**LAPORAN HASIL REVIU  
RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
TAHUN 2025 – 2029**

NOMOR : 700.1.2.8/179/LHR/2025/INSP

TANGGAL : 14 SEPTEMBER 2025

**I. RINGKASAN EKSEKUTIF**

1. Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah telah melakukan reviu atas Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2029 berupa pengujian terhadap substansi dan penyajian dokumen rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029.

Reviu ditujukan untuk membantu terlaksananya penyusunan dan penyajian dokumen Renstra Perangkat Daerah serta memberikan keyakinan terbatas mengenai kepatuhan dan keabsahan informasi yang disajikan telah sesuai dengan kaidah-kaidah perencanaan, sehingga dapat menghasilkan dokumen Renstra Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas.

Dalam pelaksanaan reviu, menggunakan aplikasi e-Reviu yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) serta melakukan serangkaian aktivitas untuk menguji substansi dan proses penyusunan atas penyajian dokumen Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dengan dokumen pendukung lainnya, permintaan keterangan mengenai proses penyusunan untuk mengetahui hubungan dan hal-hal yang tidak terdapat dalam dokumen penyajian.

2. Berdasarkan hasil reviu, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Keterhubungan dan kesesuaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dan/atau pertumbuhan kinerja urusan daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah bersangkutan dalam rancangan akhir Renstra PD Tahun 2025-2029.

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **66** catatan yang selaras dan **0** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam lampiran.

- b. Keterhubungan Kinerja, Indikator, dan target kinerja rancangan akhir Renstra PD tahun 2025-2029 (IKU Perangkat daerah dan IKK bagi perangkat daerah pemangku urusan).

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **4** catatan yang selaras dan **0** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam lampiran.

- c. Konsistensi dan keterhubungan antara program, kegiatan, subkegiatan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dengan program prioritas dan program perangkat daerah pada RPJMD Tahun 2025-2029;

- 1) Konsistensi dan Keterhubungan Program Prioritas pada RPJMD dengan Program pada Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah.

Berdasarkan hasil revidi dinyatakan **1** catatan yang selaras dan **0** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam lampiran.

Pada saat pelaksanaan revidi data tidak disajikan (KKR 3 perevidi “data tidak ditemukan”) pada aplikasi e-Revidi sehingga disusun secara manual (file *excel*) oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah.

- 2) Konsistensi dan Keterhubungan Program Perangkat Daerah pada RPJMD dengan Program pada Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah.

Berdasarkan hasil revidi dinyatakan **5** catatan yang selaras dan **0** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam lampiran.

- d. Kesesuaian antara target kinerja Ranhir Renstra PD tahun 2025-2029 dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian kinerja Renstra PD periode 2020-2024.

- 1) Keselarasan Penetapan Target IKU dengan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Capaian Periode Sebelumnya.

Berdasarkan hasil revidi dinyatakan **3** catatan yang selaras dan **0** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam lampiran.

- 2) Keselarasan Penetapan Target IKD dengan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Capaian Periode Sebelumnya.

Berdasarkan hasil revidi dinyatakan **1** catatan yang selaras dan **0** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam lampiran.

- e. Ketaatan dengan kaidah-kaidah perencanaan lainnya yang berkaitan dengan kesesuaian penetapan target Subkegiatan dengan Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD)

Berdasarkan hasil revidi dinyatakan **0** catatan yang selaras dan **27** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam lampiran.

27 catatan tidak selaras dikarenakan belum melengkapi Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) secara lengkap untuk tahun 2022–2024 sebagai bahan pembandingan untuk menetapkan target kinerja dan satuan yang digunakan dalam dokumen Renstra Periode 2025–2029.

3. Pelaksanaan revidi atas rancangan akhir Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah tidak termasuk tata cara penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang meliputi : A. Sistematis renstra perangkat daerah tahun 2025-2029 ; B. Tata cara penyusunan renstra perangkat daerah Tahun 2025-2029 sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra 2025-2029.
4. Berdasarkan hasil revidi disarankan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah untuk:
  - a. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah teknis, terkait sinkronisasi dan integrasi DSSD dengan dokumen perencanaan.

- b. Menjadikan Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) untuk tahun 2022–2024 sebagai bahan pembandingan untuk menetapkan target kinerja dan satuan yang digunakan dalam dokumen Renstra Periode 2025–2029.
- c. Dalam penyusunan Renstra agar mempedomani ketentuan yang berlaku tentang Pedoman Penyusunan Renstra 2025-2029.
- d. Memastikan keterhubungan program prioritas daerah dan program prioritas perangkat daerah dimuat pada saat penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan diantaranya Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, Rencana Kerja Tahunan, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja (dokumen yang berisi kesepakatan antara atasan dan bawahan tentang target kinerja yang harus dicapai dalam periode tertentu). Penjelasan keterkaitan dengan RPJMD sebaiknya ditulis lebih rinci sehingga memudahkan proses monitoring, evaluasi, reviu dan penilaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

## **II. DASAR REVIU**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025.
5. Surat Tugas Plt.Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 700/048/SPT/IRBAN-II/INP Tanggal 26 Agustus 2025.

## **III. TUJUAN REVIU**

Tujuan Reviu Rancangan Akhir Renstra Tahun 2025-2029 yaitu untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen Renstra telah disusun sesuai dengan:

1. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
4. Instruksi Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 700.1.1.1/1811/IJ Hal Reviu Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 tanggal 1 Agustus 2025 beserta lampirannya.

#### **IV. RUANG LINGKUP REVIU**

Reviu atas Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dilaksanakan dengan melakukan pengujian sekurang-kurangnya atas:

1. Keterhubungan dan kesesuaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dan/atau pertumbuhan kinerja urusan daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah bersangkutan dalam rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
2. Keterhubungan Kinerja, Indikator, dan target kinerja rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
3. Konsistensi dan keterhubungan antara Program, Kegiatan, Subkegiatan pada rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dengan program prioritas dan program perangkat daerah pada RPJMD Tahun 2025-2029;
  - a. Konsistensi Program Prioritas pada RPJMD dengan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan
  - b. Konsistensi Program Perangkat Daerah pada RPJMD dengan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah.
4. Konsistensi Program Perangkat Daerah pada RPJMD dengan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah;
  - a. Kesesuaian penetapan IKU dengan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi tahun sebelumnya; dan
  - b. Kesesuaian penetapan IKD dengan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi tahun sebelumnya.
5. Ketaatan dengan kaidah-kaidah perencanaan lainnya yang berkaitan dengan kesesuaian penetapan target Subkegiatan dengan Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD).

#### **V. METODOLOGI REVIU**

Metodologi yang digunakan dalam reviu dokumen Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah melalui tahapan persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan dengan penjelasan sebagai berikut.

1. Penelaahan dokumen dilakukan terhadap Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah serta dokumen perencanaan terkait lainnya, seperti RPJMD, dan dokumen hasil evaluasi kinerja periode sebelumnya, guna memastikan konsistensi, keterpaduan, dan keselarasan arah kebijakan.
2. Wawancara dan diskusi dengan pihak-pihak terkait dilaksanakan guna memperoleh klarifikasi, masukan, serta pemahaman yang lebih mendalam terhadap substansi dokumen Renstra.
3. Pengujian terbatas dilakukan melalui penelusuran data dan informasi pendukung, uji konsistensi antar dokumen, serta verifikasi terhadap indikator kinerja utama (IKU) dan program/kegiatan prioritas untuk memastikan kelayakan dan relevansi dengan tujuan pembangunan daerah.

4. Konfirmasi dan tanggapan dengan pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah sebelum finalisasi laporan reviu atas Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029.

## **VI. SUSUNAN TIM REVIU**

Reviu atas Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah periode tahun 2025-2029 dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas dari Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 700/48/SPT/IRBAN-II/INSP tanggal 26 Agustus 2025, dengan susunan tim sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab : EKO SULISTIONO, S.STP, M. AP, CGCAE  
NIP. 19791107 199810 1 001 (Plt. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Tengah)
2. Pembantu Penanggung Jawab : DIANA, S.H, CGCAE (Inspektur Pembantu II)  
NIP. 19820629 200604 2 006
3. Pengendali Teknis : YULIANTI T.T. ASANG, S.T., CGRM  
NIP. 19760415 200604 2 022
4. Ketua Tim : BETSIANY, S.Hut  
NIP. 19810512 201001 2 003
5. Anggota Tim : a) M. ABDUL HAYYI NU'MAN, S.E  
NIP. 19801117 201101 1 001  
b) NOVELIN ELLY VESSA, S.E  
NIP. 19870630 201001 2 001  
c) BETNOVIDO, S.Sos  
NIP. 19871115 201503 1 002  
d) HERYANTO S.H. SIREGAR, S.E, CGRM  
NIP. 19830925 201001 1 022  
e) HERSYA AMALIA, S.H  
NIP. 19880419 201101 2 023  
f) ANITA LIMERIA, S.T  
NIP. 20001230 202504 2 006

Untuk Melakukan Reviu atas Renstra Tahun 2025-2029 pada 6 (enam) Perangkat Daerah diantaranya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah selama 16 (enam belas) hari, terhitung mulai tanggal 26 Agustus sampai dengan 10 September 2025.

## **VII. GAMBARAN UMUM**

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Perangkat Daerah sebagai berikut:

## 1. Kedudukan

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, pada Pasal 594 ayat (1) menyatakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

## 2. Tugas

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## 3. Fungsi :

Untuk melaksanakan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. Pembinaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan desa, kelembagaan, perkembangan desa dan pelayanan sosial dasar, pemberdayaan pengelolaan sumber daya alam, kawasan perdesaan dan ketahanan masyarakat, pemberdayaan ekonomi dan investasi desa;
- c. Pelaksanaan koordinasi kebijaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan prakarsa dan swadaya gotong royong;
- d. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- e. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas.

## VIII. URAIAN HASIL REVIU

1. Keterhubungan dan kesesuaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dan/atau pertumbuhan kinerja urusan daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah bersangkutan dalam rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan telah selaras dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dan/atau pertumbuhan kinerja urusan daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah.

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 menetapkan tujuan "Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa". Tujuan tersebut dijabarkan ke dalam 3 (tiga) sasaran, yaitu:

- a. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa;
- b. Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- c. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan pada Perangkat Daerah.

Untuk mencapai 3 (tiga) sasaran tersebut maka dituangkan dalam 5 (lima) Program, 12 (dua belas) Kegiatan dan 66 (enam puluh enam) Sub Kegiatan. Keseluruhan informasi menggunakan aliran data dari SIPD.

Berdasarkan hasil revidi dinyatakan **66** catatan yang selaras dan **0** catatan yang tidak selaras.

- 2 Keterhubungan Kinerja, Indikator, dan target kinerja rancangan akhir Renstra PD tahun 2025-2029 (IKU Perangkat daerah dan IKK bagi perangkat daerah pemangku urusan);

Keterhubungan kinerja, indikator, dan target kinerja rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 ini dilakukan pengujian terhadap:

- Indikator kinerja perangkat daerah (Tujuan/Sasaran/Program) dengan bidang urusan pada perangkat daerah.
- Pengujian Indikator IKU/IKD yang ditetapkan pemerintah daerah dengan simpulan *selaras/tidak selaras* dengan bidang urusan yang diampuh oleh perangkat daerah.

Berdasarkan hasil revidi dinyatakan **4** catatan yang selaras dan **0** catatan yang tidak selaras.

Keseluruhan informasi menggunakan aliran data dari SIPD.

- 3 Konsistensi dan keterhubungan antara program, kegiatan, subkegiatan rancangan akhir Renstra PD tahun 2025-2029 dengan program prioritas dan program perangkat daerah pada RPJMD tahun 2025-2029;

- a. Konsistensi Program Prioritas pada RPJMD dengan Program pada Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah;

Pengujian dilakukan terhadap:

- 1) Program Prioritas pada BAB IV RPJMD diturunkan/tidak diturunkan pada rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah (Program pada Rancir Renstra PD)
- 2) Aliran data dari SIPD.

Pada saat pelaksanaan revidi data tidak disajikan (KKR 3 perevidi “data tidak ditemukan”) pada aplikasi e-Revidi sehingga disusun secara manual (file *excel*) oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah.mengampu 1 (satu) Program Prioritas Huma Betang yang dimuat dalam RPJMD, yaitu **Insentif kepala desa, BPD, Damang, Mantir, dan RT/RW se Kalimantan Tengah** dan diimplementasikan dalam Rancangan Akhir Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029, dalam **2.13.04 Program administrasi pemerintahan desa**.

Berdasarkan uraian tersebut diatas disimpulkan bahwa program prioritas yang termuat dalam rancangan akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 telah **selaras** dengan program prioritas daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029.

- b. Konsistensi Program Perangkat Daerah pada RPJMD dengan Program pada Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah;

Pengujian dilakukan terhadap:

- Program Prioritas Perangkat Daerah pada BAB IV RPJMD diturunkan/tidak diturunkan pada rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah (program pada Ranhir Renstra PD)
- Aliran data dari SIPD.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah memiliki 5 (lima) Program, yaitu:

- 2.13.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
- 2.13.02 Program Penataan Desa;
- 2.13.03 Program Peningkatan Kerjasama Desa;
- 2.13.04 Program Administrasi Pemerintahan Desa;
- 2.13.05 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

5 (lima) Program yang termuat dalam rancangan akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah telah mengakomodir 5 (lima) Program yang terdapat pada BAB IV Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029, sehingga disimpulkan Program dalam rancangan akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian, dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 **telah selaras** dengan Program perangkat daerah yang terdapat pada BAB IV Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029.

4. Kesesuaian antara target kinerja Ranhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian kinerja Renstra Perangkat Daerah periode 2020-2024.;

Pengujian dilakukan terhadap:

- Penetapan target IKU dan IKD pada rancangan akhir renstra perangkat daerah T1-T5 berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tahun sebelumnya.
- Aliran data dari SIPD.

- a. Kesesuaian Penetapan IKU dengan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil rewiu dinyatakan **3** catatan yang selaras dan **0** catatan yang tidak selaras.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah

menetapkan 3 (tiga) IKU, yaitu Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri, Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan. Meskipun IKU tersebut berbeda dengan IKU periode sebelumnya namun telah sesuai dengan *Cascading* Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah periode 2025-2029.

- b. Kesesuaian Penetapan IKD dengan Pengendalian dan Evaluasi tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **1** catatan yang selaras dan **0** catatan yang tidak selaras.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan 1 (satu) IKD pada dokumen ranhir Renstra dan termuat pula pada aplikasi e-Reviu. IKD tersebut adalah Indeks Desa Membangun. Meskipun IKU tersebut berbeda dengan IKD periode sebelumnya namun telah sesuai dengan *Cascading* Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah periode 2025-2029.

5. Ketaatan dengan kaidah-kaidah perencanaan yang berkaitan dengan kesesuaian penetapan target Subkegiatan dengan Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD)

Pengujian dilakukan terhadap:

- Penetapan target indikator Sub Kegiatan pada rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah T1-T5 berdasarkan data statistik sektoral daerah tahun sebelumnya (Tahun 2022-2024)
- Aliran data dari SIPD.

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **0** catatan yang selaras dan **27** catatan yang tidak selaras. 27 catatan tidak selaras dikarenakan belum melengkapi Satuan dan Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) secara lengkap untuk tahun 2022–2024 sebagai bahan pembandingan untuk menetapkan target kinerja dan satuan yang digunakan dalam dokumen Renstra Periode 2025–2029.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah kepada tim reviu diketahui bahwa :

- a. Telah dilakukan pengisian data statistik sektoral daerah sesuai data yang ada pada aplikasi E-Walidata yaitu sebanyak 31 data untuk tahun 2020-2024, namun pada aplikasi SPID e-Reviu Perencanaan terdapat 27 nama DSSD 2022-2024.
  - b. Pengisian DSSD telah diinput untuk Tahun 2020-2024, namun pada aplikasi SPID e-Reviu tidak muncul/tersaji DSSD 2024.
6. Pelaksanaan reviu atas rancangan akhir Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah tidak termasuk tata cara penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang meliputi : A. Sistematika Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 ; B.Tata cara penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra 2025-2029.

## **IX. SARAN**

Berdasarkan hasil reviu Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 disarankan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah untuk:

- a. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah teknis, terkait sinkronisasi dan integrasi DSSD dengan dokumen perencanaan.
- b. Menjadikan Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) untuk tahun 2022 – 2024 sebagai bahan pembandingan untuk menetapkan target kinerja dan satuan yang digunakan dalam dokumen Renstra Periode 2025 – 2029.
- c. Dalam penyusunan Renstra agar mempedomani ketentuan yang berlaku tentang Pedoman Penyusunan Renstra 2025-2029 serta ketentuan lainnya.
- d. Memastikan keterhubungan program prioritas daerah dan program prioritas perangkat daerah dimuat pada saat penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan diantaranya Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, Rencana Kerja Tahunan, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja (dokumen yang berisi kesepakatan antara atasan dan bawahan tentang target kinerja yang harus dicapai dalam periode tertentu). Penjelasan keterkaitan dengan RPJMD sebaiknya ditulis lebih rinci sehingga memudahkan proses monitoring, evaluasi, reviu dan penilaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

## **X. APRESIASI**

Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerjasama dari seluruh pejabat/pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan, sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan reviu Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029.

Plt. INSPEKTUR DAERAH,



**EKO SULISTIONO, S.STP., M.AP, CGCAE**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19791107 199810 1 001

KERTAS KERJA VERIFIKASI RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DINAS/BADAN : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO.	URAIAN	DEFINISI OPERASIONAL	CHECK LIST		REKOMENDASI
			SELARAS	TIDAK SELARAS	
1	MATRIK TINDAK LANJUT CHR APIP	memastikan CHR APIP tentang Reviu Renstra ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah dengan membuat Matrik tindak lanjut berdasarkan CHR.	✓		Agar dibuat penjelasan trsendiri terkait TL CHR APIP dengan menampilkan screenshot tampilan aplikasi E-Walidata yang telah diinput.
2	POHON KINERJA	memastikan keterkaitan Kinerja Sasaran RPJMD terhadap Kinerja dari Tujuan, Kinerja Sasaran, Kinerja Program, Kinerja Kegiatan dan Kinerja Sub Kegiatan Perangkat Daerah sesuai Urusan yang diampu.	✓		1) Agar dibuat keterangan/penjelasan rumpun pewarnaan kotak kinerja berdasarkan urutan hierarkinya. 2) Jika garis panah memiliki pengertian jalur hubungan yang berbeda (contoh ada jalur garis hierarki dan ada jalur garis koordinasi), agar dibedakan penyajiannya (contoh ada garis tegas dan ada garis putus-putus) dan diberi keterangan. 3) <i>Cross Cutting</i> terkait batas desa belum melibatkan Biro Pemerintahan selaku koordinator Tata Batas, dan bisa melibatkan Dinas ESDM juga karena kegiatan pertambangan dapat mempengaruhi tata batas. 4) <i>Cross Cutting</i> terkait trantibumlinmas agar tambahkan BPBD di bawah Satpol PP, karena terkait Destana.
3	CASCADING KINERJA	memastikan keterkaitan penjenjangan Kinerja Sasaran RPJMD terhadap Kinerja dari Tujuan, Kinerja Sasaran, Kinerja Program, Kinerja Kegiatan dan Kinerja Sub Kegiatan Perangkat Daerah sesuai Urusan yang diampu. Penjenjangan Kinerja yang dimaksud memperhatikan komponen struktur perencanaan, struktur organisasi dan struktur anggaran.	✓		Tampilan cascading agar diperbaiki sehingga mudah terbaca
4	PROGRAM RENSTRA TERHADAP RPJMD	memastikan keselarasan dari Program dan Kinerja Program pada RPJMD terhadap Program pada RENSTRA PD.	✓		-
5	PROGRAM PRIORITAS	memastikan Program Prioritas KARTU HUMA BETANG SEJAHTERA sudah masuk pada RENSTRA PD.	✓		-
6	HAL-HAL LAIN	memastikan kesesuaian Sistematika, Target dan Prioritas Provinsi dan Nasional (Kementerian/Lembaga)	✓		Hal 12 (landasan hukum) : UU 21/1958 sdh diganti dengan UU 14/2023, UU 33/2004 sdh ganti dengan UU 1/2022 Hal 35 (kinerja capaian) : Rasio capaian jumlah desa tertinggal seharusnya lebih dari 100%. Desa tertinggal targetnya berkurang agar naik kelas, sehingga jika capaian lebih kecil dari target, tentu target pengurangan terpenuhi Hal 44 (tabel isu strategis) : 1) Permasalahan perangkat daerah akan lebih baik jika berdasar analisa terhadap capaian data atau kinerja terkait. Sehingga permasalahan tersebut akan lebih terlihat jelas dikarenakan adanya disparitas dari data yang ingin dicapai dengan data kondisi yang terjadi. 2) Dalam isu strategis ada penyebutan "daerah tertinggal", berdasarkan Kepmendes PD TT No. 79 Tahun 2019 tentang Penetapan Kabupaten Daerah Tertinggal yang Terentaskan Tahun 2015-2019, Kabupaten Seruyan yang menjadi satu-satunya daerah tertinggal di Prov. Kalteng telah terentaskan.

Verifikator :

Nama : Endratomo Pambudi  
NIP : 198912182010101002  
Jabatan : Perencana Ahli Muda  
TTD :



Mengetahui Kepala Bidang :

Nama : Chandra Fuji Asmara, ST., M.Eng  
NIP : 197706032003121007  
Jabatan : Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia  
TTD :

